

INDOPROGRESS

Pandemi di Asia yang Neoliberal

Vol. I, No. 01, 2021



Jurnal IndoPROGRESS (JIP) berbasis di Indonesia dan diterbitkan dua kali setahun (Februari dan Agustus) sebagai wahana untuk memajukan kritik dan pemahaman atas kapitalisme kontemporer. JIP menerbitkan analisis ekonomi-politik, dan diskusi-diskusi tentang teori sosial kontemporer, kekuasaan negara dan gerakan sosial, evolusi moda produksi, media dan literatur, serta sejarah dan filsafat.

Seluruh artikel melalui penilaian sejawat dan diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dalam akses terbuka (*open access*). Selain menerima artikel orisinal dan konseptual, JIP juga mengkurasi, menerjemahkan, dan menerbitkan ulang analisis penting mengenai kapitalisme, khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara. JIP menerima pengajuan tema untuk edisi khusus dan mengorganisasi panel daring untuk mempromosikan diskusi intelektual.

Pimpinan Redaksi

Inaya Rakhmani

Redaktur

Martin Suryajaya

Hizkia Yosie Polimpung

Muhammad Ridha

Dewan Penasihat

Vedi Hadiz, The University of Melbourne

John Roosa, The University of British Columbia

Marcello Musto, York University

Hilmar Farid, Ministry of Education and Culture of Indonesia

Silvia Tiwon, Berkeley University of California

Immanuel Ness, City University of New York

Asisten Redaksi

Francesco Hugo

Dewan Editor

Rianne Subijanto, Baruch College of City University of New York

Abdil Mughis Mudhoffir, University of Melbourne

Intan Suwandi, Illinois State University

Arianto Sangadji, York University

Airlangga Pribadi, Airlangga University

Iqra Anugrah, Kyoto University

Made Suprijatma, Cornell University

Dede Mulyanto, Padjadjaran University

Dave Lumenta, University of Indonesia

Coen Pontoh, Indoprogress (AS)

Ilustrator

Muhammad Awaludin Yusuf

DAFTAR ISI

- 2 PANDEMI DI ASIA YANG NEOLIBERAL
- 9 PROSES KERJA BERDASARKAN ALGORITME
DAN PERLAWANANNYA DALAM EKONOMI
PLATFORM DI INDONESIA: KASUS GO-JEK DAN
GRAB
- 37 PANDEMI, KESEHATAN PUBLIK, DAN PEKERJA
SANITASI DI MUMBAI: KRISIS PEKERJAAN DAN
KEHIDUPAN
- 67 POLITIK PERGERAKAN KIRI YANG DIPIMPIN
KELAS MENENGAH DI FILIPINA*
- 93 KOMODIFIKASI SUBSISTENSI: PROFIT,
PLATFORMISASI, DAN PANDEMI DI INDONESIA
MASA NEOLIBERAL
- 119 NORMALISASI PREKARISASI DALAM
NEOLIBERALISME DI INDONESIA: MEMAHAMI
PROGRAM MAGANG PADA MASA PANDEMI
- 141 TRANSFORMASI KAPITALISME DI INDONESIA:
KONVERGENSI KEPENTINGAN NEOLIBERAL DAN
OLIGARKI SEMASA PANDEMI
- 163 ULASAN BUKU: Slavoj Žižek, *Pandemic! Covid-19
Shakes the World.*

PANDEMI DI ASIA YANG NEOLIBERAL

Dewan Redaksi

Bagaimana mereka yang mengharapkan berakhirnya kapitalisme memahami dampak krisis virus korona?

Pada edisi kali ini, *Jurnal IndoProgress Marxis Indonesia* bermaksud memahami dan merefleksikan dampak COVID-19 di kawasan Asia. Kami melakukan ini dengan agenda yang dekat dengan simpati politik kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa organisasi donor internasional yang berpengaruh—yang berada di episentrum ekonomi global neoliberal kita—mengakui bagaimana pandemi telah mengekspos jenis-jenis ketimpangan baru dan memperburuk yang lama (Ferreira, 2021). Para sarjana di negara demokrasi kapitalis “Barat” mempersoalkan hubungan antara populis sayap kanan dan surutnya keahlian dalam menangani krisis sembari berargumen mendukung kehadiran Negara (Fukuyama, 2020). Melihat kegagalan Bolsonaro dan Trump memimpin, para “liberal” itu pun berharap populisme akan berakhir.

Tetapi harapan semacam ini adalah salah satu yang lepas dari realitas kelas pekerja, yang banyak di antaranya adalah pekerja vital serta borjuasi yang semakin rawan situasinya (Standing, 2011). Dalam tiga dekade terakhir, setidaknya, transformasi neoliberal ekonomi kapitalis di seluruh dunia dan kawasan Asia telah semakin melanggengkan eksploitasi kelas pekerja. Meskipun posisi sosial kita berbeda dalam hal kelas, ras, etnis, jenis kelamin, agama—dan daftarnya terus berlanjut—kita semua tersangkut erat dalam jejaring rumit kapitalisme neoliberal abad ke-21 dengan cara yang nyata-nyata eksploitatif. Dengan pikiran inilah kami memutuskan untuk menerbitkan jurnal ini dalam dua bahasa: Indonesia (untuk membuat karya para penulis dikenal di berbagai wilayah di negara ini) dan Inggris (untuk membuat karya mereka di-

kenal dan terlibat secara regional). Kami memosisikan jurnal ini dalam persaudaraan yang lebih luas, juga lokal.

Negara-negara maju, seperti AS, pernah menghadapi krisis dan dampaknya pada 2008, dan pandemi global COVID-19 saat ini telah mendorong ekonomi dunia ke moda bertahan hidup. Sementara pandemi telah berdampak pada semua negara, masyarakat, dan kelas secara bersamaan, bagaimana ia memengaruhi kita semua jauh dari homogen. Mungkin saja pandemi ini mengambil bentuk krisis kesehatan, tetapi kami melihatnya sebagai gejala masalah yang lebih dalam dari bagaimana kapitalisme mampu bersalin rupa merespons dan menunggangi reformasi nilai-nilai sosial (Harvey, *Seventeen Contradictions and the End of Capitalism*, 2014) untuk mempertahankan akumulasi modal. Hal ini menjelma dalam cara-cara sosial yang kompleks, khas, heterogen, dan, kadang-kadang, saling berbenturan, sejauh yang diizinkan oleh pasar neoliberal.

Memetakan kontradiksi internal dalam logika spasial akumulasi modal memang merupakan tugas utama para sarjana dan aktivis yang risau tentang bagaimana laba dan perburuan rente berlangsung dalam “momen-momen” yang khas ini, seperti yang dikatakan Marx. Bagaimanapun, kita hidup dalam suasana historis di mana produksi, konsumsi, dan distribusi manusia dan barang berjalan secepat modal ditanam dan diinvestasikan kembali di pasar tenaga kerja yang semakin digital.

Di sini pengamatan David Harvey tentang politik anti-kapitalis di masa pandemi tampaknya berguna. Dia mengungkapkan bahwa:

“Hal ini menjadi rumit karena dielaborasi melalui, misalnya, lensa persaingan geopolitik, perkembangan geografis yang tidak merata, lembaga keuangan, kebijakan negara, rekonfigurasi teknologi dan jejaring pembagian kerja dan hubungan sosial yang senantiasa berubah. Akan tetapi, saya membayangkan model ini sebagai sesuatu yang tertanam dalam konteks reproduksi sosial yang lebih luas (dalam rumah tangga dan masyarakat), dalam relasi metabolik yang terus berlangsung dan terus berkembang dengan alam (termasuk “sifat bawaan” urbanisasi dan lingkungan terbangun) dan segala bentuk formasi budaya, ilmiah (berbasis pengetahuan), agama dan sosial terkait yang biasanya diciptakan oleh populasi manusia lintas ruang dan waktu” (Harvey, 2020).

Bersama para penulis dalam edisi ini, kami merenungkan bagaimana wabah telah menyebar di medan sosial yang memang sudah tidak setara, memobilisasi ketimpangan sosial dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya di abad ke-21. Hal ini berlangsung dalam hierarki kekuasaan dan sengketa antara elit politik dalam proses respons kebijakan Negara terhadap COVID-19, dengan sumber daya yang tidak merata di sektor kesehatan masyarakat yang sudah ditunggangi oleh kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Keadaan ini, tentu saja, telah meresap, dan terinternalisasi, dalam tindakan para penyelenggara Negara dari generasi ke generasi.

Kami melihat kasus di Indonesia, India, dan Filipina. Dalam edisi ini, para penulis membahas bagaimana pemerintah kapitalis Indonesia memanfaatkan pandemi untuk menemukan cara baru untuk mengeksploitasi pekerja dan pengorganisasian diri sebelum dan selama pandemi. Panimbang (2021), dengan mempelajari strategi organisasi pekerja transportasi daring di Jakarta, berpendapat bahwa strategi perlawanan yang inovatif telah mengembangkan bentuk partisipasi baru di antara para pengemudi. Mereka adalah pekerja vital yang didikte oleh mekanisme pasar untuk tetap bergerak selama pandemi, namun, di tengah eksploitasi ekstrem, berhasil menemukan cara untuk mengatur diri sendiri berdasarkan komunitas, asosiasi, dan serikat. Praktik kolektivitas ini penting dalam membayangkan dan mengonseptualisasi politik anti-kapitalis, di mana strategi baru untuk solidaritas buruh—yang difasilitasi justru oleh platform digital yang sedianya dirancang untuk mengeksploitasi mereka—membantu kita merenungkan gerakan buruh yang lebih luas di luar Indonesia.

Yang juga penting, pekerja vital dieksploitasi dengan cara yang spesifik secara sosial; cara yang juga menelusur garis kasta. Vyas dan Jha (2021), menggunakan ekonomi politik ruang Harvey dan biopolitik dan teknologi Foucault, membuat pengalaman pekerja sanitasi Dalit sebagai pejuang garis depan selama pandemi di India diketahui oleh kita. Semua pekerja sanitasi di India adalah Dalit—kasta paling terpinggirkan di negeri itu. Bekerja dalam sistem sanitasi lingkungan warisan kolonialisme Inggris, segregasi sosial ini bertaut dengan bagaimana limbah dikelola di perkotaan dan perdesaan, yang secara historis merupakan ru-

ang fisik untuk mengendalikan penyakit sekaligus penduduk pribumi. COVID-19, menurut pendapat penulis, telah memperluas ruang kontrol tenaga kerja dan akumulasi modal, seraya mensegregasi dan mensegmentasi wilayah kota dengan mengorbankan pekerja Dalit.

Lalu apa yang harus dilakukan para intelektual dan aktivis Kiri dengan latar sosial historis ini? Refleksi Tadem (2021) tentang gerakan Kiri yang dipimpin kelas menengah di Filipina, kami rasa, sangat berguna dalam diskusi internal kami mengenai tuduhan kegagalan borjuasi liberal Indonesia dalam mereformasi sistem politik demokrasi kita (Mudhoffir, 2021) serta maknanya dalam analisis kelas yang lebih luas (Pontoh, 2021). Tadem (2021) menelaah komposisi kepemimpinan kelas menengah di Partai Komunis Filipina (CPP) dan Tentara Rakyat Baru (NPA), serta kendaraan politiknya, Front Demokratik Nasional (NDF). Bersama-sama, mereka menentukan arah gerakan revolusioner, di mana keterampilan borjuasi berperan. Ini tidak berbeda dengan defisit profesionalisme dan keahlian dalam respons kebijakan pandemi dari pemerintah populis sayap kanan yang dipermasalahkan oleh para sarjana liberal. Yang penting di sini, Tadem berpendapat bahwa kecakapan kelas menengah telah mendorong demokratisasi, sementara juga mengingatkan pembaca tentang batasan metode ini dalam perubahan struktural yang radikal.

Sebagai bagian dari harapan para intelektual dan aktivis Kiri untuk memperluas ruang sosial diskusi Marxis di kawasan ini, kami meluncurkan *Call for Papers* untuk merekrut para sarjana muda dan membimbing mereka untuk melakukan analisis empiris berdasarkan masalah akumulasi modal. Di sini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Hizkia Yosie Polimpung, Diatyka Widya Permata Yaasih, dan Abdil Mughis Mudhoffir yang telah menyisihkan waktu dan upaya untuk berpartisipasi dalam strategi politik dan intelektual kami ini. Kami sangat menghargai kerja keras mereka dan redistribusi akses ke pengetahuan dalam lingkup yang kecil, namun tak kurang maknanya ini.

Polimpung bekerja dengan Wilujeng (2021) yang meneliti bagaimana pemerintah Indonesia bangkit dari krisis multidimensi dengan mengatalisasi platform teknologi. Platform-platform ini, menurutnya, melanggengkan pasar yang mengaburkan batasan antara tenaga ker-

ja manusia dan moda produksi. Ruang seperti itu tidak hanya tunduk pada permintaan konsumen kelas menengah yang semakin bergantung pada sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga mempercepat eksploitasi pekerja melalui legitimasi kewirausahaan dan mundurnya Negara dari penyediaan pekerjaan yang aman.

Yasih bekerja dengan Wirman (2021) yang menjalankan studi tentang internalisasi subjektivitas neoliberal melalui program magang di industri jasa. Dia berpendapat bahwa program semacam itu telah meningkatkan kemampuan pekerja muda beradaptasi di pasar tenaga kerja yang semakin tidak stabil dan dibuat semakin genting oleh pandemi. Kerisauan Wirman terkait erat dengan kekhawatiran Wilujeng (2021), karena pekerja muda dan alumni dibiarkan berjuang sendiri tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk bertahan hidup dalam iklim kerawanan tenaga kerja yang dibuat semakin normal oleh pandemi.

Sementara itu, Mudhoffir bekerja dengan Rainditya (2021) dalam diskusinya tentang penyusunan dan percepatan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja yang disahkan selama pandemi. Dia berpendapat bahwa undang-undang ini melindungi surplus oligarki dengan mengamankan akses industri ekstraktif ke sumber daya dan melegitimasi kasualisasi tenaga kerja. Memanfaatkan krisis kesehatan yang multidimensi, undang-undang ini disahkan dengan dalih pemulihan ekonomi nasional agar Indonesia dapat memulihkan diri dari dampak pandemi. Yang penting di sini adalah bagaimana dia mengamati konvergensi kepentingan neoliberal dan oligarki selama pengalaman Indonesia dengan COVID-19.

Edisi ini ditutup dengan ulasan buku karya Slavoj Žižek berjudul *Pandemic! Covid-19 Shakes the World* (2020) oleh Anugrah (2021). Dia mempersoalkan bentuk baru Komunisme yang ditawarkan Žižek dengan mengadunya dengan pelajaran sejarah “Komunisme Perang” Bolshevik: Perlunya konstruksi sosialis. Di masa ketika biaya kesehatan masyarakat tinggi dan kekuasaan negara sewenang-wenang, Anugrah secara kritis mempertanyakan apakah usulan komunis seperti itu tidak lebih dari peremajaan demokrasi sosial Keynesian, dengan persoalan-persoalan seperti strategi demokrasi yang jelas, pasar neoliberal dan perusakan ekologi alam olehnya yang tetap tidak tertangani. Ulasan

ini begitu baik menutup edisi ini, menyatukan sudut pandang, kasus, dan konteks yang berbeda dengan materialisme sejarah. Genaplah sudah lingkaran kita.

Menutup catatan editorial ini, kami ingin berterima kasih secara khusus kepada Marcello Musto, Profesor Sosiologi di York University, Kanada, yang telah memberikan saran untuk arah edisi pertama ini, serta menghubungkan kami dengan Ranabbir Samaddar, Direktur Calcutta Research Group, yang melaluinya kami dapat mengkurasi karya Vya dan Jha. Kami juga berterima kasih kepada Vedi Hadiz, Direktur Asia Institute, University of Melbourne, yang telah memperkenalkan kami kepada Eduardo Tadem dari Center for Integrative and Development Studies, University of the Philippines Diliman, yang melaluinya kami juga dapat mengkurasi karya Tadem. Kami sangat menghargai persahabatan ini dan berharap bahwa membaca refleksi ini memberikan sedikit kelegaan dari pengalaman heterogen kita dengan alienasi yang tak terhindarkan.

Dewan Redaksi
Jurnal IndoProgress
Agustus 2021

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, I. (2021). Ulasan Buku: Slavoj Žižek, *Pandemic! Covid-19 Shakes the World*. *Jurnal IndoProgress*, 1(1).
- Ferreira, F. G. (2021, June). *Inequality in the Time of COVID-19*. Retrieved August 2021, from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/06/inequality-and-covid-19-ferreira.htm>
- Fukuyama, F. (2020, July/August). *The Pandemic and Political Order It Takes a State*. Retrieved August 2021, from Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order>

- Harvey, D. (2014). *Seventeen Contradictions and the End of Capitalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2020, March 22). *Anti-Capitalist Politics in the Time of COVID-19*. Retrieved August 2021, from Reading Marx's Capital with David Harvey: <http://davidharvey.org/2020/03/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19/>
- Mudhoffir, A. M. (2021, June 6). *Aktivisme Borjuis: Mengapa Kelas Menengah Reformis Gagal Mempertahankan Demokrasi?* Retrieved August 2021, from Project Multiatuli: <https://projectmultatuli.org/aktivisme-borjuis-kelas-menengah-reformis-gagal/>
- Panimbang, F. (2021). Proses Kerja Berdasarkan Algoritme dan Perlawanannya dalam Ekonomi Platform di Indonesia: Kasus GO-JEK dan GRAB. *Jurnal IndoProgress, 1*(1).
- Pontoh, C. (2021, June 16). *Menginvestigasi Kelas Menengah: Tanggapan untuk Abdil Mughis Mudhoffir*. Retrieved August 2021, from IndoProgress: <https://indoprogress.com/2021/06/menginvestigasi-kelas-menengah-tanggapan-untuk-abdil-mughis-mudhoffir/>
- Rainditya, D. R. (2021). Transformasi Kapitalisme di Indonesia: Konvergensi Kepentingan Neoliberal dan Oligarki Semasa Pandemi. *Jurnal IndoProgress, 1*(1).
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. London and New York: Bloomsbury Academic.
- Tadem, T. S. (2021). Politik Pergerakan Kiri yang Dipimpin Kelas Menengah di Filipina. *Jurnal IndoProgress, 1*(1).
- Vyas, M., & Jha, M. K. (2021). Pandemi, Kesehatan Publik, dan Pekerja sanitasi di Mumbai: Krisis Pekerjaan dan Kehidupan. *Jurnal IndoProgress, 1*(1).
- Wilujeng, E. P. (2021). Komodifikasi Subsistensi: Profit, Platformisasi, dan Pandemi di Indoneia Masa Neoliberal. *Jurnal IndoProgress, 1*(1).
- Wirman, E. R. (2021). Normalisasi Prekarisasi dalam Neoliberalisme di Indonesia: Memahami Program Magang pada Masa Pandemi. *Jurnal IndoProgress, 1*(1).

PROSES KERJA BERDASARKAN ALGORITME DAN PERLAWANANNYA DALAM EKONOMI PLATFORM DI INDONESIA: KASUS GO-JEK DAN GRAB¹

Fahmi Panimbang²

ABSTRAK

Dalam perdebatan tentang kemunculan platform digital dan 'ekonomi gig' yang mempekerjakan jutaan buruh rentan di banyak negara, respons khusus dari buruh di sektor gig ini sangatlah penting bagi teori dan praktik gerakan buruh. Di Indonesia, buruh transportasi berbasis aplikasi telah menunjukkan respons yang menarik meskipun mereka menghadapi banyak tantangan. Tulisan ini membahas proses kerja (*labour process*) berdasarkan rancangan algoritme dan perlawanan terhadapnya oleh para buruh di sektor ekonomi platform di Indonesia, dengan mengangkat kasus dua perusahaan platform utama, Gojek dan Grab. Tulisan ini menjelaskan penggeseran paksa layanan transportasi konvensional oleh perusahaan platform. Penulis menganalisa proses kerja dan kondisi kerja buruh di sektor transportasi berbasis aplikasi dan mendiskusikan perlawanan algoritmik buruh terhadap perusahaan platform. Ia menyoroti bahwa teknologi tidaklah netral, melainkan suatu arena perjuangan kelas. Untuk menguji analisis tersebut, penulis mendasarkan pada kajian kualitatif dengan mewawancarai dan berdiskusi dengan para pengemudi terpilih di kota-kota dengan konsentrasi jumlah buruh paling tinggi, lebih dari setengah dari

1 Bagian-bagian dari tulisan ini telah terbit sebelumnya dalam Panimbang, F. (2021), "Solidarity across boundaries: a new practice of collectivity among workers in the app-based transport sector in Indonesia, *Globalizations*, DOI: 10.1080/14747731.2021.1884789; Panimbang, F. (2021), "Organising app-based transport workers in Indonesia during the COVID-19 pandemic, *Asian Labour Update*, No. 89, Mei 2021; dan Panimbang, F., Arifin, S., Riyadi, S., dan Utami, D.S. (2020), "Resisting exploitation by algorithms: Drivers' contestation of app-based transport in Indonesia (Trade Unions in Transformation 4.0), Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.

2 Fahmi Panimbang adalah peneliti di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Bogor, Indonesia. Salah satu terbitannya antara lain *Resistance on the continent of labour: Strategies and initiatives of labour organizing in Asia (2017)*, diterbitkan oleh Asia Monitor Resource Centre (AMRC). Ia dapat dihubungi melalui email: fahmi.panimbang@gmail.com.

keseluruhan jumlah buruh transportasi berbasis aplikasi di Indonesia. Penulis juga mengulas tiga strategi pengorganisasian pengemudi yang dilakukan saat ini, yaitu model komunitas, asosiasi, dan serikat buruh. Ia berpendapat bahwa praktik kebersamaan (*collectivity*) pengemudi di Indonesia menawarkan wawasan dan pelajaran penting mengenai strategi baru solidaritas buruh, yang relevan bagi gerakan buruh secara lebih luas di Indonesia dan di wilayah lainnya.

Kata-kata Kunci: Indonesia; buruh transportasi berbasis aplikasi; platform digital; proses kerja berdasarkan algoritme; perlawanan algoritmik; kebersamaan.

PENDAHULUAN

Kerentanan buruh yang semakin meningkat di berbagai wilayah di Asia Tenggara telah diserap oleh ekonomi digital yang bertransformasi secara cepat. Di Indonesia saja, sejak awal 2015 jutaan buruh yang rentan telah bekerja di sektor ekonomi platform ini. Sektor digital di negeri ini pun tumbuh cepat karena pasarnya yang besar dan terus berkembang. Pada 2018 saja, ada setidaknya 1.807 *startup* yang aktif di Indonesia, jumlah terbesar di negeri-negeri ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) dan keenam terbesar di seluruh dunia (Adiningsih et al, 2019).

Indonesia sudah menjadi target banyak perusahaan platform baru yang mengadopsi pendekatan strategis terhadap pasar besar negeri ini, termasuk jumlah populasi milenial (yaitu mereka yang lahir antara tahun 1980 hingga 1998) yang terus bertambah dan mewakili sebagian besar pasar konsumen Indonesia. Dengan jumlah lebih dari 267 juta dan angkatan kerja sebanyak 131,01 juta pada 2018, populasi Indonesia sebagian besar didominasi oleh apa yang disebut sebagai kaum milenial, yang merupakan 33,75 persen total populasi. Selain itu, ada lebih dari tujuh juta orang pengangguran dan lebih dari sepuluh juta orang dengan status semipengangguran dalam populasi. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah memproyeksikan kenaikan populasi hingga 297 juta pada 2040, di mana 64 persen di antaranya adalah usia produktif (Adiningsih et al, 2019). Maka jelas bahwa segmen masyarakat ini adalah target utama pemain yang berusaha memperoleh pangsa pasar besar dalam ekonomi platform yang sedang merebak, di mana mobilitas dan transportasi memainkan peran signifikan.

Tulisan ini menjelaskan praktik-praktik kebersamaan atau kolektivitas baru dan pengorganisasian buruh dalam platform-platform digital utama Indonesia (Gojek dan Grab) di tengah kendali perusahaan platform yang makin besar atas buruh. Di dalamnya dibahas proses kerja berbasis algoritme dan perlawanannya oleh buruh dalam ekonomi platform yang sedang maju pesat. Pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan adalah bagaimana buruh berbasis aplikasi merespons dan melawan proses kerja berdasarkan algoritme dan bagaimana mereka mengorganisir diri untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul di tempat kerja. Ia juga menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi praktik membangun solidaritas; dan pelajaran apa yang didapatkan dari praktik-praktik kebersamaan baru para buruh. Penulis berargumen bahwa praktik kebersamaan pengemudi menawarkan wawasan menuju pengembangan strategi pengorganisasian yang baru bagi gerakan buruh.

Tulisan ini disusun dengan alur sebagai berikut. Diawali dengan pengantar, ia kemudian membahas tentang penggeseran paksa layanan transportasi konvensional oleh perusahaan platform. Setelah itu tulisan ini menyoroti proses kerja dan kondisi kerja dalam sektor transportasi berbasis aplikasi dan bagaimana para pengemudi melawan kendali algoritme atas buruh. Selanjutnya ia menelaah tiga model pengorganisasian pengemudi dan menganalisis praktik-praktik kebersamaan baru para pengemudi. Bagian terakhir memaparkan kesimpulan tentang beberapa pokok pikiran yang disajikan tulisan ini.³

³ Penelitian ini berfokus pada strategi-strategi pengorganisasian buruh/pengemudi dalam sektor transportasi berbasis aplikasi (baik layanan sepeda motor maupun mobil) di Indonesia. Saya menggunakan “pengemudi” dan “buruh” secara berganti-ganti di seluruh tulisan ini untuk mengacu pada mereka yang bekerja sebagai pengemudi dalam industri transportasi, termasuk transportasi berbasis aplikasi. Analisis saya berlandaskan data yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan semiterstruktur, serta kelompok diskusi terarah (KDT) dengan (1) para pengemudi transportasi konvensional (tradisional); (2) para pengemudi transportasi berbasis aplikasi; (3) serikat, asosiasi, dan komunitas pengemudi berbasis aplikasi; (4) wakil-wakil serikat; dan (5) para peneliti dan aktivis dari lembaga swadaya masyarakat. Semua wawancara dilaksanakan dalam dua putaran penelitian lapangan antara Oktober dan Desember 2019 serta Januari dan Februari 2020. Lokasi penelitian meliputi kota-kota yang merupakan pusat konsentrasi terbesar buruh transportasi berbasis aplikasi, yaitu Jakarta, Bekasi, Cikarang, Depok, dan Bogor; juga ibukota provinsi Banten, yaitu Serang, dan Jawa Barat, yaitu Bandung. Kota-kota ini mencakup lebih dari 50 persen total buruh transportasi berbasis aplikasi di negeri ini. Pemilihan pengemudi dan organisasi pengemudi untuk wawancara dan KDT mempertimbangkan aktivitas organisasi pengemudi yang aktif pada waktu penelitian ini dilakukan dan memperhitungkan jumlah signifikan para buruh pabrik di area-area industri yang mengambil pekerjaan sampingan sebagai pengemudi berbasis aplikasi. Seleksi ini berguna untuk memahami

PERGESERAN PAKSA LAYANAN TRANSPORTASI KONVENSIONAL OLEH PERUSAHAAN PLATFORM

Buruknya transportasi umum di Indonesia adalah salah satu masalah yang memicu naiknya penggunaan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Jumlah kendaraan di negeri ini meningkat berlipat-lipat dalam beberapa dekade terakhir, sementara umumnya jalan-jalannya tidak diperlebar sehingga arus lalu-lintas semakin padat, mengakibatkan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar yang terkenal parah. Penjualan sepeda motor dan kendaraan lain melejit hampir sepuluh kali lipat dalam hanya dua dekade, dari 13,2 juta unit pada 1995 menjadi 121,4 juta unit pada 2015 (Katadata, 2017).

Ojek, seperti yang diketahui, adalah taksi sepeda motor tak berizin yang beroperasi secara acak di banyak wilayah Indonesia, dari kota besar di mana kemacetan lalu lintas lazimnya menghambat bentuk-bentuk lain transportasi, hingga wilayah-wilayah pedesaan yang tidak terakses oleh kendaraan beroda empat. Sebagai wahana transportasi tak resmi, para pengemudi ojek yang bekerja mandiri tidak membutuhkan izin atau lisensi sehingga siapa pun bisa menjadi pengemudi ojek bahkan tanpa SIM (Kusno, 2016). Kusno (2016) juga memperlihatkan, ojek sudah menjadi simbol utama transportasi “swasta” kelas bawah dan mengisi celah dalam sistem transportasi umum yang buruk di negeri ini. Dalam studi-studi urban dan transportasi, jenis transportasi informal seperti ojek secara akademik dirujuk sebagai “transportasi lokal/tradisional” atau “*indigenous transport*” (Cervero, 2000).

Namun, sejak awal 2015 pengemudi ojek di Indonesia semakin banyak yang masuk ke dalam sistem daring dengan adanya layanan berbasis aplikasi, yang secara berangsur-angsur mengalahkan jumlah ojek yang sepenuhnya tradisional atau konvensional. Sejak itu, sektor pengangkutan penumpang ini menjadi bagian dari ekonomi digital. Dalam industri transportasi berbasis aplikasi di Indonesia, Gojek dan Grab

bagaimana serikat-serikat yang mapan merespons dan terhubung dengan isu-isu buruh berbasis aplikasi yang muncul, serta kebutuhan dalam dorongan mereka untuk berorganisasi. Saya mewawancarai total 44 pengemudi dan komunitas pengemudi (40 laki-laki dan 4 perempuan), 12 pengurus komunitas pengemudi (10 laki-laki dan 2 perempuan), 6 pengemudi transportasi konvensional (semua laki-laki); dan 8 aktivis serikat buruh (7 laki-laki dan 1 perempuan). Saya juga berdiskusi dengan 5 aktivis LSM (4 laki-laki dan 1 perempuan), dan 4 peneliti (3 laki-laki dan 1 perempuan).

adalah dua perusahaan teratas yang telah ada dalam bisnis ini selama hampir satu dekade. Gojek adalah perusahaan Indonesia yang didirikan pada 2010. Saat itu Gojek bermula dengan menawarkan layanan pemesanan taksi sepeda motor secara daring,⁴ yang kini disebut Go-Ride, dan kemudian memperluas cakupannya untuk menawarkan serangkaian layanan berbeda. Setelah meluncur pada Januari 2015, Gojek diunduh oleh 10 juta pengguna pada masa itu, yang kemudian naik menjadi 35 juta pengguna pada awal 2017 (Ford dan Honan, 2017). Di Indonesia saja, ada lebih dari 2,5 juta pengemudi yang aktif bekerja untuk Gojek pada 2019, yang menyediakan layanan di lebih dari 167 kota dan kabupaten (Adiningsih et al, 2019). Gojek juga beroperasi di Vietnam, Thailand, Singapura, dan Filipina.

Pemain kedua terbesar, Grab, adalah perusahaan asal Singapura yang berdiri di Malaysia pada 2012. Grab memasuki pasar Indonesia saat meluncurkan layanan GrabTaxi di Jakarta pada Juni 2014, diikuti GrabBike dan GrabCar pada 2015 (Ford dan Honan, 2017). Jumlah pengemudi GrabBike dan GrabCar lalu melampaui 2 juta ketika perusahaan ini mengakuisisi operasi Uber di Indonesia pada awal 2018. Pada 2019, Grab mempekerjakan lebih dari 9 juta pengemudi di seluruh Asia Tenggara, menawarkan 14 jenis layanan digital yang berbeda (Jayani, 2019). Baik Gojek maupun Grab adalah raksasa layanan transportasi *online* di Asia Tenggara dan terus-menerus berekspansi ke dalam layanan-layanan digital lainnya, termasuk layanan pengantaran makanan, barang-barang sehari-hari, dan logistik perkotaan.

Gojek dan Grab telah menyingkirkan banyak pesaing lain. Mereka telah bertarung satu sama lain untuk melihat siapa yang mampu memonopoli pasar. Mereka berupaya melakukan *merger* (Eloksari, 2020) tapi tidak berhasil karena akhirnya Gojek bergabung dengan salah satu raksasa *e-commerce* Indonesia, Tokopedia (Tani, 2021). Baik Gojek maupun Grab memperlihatkan hasrat yang mengakar untuk memonopoli pasar ekonomi digital dan memperlihatkan struktur anti persaingan. Salah satu alasannya adalah karena akuisisi besar-besaran kepemilikan metadata digital dapat menyediakan keuntungan kompetitif yang signifikan

⁴ Layanan pemesanan ojek online ini kemudian dikenal dengan sebutan “ojol” (ojek online).

bagi sebuah operator tunggal. Semakin besar jumlah interaksi yang terjadi melalui platform aplikasinya, semakin baik algoritme yang mengatur transaksi dan layanan dasarnya (Smorto, 2018), dan hal itu jelas akan mengendalikan para buruhnya. Kecenderungan yang mengarah pada monopoli ini, seperti praktik kapital dan investasi pada umumnya, telah memiliki sejumlah konsekuensi dan mendatangkan beberapa masalah.

Investasi modal ventura adalah motor utama di balik lahirnya perusahaan-perusahaan platform digital seperti Gojek dan Grab, yang mampu mengerahkan sumber daya besar dan secara agresif menawarkan layanan kepada konsumen. Satu taktik yang dikerahkan oleh perusahaan-perusahaan ini adalah perang harga dengan pesaingnya. Perusahaan transportasi berbasis aplikasi, yang semuanya dibekali lengkap dengan investasi finansial yang sangat besar, dapat mengadakan subsidi ongkos dan menawarkan harga jauh lebih murah kepada konsumen ketimbang pengemudi transportasi tradisional. Ketika sebuah alat transportasi berbasis aplikasi telah mengamankan posisi dominan di pasar, ia menjadi satu-satunya titik akses bagi pengemudi maupun penumpang. Ini jelas meningkatkan bahaya timpangnya daya tawar, di mana perusahaan-perusahaan transportasi berbasis aplikasi lebih berkuasa atas buruhnya. Dalam jangka panjang, konsumen berisiko menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi dan buruh berisiko mengalami eksploitasi karena masyarakat mengalami ketergantungan pada layanan transportasi berbasis aplikasi.

Layanan transportasi berbasis aplikasi di Jakarta kini telah unggul dan lebih murah daripada yang lain. Juga, penelitian mengindikasikan bahwa pengguna kereta komuter di Jakarta semakin bergantung pada layanan transportasi berbasis aplikasi, dan penggunaan transportasi berbasis aplikasi melampaui proporsi transportasi umum (seperti Transjakarta, bus sedang dan angkutan kota) di banyak stasiun kereta komuter (Saffan dan Rizki, 2018). Di sisi lain, beberapa studi menemukan bahwa praktik bisnis transportasi berbasis aplikasi belum mengurangi jumlah pemilik kendaraan bermotor dan jumlah perjalanan yang dilakukan, bahkan jumlah kilometer perjalanan kendaraan malah meningkat karena ketersediaan layanan yang murah dan mudah diakses ini. Singkatnya, perusahaan-perusahaan platform digital seperti Gojek

dan Grab mencapai dominasi dan sukses komersial dengan mengorbankan buruh dan lingkungan (Davidson dan Infranca, 2018; Nastiti, 2017; Retamal dan Dominish, 2017; Saffan dan Rizki, 2018). Keduanya bahkan berpotensi mengorbankan konsumen. Ini, pada gilirannya, berpotensi mempengaruhi kemampuan kota secara negatif dalam penyediaan layanan transportasi umum yang esensial.

Di balik popularitas Gojek dan Grab saat ini adalah sejarah bentrokan antara pengemudi tradisional dan berbasis aplikasi. Peristiwa ini merupakan hasil pertentangan tajam antara perusahaan transportasi tradisional dan layanan transportasi berbasis aplikasi yang berujung pada unjuk rasa dan kekerasan (Ford dan Honan, 2019; Panimbang et al, 2020). Memang, layanan transportasi berbasis aplikasi aktif bekerja untuk menggeser sektor tradisional dengan cara aktif merekrut pengemudi transportasi tradisional. Benturan antara pengemudi di berbagai kota telah menjadi judul berita di koran-koran dan menimbulkan kontroversi dalam perdebatan publik. Pemerintah tidak tegas dan lamban merespons unjuk rasa dan konflik para pengemudi. Antara akhir 2015 dan awal 2016, pemerintah menerbitkan larangan terhadap transportasi berbasis aplikasi, yang kemudian ditarik kembali menyusul unjuk rasa oleh pengemudi-pengemudi berbasis aplikasi (Makki, 2015).

Saat konflik-konflik horizontal ini mereda, perusahaan-perusahaan platform mulai merekrut ribuan pengemudi baru lagi, memperdalam konflik horizontal yang tak terpecahkan. Gojek, misalnya, bergerak untuk merekrut pengemudi transportasi tradisional pada Agustus 2015 hingga menampung pendaftaran puluhan ribu orang dan mengubah mereka menjadi pengemudi Gojek. Pada waktu itu, Gojek merekrut ribuan pengemudi per hari (Aulia, 2015). Perusahaan-perusahaan mempekerjakan pengemudi hingga yang berusia 55 tahun. Pengemudi harus memiliki kendaraan mereka sendiri tapi awalnya akan menerima pelatihan dasar, keterampilan, orientasi, dua helm, sebuah jaket, dan sebuah telepon genggam yang harus dibayar lewat cicilan—sekian jumlah harian didebit dari dompet digital pengemudi di dalam aplikasi setiap hari (Kelompok Diskusi Terarah [KDT] dengan organisasi pengemudi, 29 Oktober 2019; lihat juga Ford dan Honan, 2017).

Perusahaan-perusahaan transportasi berbasis aplikasi bersaing satu sama lain untuk merekrut pengemudi, menyediakan insentif untuk bermigrasi dari perusahaan pesaing, dan bahkan menawarkan insentif jauh lebih banyak kepada broker yang dapat meyakinkan sebanyak pengemudi yang ia bisa untuk bermigrasi ke platformnya. Persaingan merekrut pengemudi ini khususnya tampak jelas dalam hal layanan taksi sepeda motor (Para pengemudi berbasis aplikasi, wawancara, 19 November 2019). Belakangan ini, ada lebih banyak pengemudi transportasi tradisional yang bergabung dengan sektor transportasi berbasis aplikasi, khususnya sejak perusahaan terus menyasar mereka secara spesifik dalam rekrutmen. Mereka harus menghadapi persyaratan saat berusaha bergabung dengan platform-platform ini, dan perusahaan-perusahaan membuat persyaratan semakin mudah bagi pengemudi ojek pangkalan (*opang*)⁵ mana pun. Di daerah-daerah yang telah mengalami konflik horizontal tinggi, yang populer sebagai “zona merah”, perusahaan-perusahaan ini menggantikan biaya “kartu opang” pengemudi dan membantu mereka mendapatkan SIM, BPKB, dll. Singkatnya, para pengemudi opang “zona merah” disambut hangat oleh perusahaan platform ke dalam bisnis mereka (Bekas pengemudi *opang*, wawancara, 28 Oktober 2019).

PROSES KERJA DAN KONDISI KERJA DALAM TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI

Studi-studi terhadap kendali kerja berbasis algoritme dalam perekonomian digital menganalisis bagaimana perusahaan-perusahaan berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab memanfaatkan kendali yang signifikan terhadap bagaimana buruh berperilaku selama bekerja (Gandini, 2019; Nastiti, 2017; Rosenblat, 2018). Menggunakan teori proses kerja, Gandini (2019) menganalisis kendali buruh dalam ekonomi *gig* dan berargumen bahwa transformasi kuasa buruh menjadi komoditas kini termediasi oleh platform digital, di mana umpan balik, peringkat, dan sistem penilaian (*rating*) melayani tujuan manajerialisasi dan pemantauan buruh. Rosenblat (2018) juga menganalisis bagaimana Uber menggunakan algoritmenya untuk mengendalikan buruh: alih-

⁵ Opang atau ojek pangkalan adalah layanan ojek konvensional di mana para pengemudinya menunggu calon penumpang di suatu tempat, yang kemudian tempat tersebut dikenal dengan sebutan pangkalan.

alih memantau ratusan ribu buruhnya dengan penyelia manusia, Uber menciptakan sistem transportasi berbasis aplikasi dengan seperangkat algoritme yang bertindak sebagai “manajer otomatis” virtual. Kendali kerja algoritmik ini dikembangkan oleh Uber di Silicon Valley AS tapi dengan cepat ditirukan oleh perusahaan-perusahaan lain seperti Gojek dan Grab di Asia Tenggara dan tempat-tempat lain yang menggunakan sistem sama dalam kendali kerja algoritmik semacam itu (Nastiti, 2017). Saya akan mengelaborasi lebih jauh, para pengemudi berbasis aplikasi di Indonesia melawan kendali kerja algoritmik ini dengan, di antaranya, menghasilkan *bug* algoritmik dan eror pada telepon pintar mereka.

Proses kerja dan kendali atas buruh dilandaskan pada analisis algoritme. Begitu para pengemudi mengaktifkan aplikasi, mereka terus-menerus dipantau dan dianalisis. Nastiti (2017) secara cermat mengidentifikasi metode-metode kendali buruh oleh manajemen algoritme dalam kasus Gojek. Metode-metode ini mencakup mekanisme untuk memperoleh poin, bonus, peringkat, dan pemberhentian sementara atau deaktivasi. Metode-metode ini merupakan imbalan dan sanksi: pengemudi mendapatkan bonus jika mereka dapat mengumpulkan banyak poin, tapi dihukum jika diketahui gagal. Meski demikian, secara tidak proporsional, disinsentifnya jauh lebih besar daripada insentifnya. Sistem ini berjalan sebagai strategi lain untuk mengevaluasi pengemudi. Jika rata-rata nilai mereka jauh di bawah empat bintang, para pengemudi secara otomatis diberhentikan sementara. Mereka juga diberhentikan sementara jika menolak pesanan.

Tidak banyak pengemudi paham apa algoritme dan bagaimana ia bekerja, tapi sebagian besar paham bahwa kinerja mereka dikendalikan dan dipantau oleh aplikasi. Mereka tahu bahwa aplikasi di dalam telepon pintar itu mengendalikan perilaku mereka dalam merespons pesanan. Algoritme terkadang mengistimewakan para pengemudi yang masih berhutang kepada perusahaan; mereka yang masih harus melunasi cicilan jaket dan helm yang dipotong dari akun pengemudi setiap hari. Para pengemudi ini menerima pemberitahuan tentang lokasi tempat penumpang memesan jasa pengangkutan. Pemberitahuan itu tidak lagi ada begitu cicilan telah selesai (Asosiasi pengemudi, KDT, 26 Januari 2020).

Pengemudi tahu bahwa mereka ada pada posisi yang rentan dan diharuskan selalu menerima nilai “bintang lima” serta komentar positif dari konsumen. Satu komentar buruk dari konsumen dapat merusak keseluruhan kinerja bagus selama sebulan atau dua bulan terakhir, membuat para pengemudi harus terus bergerak dan mencari penumpang secara proaktif. Ketika sebuah pesanan masuk, mereka tidak bisa dengan mudahnya menolaknya. Sistem aplikasi yang dikelola oleh algoritme ini memaksa pengemudi untuk tetap aktif dan mencari pesanan. Jika tidak, mereka berisiko dideaktivasi dari aplikasi atau diberhentikan sementara akunnya (Para pengemudi, KDT, 29 Oktober dan 21 Desember 2019). Bentuk proses kerja dan kendali kerja ini menghadirkan konsekuensi negatif, yang meliputi naiknya jumlah kecelakaan di jalanan seperti di Cikarang, salah satu area industri paling sibuk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di area ini setidaknya ada lima kecelakaan lalu lintas dan kematian yang melibatkan para pengemudi berbasis aplikasi yang terjadi setiap bulan (Asosiasi pengemudi, KDT, 26 Januari 2020). Terlepas dari fakta ini, perusahaan tidak memberikan bantuan dalam kecelakaan kerja dan kematian di jalan. Asuransi untuk kecelakaan disediakan baru beberapa tahun terakhir sebagai tanggapan terhadap permintaan pengemudi. Namun, para pengemudi harus membayar sendiri premi asuransi tersebut. Gojek menggunakan skema asuransi pemerintah (*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial—BPJS*) sedangkan Grab menyediakan asuransi swasta dengan penggantian maksimal Rp25 juta. Indonesia termasuk sembilan negara Asia yang bertanggung jawab atas sekitar setengah juta kematian akibat kecelakaan per tahun, kontributor besar terhadap pertumbuhan kecelakaan lalu lintas global (Jiang dan Zhang, 2018). Kecelakaan dan kematian di jalanan di kota-kota Indonesia meningkat dan termasuk yang tertinggi di antara negeri-negeri ASEAN, dan kecelakaan lalu lintas sepeda motor adalah penyumbang utama pada tingkat kecelakaan ini (Antara, 2017; Dananjaya, 2019).

Konsekuensi-konsekuensi negatif lainnya yang didatangkan oleh kendali kerja algoritmik pada platform digital adalah naiknya jumlah penyakit akibat kerja. Penyakit ini antara lain terkait paru-paru dan pernapasan, ambeien, sakit punggung, dan penyakit terkait kelelahan yang berujung pada isu-isu kesehatan lainnya. Area-area tertentu yang

berpolusi jelas berkontribusi pada penyakit-penyakit paru-paru dan pernapasan serius yang diderita sebagian pengemudi, yang seharusnya dipertimbangkan saat membatasi jam kerja pengemudi. Para organisator buruh dari sebuah serikat buruh sektor manufaktur di Bekasi, Jawa Barat, prihatin bahwa setidaknya 30 persen anggota serikat mereka mengambil pekerjaan sampingan sebagai pengemudi berbasis aplikasi. Salah satu anggota serikat meninggal pada awal 2019, satu tahun setelah orang ini bergabung dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Telah diamati oleh banyak temannya bahwa ia berjuang untuk mengemudi berjam-jam dan mengonsumsi suplemen makanan untuk tetap terjaga dan kuat demi memperoleh poin, bonus, dan akhirnya pemasukan tambahan (Para pemimpin serikat, wawancara, 27 Oktober 2019). Ia mendapatkan kebebasan dan keluwesan bekerja untuk platform digital, tapi manajemen algoritme yang mendorongnya bekerja selama jam-jam lebih panjang dan membuat kinerjanya tinggi bisa jadi merupakan penyebab kematiannya. Para pengemudi berbasis aplikasi seperti dirinya hanya salah satu dari mereka yang dalam ekonomi *gig* beradaptasi untuk bekerja bagi para boss dan majikan yang tak berwujud.

Lebih jauh lagi, data pengemudi yang dikumpulkan dari algoritme juga digunakan untuk mengendalikan harga dan tarif (*rate*) sekaligus memonitor perilaku pengemudi dalam konteks di tempat kerja. Seiring perusahaan terus meluaskan layanan, potongan tarif dan harga promosi untuk penumpang diiklankan dalam skala masif. “Kampanye penjualan” berharga rendah mengorbankan pengemudi yang tarifnya dipotong dari waktu ke waktu (Nastiti, 2017). Tidak ada peluang bagi pengemudi untuk menegosiasikan biaya dan tarif dengan perusahaan, yang terus-menerus mengumumkan tarif berbeda dan mengubah kebijakan lewat pesan pendek atau melalui aplikasi yang dikirim secara sepihak kepada pengemudi. Untuk memiliki kendali penuh atas pengemudi, perusahaan transportasi berbasis aplikasi mempekerjakan lebih banyak lagi pengemudi dengan jumlah melebihi yang dibutuhkan, yang secara bertahap telah meningkatkan kompetisi di antara pengemudi dan melemahkan daya tawar mereka. Di sisi lain, sejak Desember 2019 algoritme aplikasi baru menugaskan hanya satu pengemudi untuk menjalankan dua pesanan pengantaran makanan dalam sekali jalan, di

mana pengemudi dibayar dengan tarif jauh lebih rendah untuk pesanan kedua alih-alih menerima dua pembayaran (KDT dengan anggota komunitas, 26 Januari 2020).

Praktik-praktik algoritme ini mencerminkan bagaimana teknologi terus-menerus mengubah tidak hanya cara kita mendefinisikan kerja tetapi juga bagaimana hal itu diatur dan digunakan untuk mengendalikan dan memantau buruh. Saat ini, perusahaan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab berhasil menghadirkan dunia algoritme ke dalam konteks ketenagakerjaan, dengan sekumpulan implikasi terhadap cara bagaimana buruh diperlakukan dan dilindungi. Sementara regulator dan legislator masih lamban bergerak untuk mengejar situasi, perusahaan-perusahaan transportasi berbasis aplikasi dengan cepat menggunakan algoritme yang digerakkan data untuk mengubah norma-norma ketenagakerjaan dan menyusun ulang peraturan kerja (Gandini, 2019; Nastiti, 2017; Rosenblat, 2018).

PERLAWANAN BURUH TERHADAP ALGORITME

Gagasan tentang perlawanan dan mogok kerja dalam tradisi Marxis telah menjadi alat yang paling ampuh untuk merefleksikan tentang cara-cara melawan kapitalisme. Dengan gagasan tentang mogok kerja, Marx ingin menghadirkan perubahan epistemologis dalam kelas buruh, “sehingga mereka akan tahu bahwa bersama-sama mereka adalah ‘agen produksi’ dan bahwa jika mereka berhenti maka produksi pun berhenti” (Spivak, 2014). Model-model pemogokan buruh yang berbeda-beda telah dipraktikkan dan disesuaikan dengan teritori di seluruh dunia dari asalnya di Eropa Barat. Telah ada perdebatan tentang bagaimana kelas buruh hari ini merespons perubahan mutakhir perkembangan kapitalis (Spivak, 2014). Bagian ini membahas tentang repertoar kolektif para buruh yang memberikan landasan penting bagi mobilisasi para pengemudi, dan resistensi algoritmik mereka dengan cara mengacaukan algoritme perusahaan.

Repertoar Kolektif

Di Indonesia, mengendarai kendaraan dalam pawai untuk demonstrasi di jalanan menjadi bagian dari repertoar kolektif buruh. Ini menjadi salah satu bentuk artikulasi politik buruh yang signifikan. Seba-

gai elemen “pengangkutan politik” (*political trafficking*) dalam unjuk rasa buruh, sepeda motor digunakan untuk mengorganisir dan memobilisasi buruh dalam setiap demonstrasi Hari Buruh. Khususnya, sepeda motor merupakan kendaraan yang sangat penting bagi buruh dalam *grebek pabrik*, yang terjadi di jantung industri Indonesia, Bekasi, Jawa Barat, selama periode lebih dari enam bulan sejak Mei hingga Oktober 2012 (Mufakhir, 2014). Pawai sepeda motor buruh, yang dijalankan sebagai unjuk rasa politik di beberapa kawasan industri, menjadi pemandangan sehari-hari antara 2011 dan 2013, dan mobilisasi seperti ini dianggap sebagai strategi yang efektif. Pada waktu itu, para buruh menuntut agar praktik ketenagakerjaan tidak sah yang digunakan secara luas, yaitu subkontrak/*outsourcing*, segera diakhiri. Mobilisasi buruh selama grebek pabrik mencakup mogok di tempat di pabrik-pabrik, pendudukan pabrik, pemantauan *ad hoc* atas kepatuhan terhadap regulasi, dan pemeriksaan situs di dalam pabrik sembari membangun solidaritas buruh di seluruh pabrik di zona-zona industri. Gerakan tersebut jelas memerlukan mobilitas tinggi di kalangan para organisator buruh, yang mendapatkan jalan keluar lewat sepeda motor mereka. Pawai sepeda motor buruh biasanya diiringi dengan satu atau dua mobil komando yang dilengkapi dengan pelantang suara, memutar lagu-lagu militan di sela-sela instruksi dan pidato oleh para pemimpin unjuk rasa.⁶

Repertoar aksi kolektif ini menyediakan landasan penting bagi pengerahan unjuk rasa pengemudi belakangan ini. Para pengemudi telah melakukan unjuk rasa dengan mengafirmasi ulang tuntutan politik para buruh: mereka mengemudikan sepeda motor dan mobil dalam jumlah masif, berdemonstrasi di pusat-pusat kekuasaan di dekat istana negara, gedung perwakilan rakyat, kantor-kantor pemerintahan, perusahaan transportasi berbasis aplikasi, dan beberapa penanda kota untuk menyuarakan aspirasi. Walaupun kapasitas mobilisasi pengemudi dan cara mereka mengorganisir unjuk rasa masih memperlihatkan kekurangan dan tambal-sulam dibandingkan dengan para buruh industri, dengan suatu cara mereka mencerminkan “pengangkutan politik” yang

⁶ Untuk pembahasan lebih mendalam tentang pentingnya unjuk rasa buruh berbasis jalanan di Indonesia, lihat Juliawan (2011), Caraway dan Ford (2020), dan Panimbang dan Mufakhir (2018).

biasa mencirikan unjuk rasa buruh dengan menggunakan kendaraan, khususnya sepeda motor.

Perlawanan Algoritme para Pengemudi

Banyak buruh dalam transportasi berbasis aplikasi paham bahwa kuasa adalah konsep relasional, artinya kemampuan untuk mewujudkan kepentingan mereka sebagian bisa bergantung pada kapasitas mereka untuk menandingi kuasa para pemberi kerja. Pada mulanya, ketika perusahaan-perusahaan platform perlu merekrut pengemudi, kuasa struktural pengemudi relatif kuat. Para pengemudi sebagai suatu kolektif ada di posisi titik strategis dalam proses distribusi atau produksi keseluruhan bisnis transportasi sehingga mereka punya kuasa struktural tertentu di dalam perusahaan. Namun, kuasa struktural ini sebaiknya dilancarkan secara kolektif (Luce, 2014), sebagaimana terjadi di banyak kawasan industri selama unjuk rasa buruh sejak 1998 dan aksi-aksi kolektif selanjutnya, yang meliputi unjuk rasa umum bersejarah pada 2012-2013 (Caraway dan Ford, 2020; Juliawan, 2011; Mufakhir, 2014; Mufakhir, 2017; Panimbang dan Mufakhir, 2018).

Para pengemudi semakin menyadari bahwa “bulan madu” sudah lewat; tidak ada lagi bonus dan uang yang mudah mereka dapatkan dari perusahaan platform. Banyak yang telah mengalami pemberhentian sementara tanpa alasan. Para pengemudi tidak mendapat pesanan selama seharian atau seminggu penuh. Mereka mengamati bahwa pesanan diberikan kepada pengemudi yang baru direkrut. Kompetisi antara para pengemudi berbasis aplikasi untuk menerima pesanan telah dimulai dan mereka berharap jangan sampai ujungnya adalah konflik horizontal. Sebagai sebuah kolektif, para pengemudi tahu bahwa mereka dapat melakukan “*off bid*” secara bersama-sama (mematikan aplikasi) untuk mendisrupsi produksi atau transaksi. Hingga taraf tertentu, ada repertoar kolektif yang menstimulasi para pengemudi dalam mobilisasi dan protes akhir-akhir ini (Panimbang et al, 2020). Namun, itulah persisnya tujuan perluasan rekrutmen pengemudi oleh perusahaan: pasokan berlebih pengemudi akan melemahkan daya tawar mereka dan pada akhirnya menghindarkan kemungkinan disrupsi struktural oleh para buruh.

Banyak pengemudi tidak mematuhi kendali yang eksploitatif dan aturan algoritme dengan menggunakan *bug* “GPS palsu” (yang populer dengan sebutan *tuyul*)⁷ untuk menyasati sistem alur kerja. Metode ini memungkinkan seorang pengemudi terlihat lebih dekat dengan calon penumpang pada peta aplikasi di lokasi yang diinginkan sehingga ia dapat menerima pesanan dari konsumen tanpa harus berupaya mendekatinya, walaupun pada kenyataannya ia bisa saja beristirahat di lokasi lain (seperti rumah, jika tidak terlalu jauh atau di sekretariat komunitas untuk mencatu telepon pintar). Para pengemudi mengklaim ini tidak salah karena pemesanan dan perjalanannya sungguhan, dan pesanan perjalanan diselesaikan secara normal.

Dengan adanya kendali yang semakin meluas dan anonim oleh algoritme, pengemudi juga menerapkan berbagai taktik perlawanan untuk meningkatkan pemasukan subsisten mereka. Alih-alih melancarkan bentuk-bentuk protes kolektif yang lebih terbuka terhadap perusahaan berbasis aplikasi, para pengemudi memanfaatkan celah-celah di dalam aplikasi. Taktik-taktik ini mencakup negosiasi dengan konsumen tentang pesanan. Misalnya, pengemudi meminta kepada konsumen untuk membatalkan sebuah pesanan dari aplikasi, saat pada kenyataannya perjalanan tetap dilakukan dengan harga yang sama dengan yang tertera pada aplikasi. Ini artinya pengemudi menghemat 20 persen—jumlah yang dikurangi dari pendapatannya.

Sebuah taktik lain melibatkan layanan antar makanan, di mana pengemudi memanfaatkan diskon harga dan promo yang tersedia. Misalnya, jika seorang konsumen memesan makanan dari Gofood (Gojek), ada tawaran khusus atau diskon yang tersedia untuk item yang sama di Grabfood (Grab), pengemudi menggunakan akun Grabnya untuk membeli item itu. Ini artinya diskon itu memberikan pemasukan tambahan bagi sang pengemudi, kadang-kadang hingga 50 persen harga. Jenis-jenis taktik ini secara rutin dibagikan dan didiskusikan oleh komunitas pengemudi, begitu juga taktik dan strategi lain (Komunitas

⁷ Kata *tuyul* digunakan oleh para pengemudi untuk menyebutkan sistem penentuan posisi (GPS) yang titik posisinya dimanipulasi. Secara harfiah, *tuyul* berarti makhluk mitos yang memperoleh kekayaan untuk tuannya (manusia). *Tuyul* ini merupakan roh mistis dalam mitologi Melayu di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura.

pengemudi, wawancara, 31 Oktober 2019). Cara perlawanan sehari-hari ini jelas memperlihatkan bahwa pengemudi secara teratur berupaya menyiasati para majikan mereka yang tak berwujud.

Salah satu tipe perlawanan algoritme yang paling menarik terhadap majikan tanpa wujud (algoritme) adalah pemanfaatan beberapa komunitas pengemudi yang memiliki kapasitas dan keterampilan dalam teknologi digital. Kelompok pengemudi ini dikenal sebagai “IT jalanan”, programer jalanan. Istilah programer jalanan setara dengan aktivisme “buku dan perpustakaan jalanan” yang dipopulerkan oleh aktivis di beberapa kota yang diawali di Bandung, Jawa Barat. Nantinya ini menyebar ke kawasan Jabodetabek dan tempat-tempat lain dalam upaya menumbuhkan semangat perlawanan kaum muda terhadap ketidakadilan sosial. Programer jalanan atau IT jalanan ini adalah orang-orang otodidak yang sebagian merupakan anggota serikat buruh di pabrik-pabrik manufaktur.

Karena mereka bekerja dengan cara-cara tersembunyi, komunitas programer jalanan di beberapa kota kebanyakan bekerja dan mengoordinasikan upaya dengan berbasis web atau daring. Mereka membagikan informasi baru dan trik-trik sehubungan dengan versi-versi baru aplikasi dari perusahaan platform. Tujuan utama mereka adalah menciptakan *bug* algoritme di dalam aplikasi pengemudi untuk mengelabui algoritme. Ini terutama ditujukan untuk mengurangi beban kerja pengemudi yang dibebankan pada pengemudi oleh algoritme. Programer jalanan berargumen bahwa proses kerja dan kendali kerja yang berasal dari sistem penilaian dan peringkat telah memaksa pengemudi untuk bekerja sangat keras selama jam-jam yang lebih panjang. Mereka menantang dan melawan tekanan algoritme ini dengan membantu sesama pengemudi memodifikasi dan mengutak-atik algoritme aplikasi. Menariknya, kelompok programer jalanan mempersepsikan perlawanan mereka sebagai bagian dari perjuangan kelas melawan keserakahan korporat (KDT dengan para pemimpin komunitas pengemudi, 2 November 2019). Sementara algoritme berupaya memaksimalkan jumlah kerja yang diekstrak dari pengemudi, sebuah aplikasi tambahan digunakan untuk mengurangi penggunaan kuasa kerja mereka. Para pengemudi secara konsisten berupaya untuk diam-diam menyiasati aturan yang ada di

balik penilaian kontrol manajerial tanpa wujud, dan dengan demikian menegaskan kontrol mereka sendiri menggunakan kuasa kerja mereka.

Komunitas programer jalanan mengingatkan kita akan Luddisme dalam situasi industri di Inggris abad ke-19 di mana para buruh menghancurkan mesin-mesin tekstil sebagai bentuk protes. Luddisme bukan semata-mata oposisi terhadap mesin-mesin baru dan teknologi, melainkan seperangkat politik gerakan buruh yang konkret terhadap kapital. Hal itu menginspirasi perjuangan buruh di titik produksi, yang menekankan otonomi buruh untuk memperbaiki kondisi kerja. Seperti kaum Luddite, para programer jalanan melihat kemajuan teknologi dalam algoritme sebagai ancaman langsung dan mereka memiliki perspektif kritis akan teknologi yang memusatkan perhatian khusus pada hubungan teknologi dengan proses kerja dan kondisi kerja. Dengan kata lain, mereka memandang teknologi tidaklah netral tetapi sebagai arena perjuangan kelas. Teknologi adalah senjata kelas (kelas penguasa) terhadap buruh (Mueller, 2021).

PENGORGANISIRAN PENGEMUDI BERBASIS APLIKASI DAN PRAKTIK KOLEKTIVITAS BARU

Tidak banyak serikat pekerja mapan yang sudah ada saat ini, yang secara memadai merespons kebutuhan berorganisasi para pengemudi yang tidak terorganisir dalam sektor transportasi berbasis aplikasi yang baru lahir. Serikat-serikat buruh telah disibukkan oleh tantangan-tantangan tersendiri yang terus muncul, termasuk Omnibus Law yang merugikan, yaitu UU penciptaan kerja yang mempromosikan lebih banyak investasi dan bisnis, di satu sisi, dan mengurangi perlindungan hak buruh di sisi lain. Mengorganisir ranah baru ini dalam ekonomi *gig* telah menjadi prioritas bagi kebanyakan serikat buruh di Indonesia (KDT dengan para pengorganisir pengemudi, 21 Desember 2019). Bagian ini akan menganalisa tiga strategi pengorganisir pengemudi dan berpendapat bahwa praktik kebersamaan atau kolektivitas di antara pengemudi, terutama yang tergabung dalam komunitas pengemudi, memberikan wawasan tentang pengembangan strategi baru untuk membangun solidaritas buruh dalam gerakan buruh yang lebih luas.

Tiga Strategi Pengorganisasian

Secara umum, seperti yang diperlihatkan Ford dan Honan (2019), saat ini ada tiga strategi pengorganisasian: model komunitas, asosiasi, dan serikat (lihat juga Panimbang et al, 2020). Model pengorganisasian pertama dilandaskan pada komunitas pengemudi dan inilah yang paling populer di kalangan pengemudi berbasis aplikasi. Komunitas-komunitas pengemudi ini kecil, tidak formal, dan berjalan secara luwes. Mereka beroperasi di tingkat akar rumput, dengan keanggotaan yang kebanyakan berasal dari lingkungan sekitar. Strategi pengorganisasian komunitas pengemudi kebanyakan bersifat *ad hoc*, berfokus pada saling dukung dalam menghadapi masalah tempat kerja dan isu-isu seperti pemberhentian sementara akun pengemudi, selain berbagi gagasan untuk taktik baru dalam memperoleh pemasukan lebih tinggi. Banyak komunitas pengemudi menyediakan layanan sosial dan lebih penting lagi menangani isu-isu selain pekerjaan dan kedaruratan seperti menyediakan dukungan bila pengemudi atau anggota keluarganya sakit.

Tidak ada data resmi atas jumlah komunitas pengemudi yang ada, tapi diperkirakan bahwa lebih dari 5.000 komunitas telah didirikan di Jabodetabek saja, dengan masing-masing komunitas memiliki antara 10 hingga 100 anggota atau bahkan lebih (Peneliti dan para pemimpin asosiasi pengemudi, wawancara, 26 Januari 2020). Sebuah survei yang dilaksanakan pada 2018 menemukan bahwa jumlah pengemudi berbasis aplikasi di beberapa kota besar yang telah bergabung dengan komunitas tidak lebih dari 27 persen (Instran, 2018). Hal ini memperlihatkan bahwa ada lebih banyak lagi pengemudi yang belum berorganisasi. Sebagian komunitas pengemudi terafiliasi dengan asosiasi komunitas pengemudi, organisasi berskala lebih luas di tingkat kabupaten atau kota.

Model yang kedua adalah asosiasi pengemudi. Bentuk ini lebih luas daripada organisasi komunitas pengemudi, dengan anggota dari komunitas-komunitas berbeda tapi juga pengemudi individual. Banyak dari asosiasi pengemudi ini tidak formal dalam artian institusional dan beroperasi secara fleksibel, tapi sebagian terdaftar dengan status organisasional sosial/massal untuk beroperasi secara formal dan memiliki struktur organisasi yang lebih formal. Beberapa asosiasi besar memiliki struktur organisasi yang sedikit lebih kompleks, mencakup lebih banyak

lokasi di provinsi-provinsi berbeda, dan sebagian nasional. Sebagian dari asosiasi pengemudi ini, khususnya mereka yang memiliki akses pada otoritas seperti Kementerian Transportasi, mampu melibatkan diri dalam pengambilan keputusan tentang regulasi transportasi berbasis aplikasi. Baik komunitas pengemudi maupun asosiasi pengemudi adalah aktor-aktor paling aktif dalam mobilisasi-mobilisasi yang telah lalu dalam unjuk rasa menentang pemerintah dan perusahaan platform demi menuntut regulasi dan perlindungan hukum (Panimbang et al, 2020).

Model yang ketiga adalah serikat pengemudi berbasis aplikasi. Prakarsa untuk mendirikan serikat pengemudi datang terutama dari federasi serikat pabrik yang ada dalam sektor manufaktur, atau dari serikat transportasi dan buruh pelabuhan. Namun, prakarsa pengorganisasian ini untuk memasukkan pengemudi berbasis aplikasi ke dalam struktur serikat buruh yang ada menghadapi tantangan besar: serikat tidak populer di kalangan para pengemudi. Serikat-serikat pengemudi berbasis aplikasi relatif kecil dan kebanyakan tidak aktif, dan tidak ada satu pun serikat yang telah terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan belakangan ini yang dipimpin oleh Kementerian Perhubungan. Satu kemungkinan alasan mengapa serikat buruh tidak populer—sehingga kurang keanggotaannya—adalah struktur dan fungsi organisasionalnya, yang dipandang tidak fleksibel dan kaku, karena hal-hal ini diadopsi dari struktur serikat buruh tradisional terlepas dari sifat ekonomi platform yang secara mendasar berbeda. Misalnya, serikat buruh membentuk struktur serikat tingkat pabrik untuk Gojek dan Grab secara terpisah (serupa dengan struktur serikat tempat kerja atau pabrik) terlepas dari fakta bahwa pengemudi untuk kedua perusahaan itu tanpa terpisah berkumpul di pangkalan yang sama atau area-area pinggir jalan yang sama. Di bagian berikut, saya akan menganalisis bagaimana dua model yang pertama (komunitas dan asosiasi), tak seperti model serikat, dapat menghadirkan praktik kolektivitas yang baru di kalangan anggotanya.

Praktik Kebersamaan Baru di Kalangan Komunitas Pengemudi

Dengan mengusulkan istilah “praktik kebersamaan baru”, saya bertujuan untuk menyoroti aksi kolektivitas khusus di kalangan pe-

ngemudi berbasis aplikasi melalui interaksi spasial yang tidak secara luas dipraktikkan oleh serikat buruh mana pun di Indonesia. Fungsi dan struktur organisasional komunitas maupun asosiasi pengemudi sangatlah fleksibel dan lebih tidak formal sehingga mudah bagi pengemudi untuk berhubungan dan berjejaring dengan organisasi pengemudi yang berbeda di seluruh negeri. Sebuah faktor penting yang memungkinkan praktik baru kolektivitas ini adalah tipe kerja digitalnya. Komunikasi dan koordinasi antara anggota berlangsung secara konsisten lewat kanal komunikasi sekaligus pertemuan harian secara langsung di area-area istirahat pengemudi.

Salah satu pemain kunci dalam praktik kolektivitas baru ini adalah kelompok relawan pengemudi yang dikenal sebagai URC, atau Unit Reaksi Cepat. URC adalah gugus tugas pengemudi yang bergantian memberikan bantuan bilamana perlu, misalnya dalam kecelakaan lalu lintas. URC terdiri atas beberapa perwakilan, antara dua hingga empat anggota dari tiap komunitas pengemudi. URC ada di kebanyakan kota atau daerah di negeri ini. Kendati tim-tim URC beroperasi hanya di tingkat kota/kabupaten, mereka mudah untuk saling terhubung dalam skala besar dengan hampir setiap tim URC di seluruh negeri. Hubungan ini menggunakan platform komunikasi, khususnya platform *chat* yang paling populer dan bisa diakses seperti *WhatsApp*. Melalui aplikasi ini, para pengemudi bertukar informasi satu sama lain, dan sering berkontak dengan sesama buruh hampir sepanjang hari dan malam tanpa henti. Kontak terus-menerus ini perlu saat banyak pengemudi harus berhenti di area tertentu untuk mencatu telepon atau beristirahat setelah mengambil pesanan perjalanan jauh. Beberapa lainnya mungkin ingin agar lokasi mereka dipantau oleh anggota komunitas yang lain, berjaga-jaga akan situasi darurat atau kejahatan. Praktik saling dukung ini dipandang sangat membantu bagi para pengemudi (KDT dengan para pemimpin komunitas pengemudi, 5 Oktober 2019).

Sebuah praktik penting lainnya oleh organisasi pengemudi adalah membangun jejaring dan persekutuan. Dalam berjejaring, mereka menggunakan label dan emblem komunitas sebagai simbol jejaring dan jangkauan. Itu salah satu alasan mengapa mereka menekankan semangat kebersamaan dan solidaritas pada logo dan motto komunitas, yang

dicetak pada *banner*, emblem, dan stiker. Solidaritas dan kebersamaan adalah kata-kata paling populer yang tertulis pada nama-nama komunitas mereka. Stiker dan emblem ini saling ditukarkan dengan komunitas pengemudi lain saat saling berkunjung. Jumlah stiker dari berbagai komunitas menyimbolkan dan mendemonstrasikan kapasitas berjejaring sebuah komunitas; semakin banyak stiker yang mereka miliki pada *banner* atau dinding markas, semakin besar jaringan dan persahabatan yang telah mereka bangun. Dengan praktik berjejaring ini, komunitas/asosiasi pengemudi—termasuk kelompok pengemudi perempuan yang aktif berpartisipasi dalam acara-acara asosiasi seperti ulang tahun atau layanan sosial (Panimbang et al, 2020)—memainkan peran penting dalam konstruksi relasi sosial alternatif. Mereka menormalkan mobilitas dan gerak pengemudi, dan memandang setiap tempat sebagai ruang bersama. Lebih penting lagi, mereka memperlakukan sesama buruh/pengemudi lain di mana saja sebagai keluarga.

Misalnya, ketika seorang pengemudi dari sebuah komunitas di suatu daerah mengalami masalah atau kecelakaan di suatu tempat yang jauh, sebuah komunitas yang dekat dengan titik kecelakaan harus menyediakan bantuan. Ini akan dikomunikasikan lewat *WhatsApp* oleh para pemimpin komunitas. Semua pengemudi tampaknya mendukung sebuah prinsip diam-diam bersama: “bantu sesama pengemudi jika ingin diperlakukan sama”. Sebuah contoh praktik solidaritas yang lain di antara para buruh adalah saling bantu dalam kesulitan akibat pandemi Covid-19 saat aktivitas transportasi kebanyakan dihentikan: beberapa asosiasi pengemudi mengumpulkan donasi dari anggota mereka yang memiliki pekerjaan lain selain transportasi berbasis aplikasi untuk didistribusikan ke anggota-anggota lain yang bergantung semata-mata pada bisnis pengangkutan penumpang ini (Pemimpin asosiasi dan komunitas, wawancara, 22 Mei 2020). Solidaritas yang dipraktikkan tersebut, bersama kebersamaan dan ikatan persahabatan, sungguh-sungguh terjalin di kalangan pengemudi di banyak tempat.

Banyak komunitas yang mampu mengumpulkan iuran keanggotaan antara Rp 10.000–30.000 secara teratur (biasanya setiap bulan), yang digunakan untuk tujuan kolektif atau untuk mendukung anggota yang membutuhkan. Komunitas lainnya kadang-kadang hanya mengumpul-

kan uang dari anggota, terutama bila diperlukan untuk tujuan kolektif seperti memasang tenda di *basecamp* untuk memberi keteduhan atau untuk menutupi biaya listrik untuk mengisi daya ponsel mereka. Meskipun kapasitas ini kecil, namun memiliki potensi besar bagi komunitas pengemudi untuk dapat memobilisasi sumber daya mereka.

Perlu dicatat bahwa baik komunitas pengemudi maupun asosiasi menjadi target utama untuk mobilisasi pengemudi, dan mereka dipandang sebagai aktor strategis oleh otoritas negara dan perusahaan platform yang berkepentingan untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya gangguan oleh pengemudi. Beberapa komunitas dan asosiasi kunci, terutama tim URC, diawasi dengan ketat oleh polisi dan perusahaan platform, karena mereka memainkan peran penting dalam mobilisasi protes yang terjadi antara tahun 2015 dan 2018. Oleh karena itu, meskipun dengan beberapa batasan seperti yang disebutkan Ford dan Honan (2019), dari sudut pandang penulis justru komunitas dan asosiasi pengemudi adalah aktor potensial dalam pengorganisasian buruh platform. Mereka telah menunjukkan aksi kolektif dalam beberapa aksi protes, dan berhasil menjajaki strategi untuk memperbaiki kondisi kerja mereka seperti yang ditunjukkan oleh beberapa asosiasi yang telah terlibat dalam sejumlah diskusi tentang regulasi dengan Kementerian Perhubungan (Asosiasi pengemudi, wawancara, 6 Februari 2020).

Saya berpendapat bahwa praktik kebersamaan atau kolektivitas di antara pengemudi berbasis aplikasi adalah pelajaran berharga bagi serikat buruh yang sudah mapan di Indonesia dan di tempat lain, yang selama ini dibatasi oleh formalitas dan ketidakfleksibelan struktur organisasi mereka. Ini memberikan wawasan tentang pengembangan strategi baru untuk membangun solidaritas buruh dalam gerakan buruh yang lebih luas. Lebih jauh, gerakan buruh juga harus merefleksikan bagaimana mulai merangkul para buruh platform yang hak-haknya dirampas, dan memikirkan secara lebih sistematis bagaimana mengorganisir dengan lebih baik, karena pengemudi juga merupakan bagian dari kelas buruh yang terus-menerus direproduksi oleh sosial, proses politik dan ekonomi kapitalisme.

KESIMPULAN

Perubahan teknologi dan kebangkitan ekonomi platform di Indonesia dan dunia tidak lahir begitu saja. Hal ini justru merupakan hasil dari perkembangan sosio-politik dan ekonomi global, lebih tepatnya pengorganisasian ulang kuasa kapitalisme finansial global. Perekonomian platform digital baru ini secara mendasar khususnya digerakkan oleh dominasi modal ventura yang semakin besar, yang menawarkan bukti bahwa digitalisasi terutama didorong oleh kepentingan bisnis, bukan kebutuhan masyarakat.

Tulisan ini memperlihatkan bagaimana perlawanan pengemudi berbasis aplikasi dan IT jalanan di Indonesia terhadap algoritme mengingatkan kita akan Luddisme dalam situasi industri Inggris abad ke-19, di mana buruh menghancurkan peralatan dan mesin tekstil sebagai bentuk protes. Seperti kaum Luddite, programer jalanan melihat kemajuan teknologi dalam algoritme sebagai ancaman langsung dan mereka memiliki perspektif kritis terhadap teknologi yang memusatkan perhatian pada hubungan teknologi dengan proses kerja dan kondisi bekerja. Pengemudi berbasis aplikasi dan programer jalanan memandang teknologi bukan sebagai sesuatu yang netral melainkan ranah perjuangan kelas.

Tulisan ini memperlihatkan proses kerja dan kendali kerja dalam transportasi berbasis aplikasi di Indonesia, yang membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan platform ini mempengaruhi kontrol yang signifikan atas bagaimana buruh berperilaku dalam pekerjaan. Terhadap kontrol kerja algoritmik ini, sebagian pengemudi di Indonesia menantang perusahaan-perusahaan platform dengan menciptakan *bug* dan eror algoritme di dalam telepon pengemudi sebagai salah satu bentuk perlawanan mereka. Ada tiga model pengorganisasian yang terwujud: komunitas, asosiasi, dan serikat. Dua model pertama adalah yang paling populer dan menarik bagi buruh sehingga memiliki anggota lebih banyak dan mampu memobilisasi sumber daya. Tak seperti model serikat, komunitas maupun asosiasi pengemudi memiliki struktur organisasional yang tak formal, memungkinkan mereka mudah terhubung dengan organisasi pengemudi lain di seluruh negeri. Keduanya memperlihatkan praktik baru kolektivitas di kalangan pengemudi, yang merupakan pelajaran sangat berharga bagi serikat-serikat buruh yang ma-

pan. Komunitas dan asosiasi pengemudi memainkan peran signifikan dalam mengonstruksi relasi sosial alternatif. Keduanya menormalisasi mobilitas dan gerakan pengemudi di seluruh wilayah dan memandang setiap tempat sebagai ruang bersama.

Saya berargumen bahwa terlepas dari hambatan legal dan praktis, komunitas dan asosiasi pengemudi adalah agen-agen potensial dalam pengorganisasian buruh platform di masa depan yang telah membuktikan mampu menjalankan aksi kolektif dan mengeksplorasi strategi guna memperbaiki kondisi kerja mereka. Solidaritas yang dibangun secara aktual sekaligus praktik memberikan bantuan antarpengemudi yang jamak dilakukan telah menjadi sesuatu yang rutin terjadi dalam kebanyakan komunitas pengemudi. Hal ini jelas-jelas memperagakan potensi pengemudi yang besar. Tak pelak, ada tantangan-tantangan besar di depan dan salah satu yang paling penting adalah fakta bahwa mayoritas pengemudi berbasis aplikasi mengelirukan relasi ketenagakerjaan mereka dengan pengusaha ekonomi gig, sebagai buruh versus pemberi kerja, yang berhak atas serangkaian hak sebagaimana ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan. Mengenali hak-hak buruh ini, antara lain, adalah langkah pertama dalam membangun kuasa dan legitimasi lebih besar bagi aksi kolektif para pengemudi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S., Lokollo, E. M., Setiaji, S. N., Ardiansyah, S. R., Islam, M., & Rahmawaty, U. F. R. (2019). *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia: Lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi, dan kebijakan di Indonesia* [Digital-based economic transformation in Indonesia: The birth of new technological trend, business, economy, and policy in Indonesia]. Gramedia Pustaka Utama.
- Antara. (2017, November 15). Angka kecelakaan lalu lintas Indonesia termasuk tinggi di ASEAN [Indonesia's traffic accident is among the highest in ASEAN]. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1033993/angka-kecelakaan-lalu-lintas-indonesia-termasuk-tinggi-di-asean/full&view=ok>
- Aulia, M. (2015, Agustus 14). Go-Jek rekrut ribuan orang per hari [Go-Jek recruits thousands of drivers every day]. *Medcom.Id*.

<https://m.medcom.id/amp/aNro2gEb-go-jek-rekrut-ribuan-orang-per-hari>

- Caraway, T., & Ford, M. (2020). *Labor and politics in Indonesia* (Cambridge Studies in Contentious Politics). Cambridge University Press.
- Cervero, R. (2000). *Informal transport in the developing world*. United Nations Commission on Human Settlements.
- Dananjaya, D. (2019, September 9). Angka kecelakaan tahun 2019, truk dan sepeda motor sering terlibat [Figure on traffic fatalities in 2019: Truck and motorbikes are the most involved in road accidents]. *Kompas.com*. <https://otomotif.kompas.com/read/2019/09/09/160200815/angka-kecelakaan-tahun-2019-truk-dan-sepeda-motor-sering-terlibat>
- Davidson, N. M., & Infranca, J. (2018). The place of the sharing economy. Dlm. N. M. Davidson, M. Finck, & J. Infranca (Peny.), *The Cambridge handbook of the law of the sharing economy*. Cambridge University Press.
- Eloksari, E. A. (2020, Desember 9). Gojek, grab merger could spell start of antitrust investigation. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/paper/2020/12/08/gojek-grab-merger-could-spell-start-of-antitrust-investigation.html>
- Ford, M., & Honan, V. (2017). The Go-Jek effect. Dlm. E. Jurriëns & R. Tapsell (Peny.), *Digital Indonesia: Connectivity and divergence* (hal. 275–288). ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Ford, M., & Honan, V. (2019). The limits of mutual aid: Emerging forms of collectivity among app-based transport workers in Indonesia. *Journal of Industrial Relations*, 61(4), 528–548.
- Gandini, A. (2019). Labour process theory and the gig economy. *Human Relations*, 72(6), 1039–1056.
- Instran. (2018). Survei pengemudi angkutan online: Angkutan sewa khusus dan ojek online [Survey on app-based drivers in cars and motorbikes] [unpublished report].

- Jayani, D. H. (2019, November 16). Para penantang Gojek dan Grab di bisnis ojek online [Competitors of Go-Jek and Grab in the app-based transport market]. *Katadata*. <https://katadata.co.id/infografik/2019/11/16/para-penantang-gojek-dan-grab-di-bisnis-ojek-online>
- Jiang, Y., & Zhang, J. (2018). Road traffic safety in Asia: An analysis based on DPSIR + C framework. Dlm. J. Zhang & Z. Feng (Peny.), *Routledge handbook of transport in Asia* (hal. 63–93). Routledge.
- Juliawan, B. H. (2011). Street-level politics: Labour protest in post-authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 41(3), 349–370.
- Katadata. (2017, Maret 23). Berapa jumlah angkot yang terdaftar di Jabodetabek? [How many minivans registered in Jabodetabek?]. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/23/berapa-jumlah-angkot-yang-terdaftar-di-jabodetabek>
- Kusno, A. (2016). The order of messiness: Notes from an Indonesian city. In M. Chalana & J. Hou (Peny.), *Messy urbanism: Understanding the “other” cities of Asia* (hal. 40–60). Hong Kong University Press.
- Luce, S. (2014). *Labor movements: Global perspectives*. Polity Press.
- Makki, S. (2015, Desember 18). Larangan dicabut, Gojek dan GrabBike melenggang [Ban on app-based transport lifted, Go-Jek and GrabBike back to operate]. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151218154256-187-99172/larangan-dicabut-gojek-dan-grabbike-melenggang>
- Mueller, G. (2021). *Breaking things at work: The Luddites are right about why you hate your job*. Verso.
- Mufakhir, A. (2014). ‘Grebek pabrik’ in Bekasi: Research note on unions’ mobilisation strategy. Dlm. J. Suryomenggolo (Peny.), *Worker activism after Reformasi 1998: A new phase for Indonesian unions?* (hal. 93–114). Asia Monitor Resource Centre.
- Mufakhir, A. (2017). Alliances of labour unions as the backbone of general strikes in Indonesia. Dlm. F. Panimbang (Peny.),

Resistance on the continent of labour: Strategies and Initiatives of labour organizing in Asia (hal. 261–287). Asia Monitor Resource Centre.

- Nastiti, A. D. (2017). Worker unrest and contentious labor practice of ride-hailing services in Indonesia. Northwestern University.
- Panimbang, F., & Mufakhir, A. (2018). Labour strikes in post-authoritarian Indonesia, 1998–2013. Dlm. J. Nowak, M. Dutta, & P. Birke (Peny.), *Strikes and workers movements in the 21st century* (hal. 21–43). Rowman and Littlefield.
- Panimbang, F., Arifin, S., Riyadi, S., & Utami, D. S. (2020). *Resisting exploitation by algorithms: Drivers' contestation of app-based transport in Indonesia* (Trade Unions in Transformation 4.0). Friedrich Ebert Stiftung.
- Retamal, M., & Dominish, E. (2017). *The sharing economy in developing countries*. Institute for Sustainable Futures at the University of Technology Sydney (UTS) for Tearfund UK.
- Rosenblat, A. (2018). *Uberland: How algorithms are rewriting the rules of work*. University of California Press.
- Saffan, A. F., & Rizki, M. (2018). Exploring the role of online 'ojek' in public transport trips: Case of Jakarta metropolitan area rail users. IOP Conference Series: *Earth and Environmental Science*, 158, 1–17.
- Smorto, G. (2018). The protection of the weaker parties in the platform economy. Dlm. N. M. Davidson, J. J. Infranca, & M. Finck (Peny.), *The Cambridge handbook of the law of the sharing economy* (hal. 431–446). Cambridge University Press.
- Spivak, G. C. (2014). General Strike. *Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society*, 26(1), 9–14.
- Tani, S. (2021, Mei 17). Gojek and Tokopedia announce Indonesia's "largest ever" merger. *Nikkei Asia*. https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Gojek-and-Tokopedia-announce-Indonesia-s-largest-ever-merger?fbclid=IwAR0bLQ1_UzRQVN5N2PtLYG6he1Fbyd52ICt9NfmBC2UC-8R0Kfhn6rSbwrk

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya berterima kasih kepada Syarif Arifin, Sugeng Riyadi, Dina Septi Utami, Abu Mufakhir dan rekan-rekan LIPS lainnya atas ide dan kebersamaannya di lapangan selama penelitian, dan kepada para buruh yang kami temui atas dukungannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Andreas Bieler, Joerg Nowak, Michele Ford, Bambang Dahana, Hari Nugroho, Inaya Rakhmani dan para editor Jurnal Indoproggress atas komentar mereka yang konstruktif. Terima kasih khusus saya kepada Melisa Serrano, Thomas Greven dan Mirko Herberg untuk diskusi tentang proyek penelitian FES ini di bawah program 'Serikat Buruh dalam Transformasi 4.0'. Setiap kesalahan yang ditemukan dalam tulisan ini tetap sepenuhnya tanggung jawab saya.

Catatan

PANDEMI, KESEHATAN PUBLIK, DAN PEKERJA SANITASI DI MUMBAI: KRISIS PEKERJAAN DAN KEHIDUPAN

Mouleshri Vyas dan Manish¹

ABSTRAK

Satu abad setelah flu Spanyol tahun 1918, COVID-19 telah menempatkan kesehatan dan penyakit serta kesehatan publik kembali menjadi pusat perhatian. Artikel ini memahami dampak COVID-19 terhadap pekerja sanitasi di Mumbai, atau ‘prajurit garis depan’ – semuanya kaum Dalit, komunitas berbasis kasta paling terpinggirkan di India. Artikel ini menekankan hubungan antara pekerja ini dengan Negara sejak era kolonial hingga sekarang. Dengan menggunakan ekonomi politik ‘ruang’ David Harvey dan biopolitik dan teknologi Michel Foucault, para penulis menjelaskan interaksi antara Negara, pekerja sanitasi, dan sampah yang mereka tangani. Kontrol dijalankan Negara atas migran sebagai penduduk dan pekerja, melalui empat ruang—kebijakan, sampah, zona geografis, dan pekerja, yang memungkinkan akumulasi dan perluasan kepentingan modal melalui berfungsinya ‘praktik spasial’-nya. Pandemi, menurut penulis, mengakibatkan perluasan ruang akumulasi; melalui segregasi dan segmentasi wilayah kota, serta kontrol atas buruh dan proses perburuhan. Seiring perjuangan melawan pandemi bertransisi pandemi ke ruang-ruang virtual, muncul berbagai pertanyaan mendasar tentang kerja dan kondisi kerja bagi lapisan ‘pejuang garis depan’ ini mengemuka dengan lebih nyata, yang masih juga belum diatasi.

Kata-kata Kunci: India, kesehatan publik, pekerja sanitasi, pekerja informal, pandemi.

¹ Manish K. Jha dan Mouleshri Vyas adalah Guru Besar pada Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Mereka dapat dihubungi masing-masing di jhamanishk19@gmail.com dan molly@tiss.edu. Artikel ini pada awalnya dipublikasi oleh *Refugee Watch*, Edisi Nomor 57, Tahun 2021.

PENDAHULUAN

Pada awal Maret 2020, COVID-19 menjadi ancaman global. Ketika jumlah korban semakin meningkat pada waktu artikel ditulis bulan November 2020, ketika kasus infeksi mencapai 8,591,731 dan kematian 127,059 yang dilaporkan terjadi di India, dan selama delapan bulan terakhir dunia menyaksikan runtuhnya sistem kesehatan. Pemerintah India dan masyarakatnya merasa cukup tenang karena dibandingkan dengan jumlah populasinya, kasus positif corona dan angka kematiannya sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Meski begitu, dalam hal jumlah total, India terus terkena dampak parah baik secara epidemiologis, ekonomi, maupun sosial. Seabad setelah pandemi flu Spanyol 1918, COVID-19 kembali menyoroti isu kesehatan dan penyakit secara umum dan aspek kesehatan publik secara khusus. Walaupun menyentuh kehidupan dan lingkungan dari berbagai kelas, kerentanan di antara pekerja migran, tempat hidup mereka dan akses terhadap kesehatan dan kebersihan kembali mendapat perhatian. Keadaan ini juga menciptakan sebuah kategori yang disebut sebagai 'pejuang garis depan' yang terdiri dari praktisi medis, tenaga kesehatan, dan tenaga kebersihan atau sanitasi di antara yang lainnya. Dalam makalah ini, perhatian pada pekerja sanitasi di Mumbai yang menghadapi pandemi dirinci melalui kajian atas hubungan antara para pekerja dengan Negara. Hal ini dilakukan melalui tiga momen yang memberikan pemahaman mengenai kondisi mereka – pendekatan terhadap sanitasi di India kolonial; muncul dan menurunnya kesehatan masyarakat; serta administrasi pekerja sanitasi melalui pandemi saat ini.

Kita memulai dengan pertanyaan mengapa kondisi lingkungan kerja para pekerja sanitasi belum berubah selama pandemi, terlepas pengakuan yang diberikan kepada mereka sebagai 'pejuang garis depan Covid'. Pada 2018, beberapa pekerja sanitasi melakukan demonstrasi ke kantor Pemerintahan Kota Mumbai Raya² (*Municipal Corporation of Greater Mumbai/MCGM*) membawa jasad seorang pekerja, menuntut agar pemerintah segera menangani persoalan kontrak pekerja sanitasi atau *safai karmacharis*. Malati Devandra sudah bertahun-tahun menjadi

² Perusahaan Kotamadya Wilayah Mumbai sebelumnya dikenal sebagai *Bombay Municipal Corporation* atau BMC didirikan pada tahun 1888 di bawah Akte Kotamadya Bombay.

bagian dari tenaga kerja informal ini dan akhirnya mengambil nyawanya sendiri setelah dua bulan hidup tanpa pekerjaan dan pemasukan apa pun. Celah hukum dalam Undang-Undang Kerja Kontrak (Contract Labour Act) (Regulasi dan Pembatalan) tahun 1970, telah menguntungkan kontraktor tenaga kerja. Perwakilan serikat *safai karmacharis* di Mumbai menunjukkan bahwa terjadi 108 kematian pekerja sanitasi kontrak sejak tahun 2013. Pada Mei 2020, dua orang dengan rompi dan celana pendek tanpa alas kaki masuk ke dalam saluran pembuangan hampir selutut dalamnya untuk membersihkan drainase. *Safai karmacharis* laki-laki dan perempuan dengan seragam jaket oranye terlihat duduk di samping lubang got di sebuah jalan, makan siang—beberapa dari mereka mengenakan masker rakitan ringkih, sarung tangan tipis, sembari menaikkan sampah rumah sakit ke sebuah truk menggunakan sekop biasa. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan alat pelindung atau upah minimum, dan perempuan dibayar hampir dua ratus Rupee kurang dari pekerja laki-laki untuk kerja harian yang sama. Semua pekerja sanitasi ini adalah kaum Dalit—kasta paling termarginalkan di India—dan seratus persen pekerjaan ini direservasi untuk orang-orang Dalit.³ Perbedaannya di tahun 2020 ini adalah mereka berada di tengah-tengah pandemi COVID-19.

Mumbai, pusat keuangan India yang dibangun para migran sejak abad ke-20, sangat terdampak oleh pandemi ini, menyumbang hampir 61 persen keseluruhan kasus; angka kematian nyaris 14 persen dari populasi negara. Bahkan dalam beberapa bulan awal pandemi, Mumbai mencatat 21 persen kasus secara nasional dan 25 persen kematian (Duggal, 2020). Masih banyak pertanyaan tentang dari mana asal pandemi ini, ciri epidemiologisnya yang tidak biasa, dan dasar patogenisitas belum terjawab, sehingga berbagai tindakan dicoba untuk mencegah penyebaran. Keputusan untuk melakukan *lockdown* secara nasional dengan pemberitahuan yang hanya kurang dari empat jam, dan pemandangan ribuan migran setelah itu yang berjalan kaki dalam keputusasaan dan kehilangan sumber penghidupan serta tempat tinggal, berkontribusi pada keceemasan maupun unjuk sikap politik. Di tengah-tengah kebingungan dan

³ Kachra Vahatuk Shramik Sangh, "What #CoronaWarriors are getting for taking extreme risks," diputar pada Juni 9, 2020, YouTube video, 11:00, <https://www.youtube.com/watch?v=0mrFss4iPA0>.

ketakutan, kita mendengar tentang ‘model Dharavi’ dalam penanganan penularan. Dalam 2,2 km persegi luas wilayah Dharavi, kepadatan penduduknya enam kali rata-rata nasional. Meski 80 persen penduduk bergantung pada jamban umum dan menjaga jarak adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin di sana, ‘model Dharavi’ ini menyoroti kembali upaya sukarela masyarakat. Secara serentak, pada tataran kota, pandemi mengekspos keterbatasan infrastruktur kesehatan publik di mana pemerintahan kota terkaya pun kewalahan memenuhi kebutuhan ranjang rumah sakit, silinder oksigen, dan ventilator.

Lebih dari 60 persen populasi Mumbai yang hampir 13 juta tinggal dalam kepadatan labirin beton dan atap seng dan gubuk ringkih di kawasan kumuh. Akses air minum yang aman, sanitasi, pemukiman berventilasi, dan lain-lain, masih menjadi masalah serius untuk kesehatan dan kesejahteraan pekerja migran dari luar dan dalam negara bagian, yang menempati daerah kumuh dan ruang tidak aman lainnya. Selama berpuluh tahun, di antara masalah kesehatan publik, pergeseran kebijakan negara yang mendefinisikan pendekatan pada daerah kumuh, kebersihan, dan sanitasi telah menentukan kondisi para penduduk migran. Ruang-ruang ini menampilkan kerentanan yang jamak—penularan epidemiologis dan kegagalan proteksi sosial. Ketakutan akan penularan dan penyebaran virus di dalam lingkungan sesak tersebut dan ke yang lain, mendominasi kekhawatiran awal lembaga negara dan penduduk.

Memastikan kebersihan dan sanitasi yang memadai telah menjadi kunci tanggung jawab sipil MCGM selama berpuluh tahun yang meningkat berlipat ganda dengan krisis Covid. Hampir 35.000 pekerja sanitasi (termasuk sekitar 6.500 pekerja kontrak dan lepas) dilibatkan dalam tugas-tugas seperti menyapu jalanan, mengumpulkan dan mengangkut sampah, dan membersihkan toilet umum untuk menjaga kota agar tetap bersih dan menghindari krisis kesehatan publik di masa-masa normal. Mereka juga adalah yang paling rentan terhadap penyakit dan wabah karena kondisi tempat kerja dan pemukiman kumuh mereka yang rentan. Selama beberapa bulan ini, dalam upaya kota ini melawan pandemi dan masalah kesehatan publik lainnya, para pekerja sanitasi membersihkan limbah padat dalam jumlah besar dan limbah biomedis yang semakin meningkat jumlahnya. Pada Maret 2020, ketika pandemi

merebak, jumlah sampah biomedis yang dihasilkan setiap hari di Mumbai mencapai rata-rata 11,230 kg (Express Healthcare, 2020). Mumbai menghasilkan tiga kali rata-rata limbah COVID-19 harian pada bulan Juli dibandingkan April dan empat puluh dua kali dibandingkan dua belas hari pandemi di bulan Maret. Sampai Juli, Mumbai menghasilkan limbah COVID-19 yang jumlahnya hampir setara dengan limbah biomedis biasa sebelum masa pandemi (Deshpande, 2020). Tidak terhindarkan bahwa krisis ini akan menantang otoritas sipil dalam menjalankan tanggung jawabnya. Walau demikian, institusi dan sistem pemerintahan kota, staf Departemen Pengelolaan Limbah Padat (Solid Waste Management, SWM) dan yang lainnya masih sama sebagaimana waktu sebelum pandemi. Kesadaran bahwa ini adalah keadaan khusus baru muncul setelah penegakan langkah-langkah kebijakan seperti Aturan Pengelolaan Limbah Bio-medis (Bio-Medical Waste Management Rules), 2016, dan penyediaan Alat Pelindung Diri untuk pekerja.

Dalam upaya untuk memahami pendekatan pemerintah kota terhadap pekerja sanitasi migran selama pandemi sekarang ini, kami mulai dengan pertanyaan berikut: Apa yang dapat kita tarik sebagai pelajaran dari sejarah pandemi/epidemi di kota Mumbai yang memiliki implikasi untuk manajemen kesehatan publik, kebijakan sanitasi, dan pemukiman untuk pekerja migran? Bagaimana sejarah membentuk kebijakan dan praktik kesehatan publik terkini? Bagaimana tata kelola dan pengelolaan permukiman informal diatur untuk menangani masalah kebersihan, sanitasi, masalah kesehatan publik lainnya? Bagaimana kita menilai risiko, ancaman, dan kerentanan pekerja selama pandemi? Apa yang dapat kita ketahui dari kepadatan berlebih, kondisi sanitasi yang buruk, dan kondisi lingkungan hidup yang tidak manusiawi dalam hubungannya dengan kesehatan publik dan aksesnya oleh migran di kota Mumbai dan wilayah kumuhnya? Bagaimana kaum miskin kota dan pekerja sanitasi, khususnya, menyikapi aturan jaga jarak, isolasi, etiket bersin dan batuk, pengendalian, dan lain-lain? Bagaimana mereka menangani cedera fisik, sakit dan kematian dalam bulan-bulan ini? Dari pengalaman sehari-hari yang para migran alami sebagai penduduk dan pekerja dalam hal layanan kesehatan, akses, alienasi, penolakan, ketakutan dan kecemasan, apa yang dapat kita ketahui tentang bagaimana kota menangani pandemi?

Mengupayakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tadi membawa kita ke tiga aspek luas—sejarah penanganan pandemi kota Mumbai; pemukiman kumuh dan pertanyaan kesehatan publik; dan pekerja sanitasi sebagai pejuang pandemi dan sebagai subyek kesehatan publik. Analisis aspek historis dan kekinian dari situasi pandemi didukung oleh dua perangkat konsep, yakni konsep ekonomi politik ‘ruang’ David Harvey, argumen tentang sifat ruang yang tidak netral, dan penggunaannya untuk memajukan ‘akumulasi’ dengan kapital. Yang kedua mengambil dari konsep *biopolitika* Michel Foucault dan teknologi seperti segregasi, segmentasi, pengintaian, yang menjelaskan antarmuka antara pekerja sanitasi dengan limbah yang mereka tangani; sifat alami dari kendali yang dijalankan penguasa atas para migran sebagai penduduk dan pekerja.

MENGHADAPI EPIDEMI DAN PANDEMI: DARI BOMBAY KE MUMBAI

Mumbai memiliki catatan sial sebagai episenter dari semua epidemi besar di India, termasuk wabah pes bubo pada 1897 serta flu Spanyol pada 1918. Dengan latar wacana publik seputar migran, kehidupan di pemukiman kumuh, situasi pekerjaan, tempat tinggal dan kesehatan mereka, epidemi masa lalu pada 1897 dan 1918 dapat dilihat sebagai momen yang memengaruhi sifat kehidupan, keadaan dan pengalaman migran kelas pekerja dan membentuk gagasan tentang kebersihan, sanitasi, kesehatan publik, pembentukan tanggung jawab masyarakat, serta kebijakan dan praktik untuk mengatur permukiman informal yang berkembang di kota ini selama lebih dari satu abad.

Apa yang kita saksikan hari ini mendorong kita untuk membandingkan dengan epidemi masa lalu dan gambaran kota, kelas pekerjaannya, migrannya, serta kondisi permukiman dan infrastruktur kesehatannya. Pada puncak penyebaran wabah, perhatian tertuju pada risiko kesehatan publik karena pemukiman yang kotor dan kondisi sanitasi yang buruk dari kelas pekerja. Penguatan sanitasi instan dan beberapa tindakan keras dilakukan untuk menangani epidemi. Sebuah ‘kepanikan massal’ mencengkram kota, sebagai tanggapan atas upaya pemerintah kota dalam mensurvei, mengendalikan dan menyerang fisik dan lingkungan padat pekerja miskin kota, maupun atas epidemi itu sendiri

(Sarkar, 2014). Pada awal 1897, sekitar 400,000 orang lari dari kota, sedikit kurang dari separuh populasi kota (Sarkar, 2014). Epideminya nyaris meruntuhkan kota. "... sementara kotanya sendiri serupa dengan 'Kota Mati', stasiun kereta api dipenuhi massa yang kabur ... Bisnis lumpuh, perkantoran tutup dan jalan-jalan raya, yang biasanya dipenuhi dengan kehidupan, dapat digambarkan sebagai kekosongan yang suram" (Condon, 1900).

Kondisi sanitasi yang tidak bersih di dalam pemukiman kelas pekerja dipandang sebagai tempat yang kondusif bagi penyebaran epidemi. Dengan adanya wabah dan kondisi yang tidak sehat, Bombay City Improvement Trust (BIT) dibentuk pada 1898 dengan "tujuan untuk membersihkan kota dari area-area yang tidak bersih dan menanggulangi masalah yang disebabkan oleh kondisi kehidupan orang miskin kota yang sangat buruk" (Kidambi, 2001).. Lembaga tersebut diberi mandat untuk "membangun jalan baru, membuka daerah-daerah yang ramai, mereklamasi lahan dari laut untuk menyediakan ruang untuk mengekspansi kota, dan konstruksi pemukiman yang bersih bagi orang miskin".⁴ Otonom dari pemerintah kota, BIT juga ditugaskan untuk membangun tempat tinggal yang bersih bagi orang miskin (Srivastava, 2012). Ruang-ruang dikuasai dan diregulasi melalui akuisisi lahan serta perobohan dan pembersihan daerah kumuh. Akan tetapi, kebanyakan ruang-ruang ini kemudian dialihkan untuk konstruksi bangunan swasta dan tujuan lain untuk keuntungan finansial.

Wabah tersebut mendorong tindakan tegas otoritas kota di Bombay di mana mereka mengambil alih kekuasaan khusus yang mengizinkan pemisahan dan pengamanan ke rumah sakit kasus terduga pes (Sarkar, 2014). Beberapa ratus perumahan kumuh dihancurkan dengan harapan membasmi penyakit tersebut sebelum berkembang penuh.⁵ Dalam menangani wabah pes tersebut, "petugas kesehatan, pekerja sanitasi, polisi, dan petugas pelabuhan berupaya untuk mengidentifikasi, mengarangtina, dan merasialisasi warga pribumi yang tidak bersih"

⁴ *Annual Administration Report of the City of Bombay Improvement Trust, for the year 1899* (Bombay: The Times Press, 1900), dikutip dari Kidambi (2001, hal. 57-79).

⁵ P.C.H. Snow, *Report on the outbreak of bubonic plague in Bombay, 1896-97*, bersama laporan dari H.W. Haffkine, T.S. Weir and N.H. Choksy (Bombay: Times of India Steam Press, 1897), dikutip dari Sarkar (2014, hal. 184-191).

(Chhabria). Meski demikian, karantina dan kendali menjadi sangat kontroversial dan mengakibatkan resistensi luas. Perlahan, disadari bahwa demarkasi dan isolasi sebagai bentuk penanganan epidemi sangat tidak efektif dan tidak berkelanjutan.

Perhatian epidemiologi bergeser pada tempat-tempat kumuh, yang karena kepadatan pekerja migran— yang hidup dalam kondisi tanpa ventilasi, cahaya yang memadai, menghadapi masalah pembuangan sampah dan limbah—dianggap tidak higienis. Daerah kumuh dipandang sebagai masalah kesehatan publik dan tempat penyebaran wabah (Kidambi, 2001). Kidambi mengklaim bahwa penyakit epidemis merupakan hasil dari kondisi khusus wilayah yang kotor dan melarat yang memberi pengaruh signifikan pada perang negara kolonial melawan wabah pes. Petugas kesehatan publik dihadapkan pada pemukiman sesak kelas pekerja yang dikenal sangat tidak sehat dan efek merusak dari industri awal atas kehidupan kota dengan polusi, kebisingan, dan banya. Wacana sanitasi membuka metafora holistik tubuh holistik sebagaimana ditampilkan dalam pemikiran abad pertengahan dan menekankan antarmuka antara tubuh dan lingkungannya (Füller, 2016).

Seperti yang dikemukakan Foucault, di bawah kuasa kolonial, kebijakan kesehatan dan medis juga menjadi alat untuk mengkolonisasi masyarakat dan tanahnya, tidak hanya tubuhnya. Untuk meredakan ketakutan akan wabah, respons kesehatan publik yang kuat datang dalam bentuk Undang-undang Penyakit Epidemi tahun 1897—produk dari upaya mengkolonisasi pejabat Dinas Layanan Kesehatan India—memberikan otoritas sipil kebebasan untuk menjalankan keinginan mereka dengan sewenang-wenang. Undang-undang ini mengizinkan inspeksi kapal, isolasi dan karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Melalui beberapa proses kesehatan dan sanitasi, kota Mumbai menjadi ruang bagi rekonfigurasi spasial dan kontrol mobilitas. Barisan polisi melakukan pencarian dari rumah ke rumah untuk mengidentifikasi kasus wabah, melaporkan kematian, yang sakit diisolasi, rumah yang reyot dikosongkan dan didisinfeksi dan penghuninya dipindahkan ke kamp (Sarkar, 2014). Intervensi kesehatan publik yang tegas dan keras ini dianggap tidak sensitif dan berbagai cara langsung maupun diam-diam untuk melawan atau menghindari intervensi tersebut dilaporkan.

Terjadi kemarahan luas dan perlawanan keras terhadap otoritas kota. Sebagai reaksi pada rumor bahwa rumah sakit di kota Mumbai dengan sengaja membunuh orang-orang yang sakit, para pekerja pabrik penggilingan melancarkan aksi kerusuhan (Arnold, 1993).

Epidemi pes di Bombay berdampak pada hubungan antara pihak kolonial dan subyeknya. Hal ini menjadi kali pertama negara mendapatkan kewenangan yuridis-legal untuk tujuan yang tampaknya untuk kemanusiaan: untuk mencegah penyebaran epidemi. Kewenangan ini secara spesifik menyasar yang miskin dan pekerja migran, yang dianggap sebagai pembawa penyakit, membatasi pergerakan mereka, menghancurkan rumah-rumahnya, dan menggunakan tubuh mereka untuk eksperimen medis. Ini menjadi model yang digunakan oleh pemerintah selanjutnya untuk menggunakan penyakit atau epidemi sebagai justifikasi tindakan-tindakan otoriter selama berpuluh tahun hingga pandemi hari ini.

Dan sesungguhnya wabah pes itu, dan 20 tahun kemudian flu Spanyol pada 1918, pada dasarnya membentuk kebijakan dan praktik pemerintahan kota di Bombay. Pada 1919, Radhakamal Mukerjee, ketika mengunjungi pemukiman-pemukiman kumuh ini setelah pandemi flu Spanyol tahun 1918-1919—yang ketika itu sudah menyebabkan 50 juta kematian di seluruh dunia dan menimbulkan ancaman dan peringatan besar bagi kesehatan publik—mengamati kondisi hidup yang sangat tidak higienis dan tidak sehat di pemukiman kumuh:

“... dalam kondisi yang sangat sesak penyebaran penyakit begitu mudah dan wabah pes, kolera atau cacar akan mengusir semua orang yang bisa melarikan diri. Epidem influenza sekarang telah memengaruhi kelas yang lebih miskin di *Chawl* dan *Bustee* lebih daripada kelas atas. Bagaimana tidak? Di Bombay, beberapa *Chawl* ini sangatlah kotor. Di salah satunya di mana tidak kurang dari 2,000 jiwa hidup, para Bhangi, pemulung, belum dua minggu, dan segala macam kotoran telah menumpuk ... Baik di Calcutta atau Bombay, Cawnpore, Bangalore atau Poona, Ahmedabad atau Madras, orang-orang di *bustee* dan *chawl* berhadapan dengan kesengsaraan manusia yang hidup, kotoran dan penyakit dari neraka di bumi” (Mukerjee, 1919, hal. 291-292).”

Epidemi ini, setelah HIV, adalah pandemi paling mematikan kedua di era modern (Donaldson and Kensington, 2016). Di antara 1918-20 sekitar delapan belas juta penduduk India meninggal karena influenza dan komplikasinya, membuat India dan kota Bombay menjadi titik fokus bencana dari segi kematian. Kematian tingkat provinsi di kepresidenan Bombay relatif tinggi, 54.9 orang per seribu pemukim.⁶ Tingkat keparahan penyakit di Mumbai membuat para peneliti menyebutnya 'The Bombay Influenza' dan 'The Bombay Fever'. Tidak seperti pada wabah pes, respons rezim kolonial tidak setegas sebelumnya selama epidemi influenza ini. Walau flu 1918 tidak mengakibatkan reformasi sanitasi seperti yang terjadi selama wabah pes, peristiwa ini menghasilkan sesuatu yang lain—memobilisasi masyarakat untuk menyumbangkan waktu dan uang mereka dan menciptakan budaya baru kerja sosial dan keterlibatan sipil. Selain itu, cerita kolonial tentang kotoran dan penyakit mencerminkan persepsi modernis yang agresif akan kebersihan, ketertiban dan penggunaan ruang publik dan privat yang 'tepat' (Sristava, 2012). Pemahaman tersebut dan respons pemerintah menghasilkan konsekuensi substantif pada pembangunan perkotaan dan kebijakan di Bombay.

Pengalaman epidemi memengaruhi pendekatan administratif pada kesehatan, penyakit, kondisi perumahan serta keseluruhan antar-mukanya dengan kota. Untuk mengendalikan hubungan antara manusia dan lingkungannya, lingkungan di mana mereka tinggal didekati melalui intervensi biopolitik. Membahas reformasi urban pada abad kesembilan belas, Gandy, melacak pembentukan 'kota bakteriologis' sebagai konstelasi yang berbeda dari wacana kebersihan yang mengalami perubahan, problematisasi metabolisme urban dan beberapa perkembangan teknis (Gandy, 2006). Sejumlah penelitian lain tentang India masa kolonial menjelaskan situasi perumahan dan kebersihan yang sangat menyedihkan. Laporan Florence Barne, berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 1922, mengungkapkan: "dalam satu ruangan berukuran sekitar 15 kaki [sic] x 12 kaki... enam keluarga hidup. Ketika ditanyakan, saya memastikan bahwa jumlah sesungguhnya orang dewasa dan anak-anak yang hidup di ruangan itu 30 orang... Ini adalah satu dari banyak ruangan yang saya lihat" (Barnes, 1922, hal. 31). Ketika memberi kuliah

⁶ See India Sanitary Commissioner (1920).

tentang “Kebatilan yang menjangkiti pekerja penggilingan Bombay”, Dr. Harold Mann mengatakan “Saya belum pernah merasakan makna istilah “*warehousing labour*” sebagaimana ketika saya melihat *chawl* di Bombay. Saya menemukan 14 pekerja di dalam sebuah ruangan”.⁷

Dalam menangani pandemi ini, kontrol negara ditegakkan dan dilegitimasi, meletakkan dasar untuk intervensi otoritarian pada masa krisis seperti itu. Sanitasi fisik menjadi persoalan utama dari intervensi kesehatan publik. Kesehatan dan ruang kota menjadi terhubung dengan berbagai cara baru yang signifikan dalam wacana sanitasi yang muncul. Alih-alih berfokus pada penghuni hunian yang buruk ventilasinya, relasi spasial yang dibentuk oleh mereka yang menjadi persoalan. Sebagian besar wacana kesehatan publik dan kebijakan kesehatan muncul dengan latar begitu dalam rentang dua dekade di Bombay. Hal ini secara fundamental mengubah relasi antara pemerintah kolonial dan subjeknya dan mengedepankan gagasan perumahan publik, sanitasi, kebersihan, dan aspek terkait dari layanan perumahan dan kesehatan.

PEMBEDAAN KEWARGAAN, AKSESIBILITAS YANG TERPECAH-PECAH, DAN KARUT-MARUT KESEHATAN PUBLIK

Layanan kesehatan publik adalah bagian yang penting dari pembangunan infrastruktur negara. Layanan ini membantu mengendalikan penyakit melalui kebijakan seperti keamanan makanan, penyediaan air minum bersih, kebersihan dan sanitasi, pengelolaan limbah padat, dan lainnya. Ketimpangan struktural mengakibatkan populasi yang termarginalisasi secara sosial dan ekonomi menjadi lebih terdampak oleh absennya layanan ini dan fasilitas publik. Layanan kesehatan publik adalah sekaligus pro-pertumbuhan dan pro-kemiskinan karena menargetkan kelompok miskin yang menghadapi paparan maksimal terhadap penyakit (Dasgupta, 2005). Meski demikian, akses terhadap layanan kesehatan publik untuk penduduk seperti di Mumbai terpecah-pecah karena sejumlah alasan yang memiliki anteseden sejarah.

⁷ Times Correspondent, “EVILS WHICH AFFLICT THE MILLWORKERS OF BOMBAY: “Jobbers” Should be Abolished NEED FOR MORE DIRECT CONTACT BETWEEN EMPLOYERS AND WORKERS,” *The Times of India*, Maret 22, 1932, 8, ProQuest. Surat kabar ini juga dikutip dalam Srivastava, “Creating a Healthy and ‘Decent’ Industrial Labor Force”, 93.

Di masa kolonial India, pembuatan kebijakan dan perencanaan kesehatan publik dilakukan secara sistematis dan ditujukan untuk mengatasi ancaman kesehatan publik. Seperti didiskusikan di bagian sebelumnya, kolonialisme menyediakan model pertama penggunaan cara-cara ilmiah dalam mengendalikan pandemi untuk regulasi skala besar dan seringkali memaksa atas kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan ini berlanjut memengaruhi kebijakan dan praktik pada era pascakolonial. Warga Inggris tinggal di lingkungan terpisah dengan sanitasi lingkungan yang baik. Kebijakan kesehatan publik fokus pada pemukiman warga Inggris dan pangkalan militer. Motif di balik fokus ini bisa saja adalah keraguan untuk berinvestasi dalam kesejahteraan populasi pribumi atau memaksakan praktik 'asing' atas orang-orang India.

“Pangkalan militer dan area pemukiman warga Inggris dipisahkan dari area India, dengan jalanan yang lebar dan lahan yang luas untuk mencegah penyebaran penyakit melalui keramaian. Area kota diistimewakan dengan mesin untuk memastikan kondisi sanitasi yang baik, termasuk pengelolaan air, pembuangan limbah padat dan cair. Untuk kota-kota kecil dan perdesaan, layanan utamanya berfokus pada deteksi dini dan kontrol penyebaran wabah penyakit dengan angka kematian yang tinggi—seperti kolera dan wabah pes—sebelum bisa menyebarkan, dan bahkan mengancam populasi yang lebih diistimewakan” (Dasgupta, 2005, hal. 5160).

Selama periode kolonial terjadi penyusunan legislasi kesehatan publik, pendirian institusi dan infrastruktur untuk memonitor dan menyediakan layanan kesehatan publik pada tingkat federal dan provinsi. Pemerintah kota mempekerjakan staf kesehatan publik mereka sendiri—dokter, dan inspektur sanitasi untuk menegakkan peraturan sanitasi (Harrison, 1994). Akan tetapi, terjadi kemerosotan institusi kesehatan publik secara sistematis dan bertahap, dan kesehatan publik sebagai prioritas di India pascakemerdekaan; Hal ini terjadi akibat beberapa faktor: penyempurnaan produksi massal antibiotik sejak tahun 1940-an yang memungkinkan para elit memperoleh obat ini untuk menyembuhkan penyakit alih-alih mengikuti tindakan pencegahan seperti kebersihan lingkungan sebagaimana yang berlaku di populasi lain; pergeseran menuju pembiayaan teknologi kuratif alih-alih sistem kesehatan publik;

barang privat (seperti perawatan medis) yang memiliki nilai elektroal lebih besar daripada barang publik (seperti tindakan sanitasi untuk melindungi kesehatan publik secara keseluruhan), yang mengakibatkan sistem kuratif mendahului tindakan preventif; dan kesehatan publik menjadi lebih termedikalisasi, di mana dokter medis masuk ke sistem kesehatan dan meminggirkan profesional kesehatan publik. Sistem kesehatan publik mengalami kekurangan pendanaan yang amat parah akibat ketidaksesuaian antara Pusat dengan negara-negara bagian dan sempitnya ruang otonomi fiskal negara bagian. Layanan kesehatan publik runtuh melalui 'penelantaran atas regulasi kesehatan publik dan implementasinya'; 'pengalihan dana keluar dari layanan kesehatan'; dan 'perubahan organisasi yang bertentangan dengan pemeliharaan kesehatan publik' Dasgupta, 2005). Selama 1950-an, pentingnya sanitasi untuk mengontrol penyakit menular diakui, walau sedikit yang dilakukan untuk itu dan pada awal 1960-an air dan sanitasi yang menjadi bagian perencanaan kesehatan dipindahkan keluar dari sektor kesehatan, dan peran inspektur sanitasi ditarik mundur.

Perkembangan ini menyebabkan terciptanya ceruk-ceruk dalam sektor kesehatan, sehingga terjadi segmentasi dan pemisahan kekuasaan, kontrol dan tanggung jawab antara entitas negara dan swasta. Pada dekade selanjutnya, peran negara dalam memastikan kesehatan publik dan penyelenggaraan layanan dikurangi, dan hal ini semakin diprivatisasi melalui berbagai pengaturan seperti kerja sama pemerintah-swasta, dan dorongan serentak agar asuransi menggantikan layanan/infrastruktur publik. Tanpa asuransi, jaminan sosial dan berbagai bentuk bantuan medis, masyarakat miskinlah yang menanggung beban dari privatisasi dan merosotnya sistem kesehatan publik. Negara sendiri gagal untuk menyelenggarakan layanan publik yang komprehensif, mengakibatkan masalah kesehatan publik seperti kurang gizi (yang disebabkan oleh faktor seperti makanan yang tidak cukup, akses air dan sanitasi yang buruk sehingga menyebabkan infeksi berulang), dan kurangnya ketersediaan layanan yang layak. Hal ini terlihat dari kondisi tenaga kesehatan termasuk petugas sanitasi yang tinggal di permukiman informal, dan perlakuan yang diberikan kepada mereka.

Tempat hidup dan tempat kerja pekerja informal di Mumbai, paling terdampak oleh akses buruk terhadap layanan kesehatan, menambahkan keterpinggiran mereka. Lebih dari setengah populasi kota Mumbai tinggal di permukiman informal dari berbagai infrastruktur, pendapatan, ekonomi, etnisitas, dan agama, terdesak ke dalam ruang apa pun yang bisa ditemukan, dari jembatan dan rel kereta hingga trotoar dan gubuk-gubuk. Pertumbuhan permukiman informal merefleksikan naiknya harga real estat yang spektakuler selama 1990-an didorong oleh pertumbuhan ekonomi kota (Appadurai, 2000), dan lemahnya komitmen perumahan sosial negara bagian (Verma, 2002). Sebagian besar orang di permukiman informal tidak memiliki keamanan tempat tinggal, hidup di perumahan berkualitas buruk yang rentan ketika musim hujan, sering menjadi sasaran penggusuran dari pihak pemerintah maupun swasta, tidak ada akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan hidup di lingkungan dengan tingkat polusi tinggi di mana mereka rentan terkena penyakit (McFarlane, 2008). Pemukiman ini, sering digambarkan dan dipandang sebagai zona antara legal atau ilegal, menempati ruang yang sarat sengketa, di mana penghuni sering mengalami kewargaan yang dibedakan dan hanya dianggap sebagai 'populasi' alih-alih sebagai 'warga'. Di sini, berbagai layanan dan fasilitas "diberikan atas dasar kasus per kasus, *ad hoc*, atau pengecualian, tanpa membahayakan keseluruhan struktur legalitas dan properti" (Chatterjee, 2004). Layanan ini difokuskan pada populasi alih-alih warga, di medan yang oleh Chatterjee disebut sebagai 'sosial heterogen' alih-alih kewargaan yang sosial homogen. Sebagai tambahan, ruang urban ini disanitasi melalui logika penggusuran daripada perbaikan dengan tujuan untuk "membersihkan kota dari perambah dan pencemar dan, konon, mengembalikan kota kepada warganya yang pantas" (Chatterjee, 2004). Sebagai ilustrasi kewargaan yang terdiferensiasi, analisis Risbud atas data yang ada menunjukkan bahwa jumlah yang sangat terbatas, yaitu hanya 5 persen dari penghuni pemukiman kumuh memiliki akses ke koneksi air individu sementara 49 persen harus berbagi pipa dan sering hanya mengandalkan pompa tangan dan sumur (Risbud, 2003). Toilet pribadi hampir tidak ada: sekitar 28 persen orang buang air besar di tempat terbuka dan 73 persen orang menggunakan toilet umum. Permukiman kumuh yang

dibangun di atas tanah pemerintah diberikan fasilitas layanan, sementara permukiman kumuh di atas tanah swasta tidak mendapatkan hak atas itu, sedangkan mereka yang tinggal di tanah milik negara berada di antara dua kondisi ini. Apakah permukiman kumuh itu mendapat pemberitahuan juga menjadi salah satu kriteria diskriminasi (Zérah, 2008). Perbedaan ini sangat kompleks di Mumbai karena terkait dengan 'tenggat waktu', yang menyingkap politik dan ekonomi politik yang memengaruhi akses migran ke layanan masyarakat. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tekanan demokratis dari penghuni kawasan kumuh, yang merupakan proporsi pemilih besar di Mumbai (Subbaraman and Murthy, 2015).

Transformasi diskursif di Mumbai dipengaruhi oleh pengalaman dan pelajaran dari dua epidemi sebelumnya di mana aspek sanitasi, ventilasi, pemukiman, pola pemukiman, dan lain-lain menentukan bentuk kesehatan kota. Untuk membuat kota ini terlihat seperti ruang yang teratur, ide dan konsepsi tempat tinggal dan perumahan bagi orang miskin menjadi vital dalam perencanaan dan estetika kota. Meski menjadi pemerintah kota terkaya, sanitasi dan kebersihan di lingkungan yang lebih miskin masih berantakan. Mengambil dari pengalaman epidemi sebelumnya ketika pengerahan 'pemulung' tidak mudah, dilakukan upaya untuk memukimkan mereka di lokasi-lokasi yang dapat diidentifikasi demi mengamankan jasa mereka jika diperlukan. Permukiman informal telah berkembang menjadi pusat penyedia jasa di kota. Di Mumbai, mereka tersebar di seluruh kota, menciptakan lingkungan yang majemuk dalam hal kelas, dan memastikan bahwa untuk kelas menengah dan atas, penyedia jasa seperti pekerja sanitasi dapat dengan mudah dijangkau.

PEKERJA SANITASI: SEGMENTASI, PENGAWASAN, DAN BIOPOLITIKA SELAMA PANDEMI HARI INI

Meski pandemi Covid berdampak pada kehidupan dan keadaan di lintas jurang kelas, kerentanan dan ketidakpastian seputar pekerja migran, tempat tinggal, dan akses mereka ke kesehatan dan kebersihan muncul kembali dengan fokus baru. Terdapat kesamaan yang cukup mengerikan dengan persoalan yang disorot dan direncanakan untuk diatasi berkenaan dengan kesehatan publik setelah akhir abad ke-19 dan

epidemi awal abad ke-20. Pekerja informal di Mumbai telah berjuang melewati epidemi-epidemi sebelumnya. Pada masa wabah pes, pekerja penggilingan merupakan 80,000 dari total 850,000 penduduk kota. Dipaksa menghadapi tekanan di bawah langkah-langkah pengendalian wabah seperti sanitasi, karantina, dan pemisahan anggota keluarga yang sakit dalam kondisi buruk, bahkan penggusuran tempat tinggal mereka, akhirnya mereka melakukan pemogokan beberapa kali pada awal 1897. “Dalam tiga sampai empat bulan awal wabah pes, 40 ribu orang, termasuk banyak pekerja penggilingan, lari dari Bombay ke kampung halaman mereka, mendorong kota menuju krisis ekonomi yang berat” (Sarkar, 2014 dalam Duggal, 2020, hal. 17). Baik di tempat tinggal dan tempat kerja mereka, buruh terus diperlakukan sebagai bukan warga kota.

Pekerja sanitasi, memastikan reproduksi sosial pekerja, terlibat dalam konfrontasi langsung dengan penyakit. Ciri-ciri rezim pengaturan pekerja sanitasi menyoroti tempat mereka—pada persimpangan informalitas, kontrol selektif oleh aparaturnegara, dan biopolitika penanganan limbah. Sebagaimana dijelaskan secara mendetail di awal, pengelolaan limbah padat, yang diartikulasikan sebagai pemeliharaan kebersihan dan sanitasi, diperlakukan sebagai keharusan dalam sistem kesehatan publik di era kolonial, di mana inspektur sanitasi memantau kondisi pada tingkat provinsi dan kota. Setelah Kemerdekaan, dan dengan disiapkannya sistem pemerintahan kota dan institusi di berbagai kota di negeri ini, limbah padat harus dikelola, dan sebagai masalah urban, hal ini menjadi tanggung jawab utama pemerintah kota. Peningkatan urbanisasi dan spesialisasi fungsi lebih selama beberapa dekade terakhir membuat pengelolaan limbah padat ditugaskan kepada SWM atau departemen kesehatan kota. Departemen-departemen ini merekrut, pengorganisasian, dan pengelolaan kerja dan tenaga kerja. MCGM saat ini merupakan pemerintah kota terbesar di India dari segi anggaran tahunan dan luas wilayah (Pethe et al., 2011). Departemen SWM mempekerjakan semakin banyak pekerja untuk pembersihan kota melalui beberapa tugas termasuk membersihkan jamban umum, menyapu jalan, mengumpulkan dan mengangkut limbah padat (rumah tangga, industri, biomedis) ke tempat pembuangan akhir.

Di Mumbai, penduduknya mengelola limbahnya dengan sangat buruk; limbah-limbah ini sering berserakan dan dilempar ke dalam selokan untuk diangkut oleh petugas penyapu jalanan (Kumar et al., 2003). Kurangnya disiplin dan penempatan tempat sampah yang tidak memadai adalah sebagian alasan kenapa menjaga agar kota tetap bersih cukup menantang. Pemilahan limbah, yang ditegakkan oleh pemerintah kota, tidak diikuti dengan memadai dan efektif; pengumpulan dan pengangkutan sampah masih menjadi tanggung jawab utama dari pekerja sanitasi. Selain itu, pemungut sampah di dalam ekonomi informal memainkan peranan penting dalam pemilahan dan daur ulang sampah, kontribusi yang tidak secara formal diakui oleh pemerintah kota. Karena itu, pekerja berada di pusat dari berbagai proses dalam pengelolaan manajemen berbagai jenis limbah di kota. Proses-proses ini rupanya menjadi sangat krusial selama pandemi karena risiko penyebaran dari beragam sumber.

Selama dua dekade terakhir, perubahan kebijakan telah mengizinkan masuknya perusahaan dan organisasi swasta dalam pengelolaan limbah padat dan pembersihan kota. Konsekuensinya, terjadi segmentasi tugas seperti penyapuan jalan sebagian besar diserahkan kepada perusahaan swasta dan kontraktor, segmentasi area dengan lingkungan tertentu sepenuhnya dikelola melalui kontrak tetap, dan, yang paling penting, segmentasi tenaga kerja dengan lembaga pemerintah kota seperti MCGM menyelesaikan pekerjaan dengan pekerja standar (permanen) maupun non-standar (kontrak). Maka SWM, sementara menjauhkan dirinya dari kesehatan publik sebagai tujuan, ditujukan untuk mengelola limbah. SWM berkembang dalam format hibrida—dengan pekerja permanen atau standar serta pekerja kontrak atau non-standar yang terlibat dalam pekerjaan yang sama, namun di bawah kondisi yang berbeda Vyas, 2009). Perluasan imperatif biopolitik negara yang ada ini terlihat dalam normalisasi sistem kontrak dengan kondisi kerja yang tidak aman. “Pekerja sanitasi... mengumpulkan sampah dari perumahan dan perusahaan komersial ke dalam truk yang dirancang untuk tujuan itu, yang mungkin juga mereka kemudikan. Di antara risiko yang ada dalam pekerjaan ini adalah yang akibat mengangkat wadah sampah yang berat, trauma, dan lainnya...” (Mamtani & Cimino, 1992). Peker-

ja sanitasi informal menghadapi kurangnya fasilitas dasar dan layanan, termasuk layanan kesehatan, kecuali mereka terorganisasi dalam serikat pekerja. Sebagai pekerjaan berbasis kasta, stigma sosial yang dihadapi para pekerja ini, terlepas gendernya, memengaruhi bergenerasi-generasi rumah tangga. Ironi yang melekat pada para pekerja sanitasi ini adalah kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan untuk mereka yang terlibat dalam memastikan kesehatan untuk publik (Jha et al., 2013). Situasi ini beresonansi dengan apa yang *Bombay Chronicle* amati seabad yang lalu: “Penyapu, meskipun ia adalah orang yang paling terlantar pada masa-masa normal, justru adalah orang yang paling penting” (*Bombay Chronicle*, 1922 dalam Masselos, 1982).

Terdapat kongruensi yang tinggi antara kemiskinan, kerentanan, dan pekerjaan informal di India.⁸ Ekonomi informal ditandai dengan keberagaman dalam hal pekerjaan, kondisi kerja, sifat ketidakamanan; dan penghuni kawasan kumuh dan mereka yang hidup di pemukiman informal, seperti di pinggir jalan, bekerja dalam kondisi yang rentan yang ditentukan oleh unsur pasar kerja dan ketidakamanan sosial yang lebih luas (Arnold and Bongiovi, 2012). Untuk pekerja sanitasi kontrak, pandemi ini telah memperburuk ketidakamanan mereka akibat kondisi kerja dan layanan kesehatan publik yang buruk. Selama dua puluh tahun terakhir, perjuangan mereka untuk mendapatkan hak telah berlalut-lalut, memakan sumber daya yang intensif, dan mendapatkan hasil yang beragam (Vyas, 2009). Pemogokan sesekali untuk memprotes masalah seperti upah minimum, alat pelindung, fasilitas dasar di tempat kerja, dan jaminan sosial, telah menyebabkan kondisi fisik seluruh kota yang menandakan suatu krisis kesehatan publik bagi kota. Banjir Mumbai tahun 2005 menghadirkan peluang kecil di mana kontribusi mereka diakui, bahkan dihargai. Namun prasangka yang lebih besar terhadap status rendah pekerja sanitasi kembali setelah bencana berakhir, dan para pekerja kembali ke mata pencaharian sebelumnya yang rentan dengan tingkat kematian di antara yang tertinggi dibandingkan pekerjaan apa pun yang ada di kota (Asher, 2015).

⁸ See National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, Government of India (2007).

Tata kelola kota, tenaga kerja yang bekerja untuk otoritas kota, dan sektor ekonomi lainnya, merupakan hal yang sangat penting dalam menelaah pekerjaan sanitasi dan pekerja di Mumbai. Sejalan dengan yang Foucault jelaskan beberapa dekade lalu, tata kelola pandemi di tingkat negara bagian dan kota menyebabkan “pemisahan spasial yang ketat... pelarangan untuk keluar dari kota... kota yang dilumpuhkan oleh fungsi kuasa yang luas... berbagai rangkaian teknik dan institusi untuk mengukur, mengawasi, mengoreksi yang abnormal...” (Foucault, 2008). Patton menegaskan, “manajemen pandemi telah menjadi paradox ruang-waktu pascamodern—populasi membutuhkan pengawasan terus menerus karena penyakit berpotensi ada di mana-mana, nyaris di mana saja, namun hanya pernah diaktualisasikan pada beberapa tempat pada waktu tertentu” (2011, hal. 105). Namun, mengelola pandemi membutuhkan lebih dari sekadar pengawasan dan kontrol. Pengalaman wabah pes di Surat memiliki beberapa pelajaran penting dalam hal peran stigma dalam mencegah upaya untuk menahan penyebaran, dan pentingnya inisiatif yang ditujukan untuk mengurangi stigma dan kecemasan; yang paling penting, ini membawa pada perbaikan besar-besaran sanitasi dan layanan kesehatan primer, dan realisasi bahwa keamanan pada ‘penyedia layanan kesehatan garis depan’ dan keluarganya perlu dijamin “atau mereka dapat terpaksa harus memilih antara kebaikan untuk keluarga mereka atau kebaikan untuk masyarakat luas” (Barret and Brown, 2008). Karena ketakutan, ketidakpastian, kecemasan dan stigma memengaruhi menentukan dampak dari teknik pengendalian dan pengelolaan pandemi, mereka perlu memperhitungkan dalam pengelolaan populasi. Tidak ada tempat semua ini mengerucut sejelas dalam ruang pekerja sanitasi atau *safai karmacharis* yang menangani limbah, dan interaksi mereka dengan subyek-subyek lain.

Pengalaman pekerja sanitasi melalui sembilan bulan pandemi ini dari Maret hingga November 2020 menyoroiti penanganan kota terhadap pandemi ini. Sementara para *safai kamarchis* telah diakui sebagai pekerja garis depan bersama tenaga medis, dengan aksi-aksi seperti memukul piring dan menyalakan lilin, pandangan temporal atas pekerja sanitasi menegaskan kelanjutan peminggiran mereka melalui segmentasi dan pengawasan yang menandai penanganan pemerintah kota atas situasi

yang ada. Ketika infeksi meningkat di seluruh kota, *lockdown* nasional diumumkan, dan layanan kereta lokal ditangguhkan mulai tengah malam 22 Maret, karena pejabat takut hal ini akan menyebabkan penyebaran virus.

Hal ini secara langsung berdampak pada mobilitas pekerja sanitasi. Dalam kendali terbuka atas tenaga kerja dan proses kerja oleh pemerintah kota, mereka diperingatkan agar tidak mengambil cuti karena BMC mengerahkan semua sumber dayanya untuk memerangi penyebaran virus. Tidak masuk bekerja berarti kehilangan upah. *Kachra Vahatuk Shramik Sangh* dalam pemberitahuannya kepada Komisaris Kota Mumbai mengeluhkan bahwa mereka tidak diberikan masker, sarung tangan, seragam, sepatu, dan sabun atau pembersih yang layak (Dhupkar, 2020). Namun demikian, Ashok Yamgar, Insinyur Kepala, menegaskan bahwa kontraktor telah diinstruksikan untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan jika mereka tidak melakukan hal tersebut, pekerja perlu mengadukannya ke tingkat kelurahan. Menarasikan kondisi kerja mereka selama pandemi, Shankar Kunchikorwe, yang wilayah pelayanannya di Dharavi, mengatakan bahwa, “ada enam pekerja di setiap kendaraan yang membawa limbah. Perlengkapan seperti keranjang besi dipakai oleh dua orang di lapangan. Para pekerja berada dalam risiko serius dan BMC harus berpikir untuk melindungi kami...” (Dhupkar, 2020). Selama periode ini, BMS mengadopsi mekanisme yang secara historis dapat digunakan untuk mengelola pandemi di kota—komando dan kendali untuk menuntut kehadiran pekerja dan terus tidak menyediakan alat pelindung.

Pada April, sudah ada beberapa diskusi seputar risiko pekerja sanitasi dan pemulung dari ‘limbah medis yang tidak bertanda’—masker, sarung tangan, dan tisu yang dibuang, dan lain-lain—dari rumah di mana pasien COVID-19 dikarantina. Meski pedoman dikeluarkan oleh Dewan Pengendali Polusi Pusat (*Central Pollution Control Board, CPCB*) tentang cara memilah limbah di sumbernya (Mallapur, 2020). Para penduduk mengatakan mereka bahkan tidak sadar akan kebutuhan segregasi di rumah mereka sendiri.

“Para penduduk mengatakan bahwa mereka bahkan tidak menyadari perlunya pemilahan sampah di rumah mereka. ‘Begitu menakutkan untuk menyentuh limbah medis yang digunakan sehari-hari karena takut saya dapat tertular penyakit juga. Maka kami mencoba untuk meletakkan semua di dalam satu tas dan memberikannya ke BMC karena mereka tahu bagaimana cara terbaik untuk memilahnya,’ kata seorang ibu berusia 44 tahun dari Jijamata Nagar, sebuah zona pembatasan di Worli Mumbai, yang suaminya positif virus Covid-19... Mumbai telah menghasilkan 9 ton limbah Covid-19 dan 6 ton limbah biomedis non-Covid setiap harinya, menurut perkiraan BMC” (Nandi dkk., 2020).

Dengan Mumbai dan Delhi masing-masing memiliki satu instalasi pembakar sampah (*incinerator*) dan total 200 fasilitas seperti ini di India, ada kemungkinan bahwa limbah ini akan harus diangkut ke negara bagian tetangga untuk diproses. Skala penimbunan limbah biomedis di kota metropolitan besar seperti Mumbai dan pengelolaannya menjadi tantangan yang muncul.

Dengan ‘kota bakteriologis’ menjadi terlihat, kendali atas pekerjaan harus dilaksanakan untuk menangani ini semua. BMC saat itu telah menginstruksikan pekerja sanitasinya untuk bekerja secara rotasi dengan 50 persen staf bekerja selama *lockdown*. Upah tambahan sebesar Rs300 per hari untuk transportasi dan uang makan juga diumumkan. Namun, tidak ditentukan apakah ini akan berlaku untuk pekerja kontrak dan juga tidak jelas apakah pekerja akan dibayar untuk hari non-kerja alternatif yang mereka diminta untuk pertahankan. Bulan Mei, terungkap kasus pekerja sanitasi yang positif Covid dan tanpa sengaja menularkan ke istrinya, dan pada bulan April istrinya pada akhirnya ditemukan. Pada bulan April, ia menyerah pada virus mematikan ini (Kumbhare, 2020). Tidak adanya ruang yang cukup di rumah membuat semakin sulit menjaga jarak dan pencegahan lain. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga menerbitkan surat edaran yang menetapkan bahwa pekerja sanitasi dan yang lainnya harus diberikan perangkat APD. Baburao, seorang pekerja kontrak, menyatakan bahwa mereka diberikan APD hanya ketika mereka menolak bekerja, dan mereka disuruh untuk mencuci APD tersebut di rumah dan menggunakannya kembali ketika bekerja. Serikat mereka memprotes dengan alasan bahwa pekerja

ja tidak memiliki ruang dan sumber daya untuk mencuci dan merawat APD tersebut; mereka menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab BMC, yang akhirnya disetujui. Di sebuah laporan televisi, disinggung bahwa bahkan pada masa bukan pandemi, setiap pekerja hanya diberikan satu batang sabun oleh Pemerintah Kota (Meshram dan Bisht, 2020). Kurang memadainya penyediaan perlindungan bagi para pekerja yang secara konsisten bekerja dan kondisi rentan terinfeksi virus mematikan ini amat nyata.⁹

Hirarki di antara pegawai kota sangat mencolok di mana pekerja sanitasi adalah karyawan Kelas IV di anak tangga terbawah, dan pekerja sanitasi kontrak bahkan lebih rendah lagi statusnya dan tidak diakui sebagai pegawai kota. Walaupun sangat sentral kontribusinya di masa pandemi, tubuh pekerja ini diperlakukan sebagai figur marjinal dalam mesin yang menjalankan kota. Pada bulan-bulan awal pandemi ini, kita melihat munculnya situs diskursif SWM yakni; pertama ruang kebijakan dengan lembaga pemerintah (MCGM, CPCB) di bagian tengah; kedua timbulan limbah, yang mencapai signifikansi dalam hal jumlah dan sifat limbah, khususnya limbah medis; ketiga, segmentasi kawasan kota ke dalam zona pembatasan, rumah sakit, dan zona non-pengendalian yang masing-masing menandakan tingkat ketakutan, kehati-hatian, stigma, dan mekanisme penanganan limbah; keempat, tubuh pekerja yang menangani limbah dengan kedekatannya pada limbah dan virus. Ruang pertama digunakan oleh negara untuk memperluas kendalinya atas yang lain; yang kedua adalah konseptual dan berkenaan dengan pelacakan dan perencanaan pengelolaan sampah di tingkat kota; pengawasan oleh negara bagian secara langsung mencapai ke ruang ketiga dan keempat di mana sampah dihasilkan. Virus ini dapat menyebar dan tubuh penduduk, praktisi medis, dan pekerja sanitasi paling dekat dengan virus ini.

Ketika pejabat departemen SWM di kelurahan G-North menyampaikan jadwal pengumpulan sampah harian bulan Juni, salah satu pengumpul sampahnya menjadi khawatir. Di awal bulan, pria berusia 32 tahun ini ditugaskan, bersama dua pekerja kota lainnya, untuk mengumpulkan sampah dari zona pembatasan di blok 119—kumpulan sembi-

⁹ Lihat Meshram and Bisht (2020).

lan area di Dharavi, salah satu kawasan kumuh terbesar di Asia yang mengalami ledakan pandemi virus Corona yang parah—dan memuatnya ke dalam kendaraan yang akan membawa limbah biomedis tersebut ke satu-satunya fasilitas pengolahan di kota yang terletak bersebelahan dengan lokasi pembuangan Deonar. “Ketakutan terjangkit virus ini tak pernah hilang dari benak kita,” kata pekerja sanitasi tersebut yang tidak mau disebutkan namanya karena dia tidak diperkenankan bicara dengan media. “Tapi kerja ya kerja, dan harus dilakukan.” Pekerjaannya sangat berisiko, karena seringkali penghuni zona pembatasan tidak memilah sampah yang mereka hasilkan menjadi sampah biomedis berbahaya (kantong kuning) dan sampah rumah tangga (kantong hitam). “Meski penduduk diberikan kantong berwarna kuning dan hitam, kita terus menerima satu kantong setiap harinya dengan segala jenis sampah yang bercampur aduk termasuk masker, sarung tangan, kulit pisang, gaun dan kantong plastik yang bocor,” kata pekerja tersebut. “Sangat menakutkan ketika warga melemparkan kantong berwarna hitam ke dalam tempat sampah besar di atas batas tertutup zona pembatasan ke arah kami.” ... BMC setuju bahwa pekerja di 46 pusat pemilahan sampah berisiko... sebagian dari limbah ini juga menuju ke tempat pembuangan sampah akhir kota di mana para pekerja dites positif Covid-19 dan pulih Chatterjee and Pillai, 2020).

Segmentasi kota dan demarkasi zona pembatasan menciptakan narasi perlakuan khusus oleh pihak berwenang, dan ketakutan dan jarak yang diperlukan oleh orang lain. Keharusan biopolitik mendorong pekerja ke dalam kontak terdekat dengan limbah dan virus yang tidak terlihat, sementara tujuan para aktor yang membuat kebijakan, dan pada zona pembatasan dan zona lainnya adalah untuk menjauhkan diri dari hal ini secepat mungkin.

Pada bulan Agustus, *safai karmachari* kontrak menemukan bahwa mereka tidak memiliki akses terhadap fasilitas air dan toilet di salah satu tempat mereka bekerja. Fasilitas-fasilitas ini baru diberikan setelah serikat buruh turun menangani masalah ini. Pekerja dari salah satu kelurahan mengadu ke Komisioner Tenaga Kerja tentang tidak dibayarnya upah minimum mereka dan ditolaknya mereka untuk bekerja oleh petugas BMC dan kontraktor. Kontrol dan hukuman digunakan untuk

mendisiplinkan pekerja dan mengatur mereka. Pada September, kasus Ashok Taare, terungkap. Ia tidak diperbolehkan cuti ketika dia sakit dan kemudian meninggal akibat dugaan infeksi COVID-19. Ia sudah menjadi pekerja kontrak bertahun-tahun dan mendapatkan status permanen di bawah BMC akibat gugatan hukum yang diajukan oleh serikat buruh. Ketika *mukadam* dari *chowki*-nya terjangkit COVID-19, mereka menutup *chowki* dan meminta semua pekerja pindah ke tempat lain dalam area yang sama. Seminggu kemudian, Ashok mulai merasa tidak enak badan dan meminta izin sakit (setelah tidak pernah mengambil sama sekali dari 21 hari cuti yang menjadi haknya), dan tes kesehatan. Cutinya ditolak karena setiap pekerja diharuskan bekerja. Ia lanjut bekerja dan akhirnya meninggal pada akhir Mei. Rekan kerja Ashok mencuci dan menggunakan kembali maskernya. Serikat pekerja menyuarakan keprihatinan mereka dengan membentuk rantai manusia di beberapa bagian kota Shinoli, 2020).

Setiap insiden menunjuk pada hubungan konfliktual antara negara dengan pekerja yang ditandai oleh resistensi dari kedua belah pihak, dan keengganan negara untuk bertanggung jawab penuh atas buruh kontrak dan menegaskan bahwa yang harus berurusan dengan hal ini adalah kontraktor. Dalam menganalisis relasi ini, terlihat betapa banyak yang belum berubah selama masa pandemi ini.

KESIMPULAN

Empat ruang, yakni kebijakan, limbah, zona geografis, dan pekerja; melalui fungsi 'praktik spasial'-nya memungkinkan akumulasi dan ekspansi kepentingan kapital (Harvey, 1990). Tidak tersedianya hak untuk pekerja sanitasi—upah dan alat pelindung diri, air dan sanitasi di tempat kerja, cuti sakit berbayar, akses ke layanan kesehatan, antara lain—adalah cara bagaimana rezim kontrak berkembang dan margin keuntungan untuk kontraktor meningkat ketika mereka tidak memenuhi persyaratan upah minimum dan pemberian alat pelindung. Pandemi ini menghasilkan perluasan ruang-ruang akumulasi; sekarang ini, perluasan ruang ini diperkirakan akan berlangsung selama pandemi berlangsung—melalui segregasi (fasilitas karantina) dan segmentasi (demarkasi dan zona pembatasan) area kota, dan pengerahan yang pekerja yang terkontrol. Dalam pengelolaan pandemi bulan-bulan ini, em-

pat ruang diskursif ini menjadi terjalin erat—secara vertikal dan hirarkis maupun secara horizontal dan bergabung satu sama lainnya. Kebijakan dan pedoman ditegakkan dan menentukan jadwal harian pekerja sanitasi tersebut, ranah geografis tempat mereka berinteraksi melalui tugas pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan sampah. Sifat zona kota menentukan kuantitas dan jenis sampah yang harus ditangani pekerja. Sampah sendiri tidak memiliki agensi, namun merupakan hasil determinan ekonomi, sosial, dan epidemiologis dari orang-orang di dalam kawasan tersebut; ini bisa menjadi pembawa virus dan menyebarkan penyakit dan, karena itu, sarat dengan sifat-sifat yang menimbulkan ketakutan, rasa jijik, stigma, keraguan dan dorongan untuk menjauh darinya. Pekerja sebagai subyek yang dipengaruhi oleh tiga ruang lainnya berperan sentral dalam pencegahan dan pengendalian virus, terlibat dalam persamaan biopolitik dengan ruang-ruang ini, dan berada dekat dengan limbah dan virus, menjadi penjelmaan dari apa yang paling ditakuti. Namun, jarak dan pemisahan dari tempat kerja, yang disimbolisasi oleh alat pelindung, sangatlah diperlukan untuk dapat melakukannya. Pandemi ini muncul sebagai perluasan ruang untuk mengontrol pekerja dengan proses kerjanya, dan untuk akumulasi.

Meski keyakinan bahwa kotoran dan sanitasi yang buruk adalah faktor utama dalam wabah dan penyebaran epidemi; penyakit mendominasi wacana di masa kolonial India, pandemi saat ini memiliki sedikit korelasi dengan konsepsi sebelumnya. Otoritarianisme dalam menangani kesehatan publik yang muncul pada awal abad ke-20 melemah dalam beberapa dekade setelahnya dengan medikalisasi yang dialaminya. Akan tetapi, rumah-rumah petak dengan ventilasi buruk, sesak, dan sanitasi buruk di kota Mumbai tempat pekerja migran bermukim tentunya dianggap sebagai pembawa wabah karena ketidakmampuan mereka untuk menjaga protokol sanitasi, kebersihan, jarak dan isolasi.

Pekerja sanitasi yang memikul beban besar dari pandemi ini dan protokol pengendaliannya, pada akhirnya membayar mahal dari segi keselamatan, keamanan, dan sangat rentan terhadap penyakit dan kematian. Mereka menanggung beban bertarung melawan pandemi dengan merisikokan kesehatan dan kehidupan mereka. Tak hanya itu, mereka juga terjebak dalam perangkat neoliberalisme yang membuat mereka te-

tap menjadi pekerja kontrak, dan masyarakat membuat mereka menjadi kaum marjinal. Di dalam proses pengendalian penularan dan penyakit menular, yang paling rentan dan berisiko ada di pinggiran pengelolaan epidemiologi. Pengelolaan kesehatan publik yang memberi keutamaan pada pendekatan penegakan hukum dan ketertiban untuk memastikan *lockdown*, penjagaan jarak, isolasi, pembatasan, dan lain-lain telah berkontribusi pada apa yang oleh *The Economist* disebut sebagai '*coronopticon*',¹⁰ dengan pengumpulan data, pelacakan, dan pengawasan sebagai inti dari pengelolaan pandemi. Seiring pertarungan melawan pandemi masuk ke ruang virtual, di masa depan, jawaban baru atas pertanyaan tentang siapa 'pejuang garis depan' epidemiologis, dan apa ketentuannya untuk dapat disebut begitu, akan muncul. Untuk pengalaman tahun 2020 ini, pertarungan dan perangnya ada di lapangan yang di tengahnya ada pekerja sanitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (2000). Spectral Housing and Urban Cleansing: Notes on Millennial Mumbai. *Public Culture* 12(3), 627-651.
- Arnold, D. (1993). *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India*. University of Chicago.
- Arnold, D., & Bongiovi, J. R. (2012). Precarious, Informalizing and Flexible Work: Transforming Concepts and Understandings. *American Behavioral Scientist*, 20(10), 1-20.
- Barrett, R., & Brown, P. J. (2008). Stigma in the Time of Influenza: Social and Institutional Responses to Pandemic Emergencies Source. *The Journal of Infectious Diseases*, 197(S1), s34-s37.
- Chatterjee, B., & Pillai, S. (2020, Juni 23). Fear of coronavirus stalks the sanitation workers. *Hindustan Times*. <https://www.hindustantimes.com/india-news/fear-of-virus-stalks-sanitationworkers/>

¹⁰ "Countries are using apps and data networks to keep tabs on the pandemic," *The Economist*, Maret 26, 2020, <https://www.economist.com/briefing/2020/03/26/countries-are-using-apps-and-data-networks-to-keep-tabs-on-the-pandemic>.

- Chatterjee, P. (2004). *The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World*. Permanent Black.
- Chhabria, S. (2019). *Making the Modern Slum: The Power of Capital in Colonial Bombay*. University of Washington Press.
- Condon, J. (1900). *The Bombay Plague: Being a History of the Progress of Plague in the Bombay Presidency*. The Education Society Steam Press.
- Countries are using apps and data networks to keep tabs on the pandemic (2020, Maret 26). *The Economist*. <https://www.economist.com/briefing/2020/03/26/countries-are-using-apps-anddata-networks-to-keep-tabs-on-the-pandemic>.
- Dasgupta, M. (2005, Desember 3-9). Public Health in India: Dangerous Neglect. *Economic and Political Weekly*, 40(49), 5159-5165.
- Deshpande, T. (2020, September 3). Mumbai's COVID-19 Waste Peaks, Second Waste Treatment Plant Not in Sight. *Science The Wire*. <https://science.thewire.in/environment/mumbais-covid-19-waste-peaks-second-waste-treatment-plant-not-in-sight/>
- Dhupkar, A. (2020, Maret 19). Diakses dari "6,500 safai workers demand protective gear": <https://mumbaiirror.indiatimes.com/coronavirus/news/6500-safaiworkers-demand-protective-gear/articleshow/74701262.cms>
- Donaldson, D., & Kensington, D. (2016). Dynamics of a Malthusian Economy: India in the Aftermath of the 1918 Influenza. *Semantic Scholar*.
- Duggal, R. (2020). Mumbai's Struggles with Public Health Crises, From Plague to Covid-19. *Economic and Political Weekly*, 55(21), 17-20.
- Foucault, M. (2008). 'Panopticism' from 'Discipline & Punish: The Birth of the Prison'. *Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts*, 2(1), 1-5.
- Füller, H. (2016). Pandemic cities: biopolitical effects of changing infection control. *The Geographical Journal*, 182, 342-352.

- Gandy, M. (2006). *The Bacteriological City and Its Discontents. Historical Geography, 34.*
- Harvey, D. (1990). *The Condition of Postmodernity: An enquiry into the Origins of Cultural Change.* Blackwell.
- Hassan, R. (2020). *The Condition of Digitality: A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life.* University of Westminster Press.
- India Sanitary Commissioner. (1920). *Annual Report of the Sanitary Commissioner with the Government of India for 1918.*
- Jha, M. K., Shajahan, P. K., & Vyas, M. (2013). Biopolitics and Urban Governmentality in Mumbai. Dlm. S. Mezzadra, J. Reid & R. Samaddar (Peny.), *Biopolitics of Development: Reading Michael Foucault in the Postcolonial Present* (hal. 45-65). Springer India.
- Kidambi, P. (2001). Housing the Poor in a Colonial City: The Bombay Improvement Trust 1908-1918. *Studies in History, 17*(1), 57-59.
- Kumar, S. (2008). Assessment of the status of municipal solid waste management in metro cities, state capitals, class I cities, and class II towns in India: an insight. *Waste Management, 29*(2), 883-95.
- Kumbhare, S. (2020, Mei 6). Sanitation Workers: At the Bottom of the Frontline Against COVID-19? *The Wire*. <https://thewire.in/urban/sanitation-workerscovid-19>.
- Mallapur, C. (2020, April 9). Sanitation Workers at Risk From Discarded Medical Waste. *IndiaSpend*. <https://www.indiaspend.com/sanitation-workers-at-risk-from-discarded-medicalwaste-related-to-covid-19/>
- Mamtani, R., & Cimino, J. A. (1992). Work Related Diseases Among Sanitation Workers of New York City. *Journal of Environmental Health, 55*(1), 27-29.
- Masselos, J. (1982). Jobs and Jobbery: the sweeper in Bombay under the raj. *The Indian Economic and Social History XIX*(2).
- Maharashtra, M. (2020, Mei 22). Safai Karmachariyane Corona Hoat Nahi ka? *Facebook*, siaran langsung pada Maret 18, 2020 <https://www.facebook.com/603597919798100/>

videos/207370570356010embedded dalam M. S. Meshram & R. Bisht, *The Coronapocalypse and Sanitation Workers in India. The Wire*. <https://thewire.in/rights/the-coronapocalypse-and-sanitation-workers-in-india>.

- McFarlane, C. (2008). Sanitation in Mumbai's informal settlements: state, 'slum', and infrastructure. *Environment and Planning A*, 40(1), 88–107.
- Meshram, M. S., & Bisht, R. (2020). The Coronapocalypse and Sanitation Workers in India. *The Wire*. <https://thewire.in/rights/the-coronapocalypse-and-sanitation-workers-in-india>.
- Mukherjee, R. (1919). Phases of Slum life in India. *The Modern Review*, 291-292.
- Nandi, J., Chatterjee, B., & Pillai, S. (2020, Juni 23). India stares at biomedical waste crisis. *Hindustan Times*. <https://www.hindustantimes.com/india-news/india-stares-at-biomedical-wastecrisis/>
- Parthasarathy, D. (2015). Informality, Resilience, and the Political Implications of Disaster Governance. *Pacific Affairs*, 88(3), 567.
- Patton, C. (2011). Pandemic, Empire and the Permanent State of Exception. *Economic and Political Weekly*, 46(13), 105.
- Pethe, A., Gandhi, S., & Tandel, V. (2011). Assessing the Mumbai Metropolitan Region: A Governance Perspective. *Economic and Political Weekly*, 46(2), 187-195.
- National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, Government of India. (2007). Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector. http://dcmsme.gov.in/Condition_of_workers_sep_2007.pdf.
- Risbud, N. (2003). Summary of City Case Studies: Mumbai. Dlm. UN-Habitat, *The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements, United Nations Human Settlement Program* (hal. 195-229).

- Sarkar, A. (2014). The Tie That Snapped: Bubonic Plague and Mill Labour in Bombay, 1896–1898. *International Review of Social History*, 59, 181-214.
- Shinoli, J. (2020, September 29). Ashok Taare: Denied leave, departs permanently. *Rural India Online*. <https://ruralindiaonline.org/en/articles/ashok-taaredenied-leave-departs-permanently/>
- Srivastava, P. (2012). *Creating a Healthy and 'Decent' Industrial Labor Force: Health, Sanitation, and Welfare in Colonial Bombay, 1896–1945*. University of Cincinnati.
- Subbaraman, R., & Murthy, S. L. (2015). The right to water in the slums of Mumbai, India. *Bulletin of the World Health Organization*, 93.
- Verma, G. (2002). *Slumming India: A Chronicle of Slums and Their Saviours*. Penguin Books.
- Vyas, M. (2009). Unionization as a Strategy in Community Organization in the Context of Privatization: The Case of Conservancy Workers in Mumbai. *Community Development Journal*, 44(3), 320-335.
- Zérah, M.-H. (2008). Splintering urbanism in Mumbai: Contrasting trends in a multilayered society. *Geoforum*, 39, 1922–1932.

POLITIK PERGERAKAN KIRI YANG DIPIMPIN KELAS MENENGAH DI FILIPINA^{1*2}

Teresa S. Encarnacion Tadem³

ABSTRAK

Esai ini membahas mengenai bagaimana komposisi kelas menengah dalam kepemimpinan Partai Komunis Filipina (*Communist Party of the Philippines – CPP*), sayap militer mereka Tentara Rakyat Baru (*New People's Army – NPA*) dan kendaraan politik mereka, Front Nasional Demokratik (*National Democratic Front – NDF*) mendefinisikan arah gerakan revolusioner pada masa darurat militer di mana perjuangan bersenjata dilengkapi dengan strategi yang membutuhkan kemampuan dan kecakapan kelas menengah. Hal ini mencakup pembentukan front bersatu melawan kediktatoran terkait isu-isu yang bukan isu kelas, seperti lingkungan, isu perempuan, hak masyarakat adat, serta perjuangan bangsa Moro. Akan tetapi, perdebatan internal Partai mengemuka dan menyebabkan perpecahan dalam Partai pada 1992. Dalam periode pasca-darurat militer, mereka yang meninggalkan Partai melanjutkan advokasi melalui pembentukan pergerakan dan organisasi masyarakat sipil (CSO) Kiri. Strategi berorientasi kelas menengah oleh pergerakan Kiri telah membantu mendorong proses demokratisasi, namun ada juga keterbatasan besar soal seberapa jauh pergerakan yang dipimpin kelas menengah Kiri mampu menghasilkan perubahan struktural secara radikal dalam masyarakat.

1* Tulisan ini diambil dari publikasi lampau, Tadem, Teresa S. Encarnacion. "The Politics of a Middle-Class-Led Movement in the Philippines". 2020. *Thinking With and Beyond Marx: Critical Essays on Politics, History and Art. Volume I*. Diterbitkan sebagai Peringatan 200 Tahun Kelahiran Karl Marx. Tadem, Eduardo C. and Honey B. Tabiola. Editor. University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies (UPCIDS) Program Alternative Development (AltDev). *UP CIDS Public Policy Monograph Series*, Quezon City: University of the Philippines Center for Integrative and Development Studies, hal. 105-122.

2 Bagian pasca-darurat militer (1986-saat ini) dari artikel ini disadur dari buku penulis, "The Middle-Class-Led Left Movement in Civil Society's Role in the Philippines' Democratization Process," dalam Hsin-Huang Michael Hsiao, ed., *Middle Class, Civil Society and Democracy in Asia* (2019). London dan New York: Routledge Taylor & Francis Group, hal. 81–101

3 Teresa S. Encarnacion Tadem adalah Profesor Political Science, College of Social Sciences and Philosophy (CSSP), University of the Philippines Diliman (UPD), Manila. Dapat dihubungi melalui tetadem@up.edu.ph.

Kata-kata Kunci: Filipina, kelas menengah, gerakan kiri, perjuangan masyarakat sipil, agenda pembangunan liberal

PENDAHULUAN

Secara umum, kelas menengah Filipina dipandang sebagai komponen penting dalam proses demokratisasi negara, terutama peran mereka dalam Revolusi *People Power* 1986 yang menggulingkan kediktatoran Marcos. Mereka melanjutkan peran ini selama periode pasca-darurat militer dalam menantang aturan oligarki yang melanggengkan pemiskinan dan memperlebar jurang sosio-ekonomi di Filipina. Ruang penting di mana kelas menengah mengekspresikan oposisi terhadap status quo tersebut adalah melalui gerakan Kiri Filipina, seperti Partai Komunis Filipina (*Communist Party of the Philippines – CPP*), sayap militer mereka Tentara Rakyat Baru (*New People’s Army – NPA*) dan kendaraan politik mereka Front Nasional Demokratis (*National Democratic Front – NDF*) atau CPP-NPA-NDF. Akan tetapi, belum banyak penelitian mengenai peran yang dimainkan oleh kelas menengah dalam CPP-NPA-NDF.

Oleh karena itu, bagian pertama dari penelitian ini membahas peran yang dimainkan kelas menengah dalam kemunculan dan evolusi CPP-NPA-NDF. Bagian ini akan fokus pada bagaimana CPP-NPA-NDF yang dipimpin kelas menengah mendefinisikan arah yang diambil gerakan revolusioner selama periode darurat militer (1972-1986) yang melengkapi perjuangan bersenjata dengan strategi yang membutuhkan kemampuan dan kecakapan kelas menengah. Ini mencakup pembentukan front bersatu dengan kaum terpinggirkan serta kelompok elit di masyarakat melawan kediktatoran melalui berbagai formasi seperti koalisi sektoral dan organisasi non-pemerintah (NGO).

Di sisi lain, bagian kedua akan fokus pada pergerakan Kiri yang dipimpin oleh faksi kelas menengah yang berpisah dari CPP-NPA-NDF, yakni para “RJ” atau “*rejectionists*” (para penolak) selama periode pasca-darurat militer setelah 1986. Bagian ini akan mendalami strategi-strategi kelas menengah gerakan Kiri ini dalam kancah masyarakat sipil terutama melalui kerja pembangunan NGO, pembentukan jejaring masyarakat sipil untuk mendorong advokasi mereka pada tingkat lokal

dan global, pelibatan dengan pemerintah, kolaborasi dan partisipasi dalam politik elektoral untuk mendorong proses demokratisasi di Filipina.

Oleh karena itu sangat penting untuk secara jelas menentukan kelas menengah ini siapa. Kelas menengah secara umum didefinisikan sebagai kelas menengah lama (*old middle class* – OMC) dan kelas menengah baru (*new middle class* – NMC). “C. Wright Mills mendeskripsikan kelas menengah lama yang terdiri atas pengusaha kecil, penjaga toko, petani dan pekerja profesional sebagai independen dari kendali ekonomi dan politik. Para pengusaha kecil ini tidak ada di bawah siapa pun—mereka adalah bos untuk diri mereka sendiri dan berurusan dengan pelanggan mereka sendiri” (Glassman, 1995, hal. 161). Akan halnya kelas menengah baru, bagi C. Wright Mills, baru muncul setelah Perang Dunia II seiring ekonomi kapitalis industrial teknokratik-birokrat yang baru (Glassman, 1995, hal. 161). Bagi Mills, ini adalah masa ketika “jajaran profesional mulai tumbuh pesat dengan peningkatan tajam jumlah guru sekolah dan akademisi, ilmuwan, dokter, perawat, psikolog, dsb.” (Glassman, 1995, hal. 163).

Sedangkan kelas menengah di negara Dunia Ketiga seperti Filipina dipandang sebagai “kelas menengah baru”, yakni “terdiri dari para pegawai perusahaan besar yang bergaji serta para birokrat pemerintah – manajer, teknisi dan pekerja layanan” (Glassman, 1995, hal. 350). “Bersamaan dengan kelas menengah baru tersebut banyak negara berkembang juga mempunyai kelas menengah komersial yang berkembang berupa para pengusaha kecil dan penjaga toko. Kelas menengah komersial sering terhubung dalam ekonomi korporasi asing sebagai perantara atau pedagang” (Glassman, 1995, hal. 351).

Giddens, di sisi lain, membedakan kelas menengah dari borjuis berdasarkan kapasitas pasar: kepemilikan properti vs. kepemilikan kualifikasi (Robison & Goodman, 1996, hal. 8-9). Maka dari itu, komposisi kepemimpinan kelas menengah CPP-NPA-NDF sebagian besar terdiri dari siswa dan profesional dengan latar belakang keluarga yang dapat diidentifikasi dengan kelas menengah lama atau kelas menengah baru; dan mereka terdidik. Mereka bukan buruh tani ataupun pekerja.

KELAS MENENGAH DALAM POLITIK KIRI SELAMA PERIODE PRA-DARURAT MILITER (1972-1986)

Latar belakang kelas menengah kepemimpinan CPP-NPA-NDF dapat disandingkan dengan elit penguasa politik Filipina pada masa pra-darurat militer yang basis kekayaannya adalah kendali atas tanah yang sangat luas yang biasanya disebut *haciendas*. Hal tersebut menjadi landasan untuk pembangunan oligarki mereka yang paling jelas tergambar oleh dominasi dinasti-dinasti politik. Hasilnya adalah kemunculan aparat negara yang tunduk pada kelas oligarki berkuasa yang “menikmati basis ekonomi independen di luar dari negara dengan mesin politik mereka sebagai sarana utama untuk akumulasi pribadi” (Hutchcroft, 1998, hal. 12, dikutip dalam Tadem, 2019a, hal. 82).

“Situasi seperti itu menghasilkan kegelisahan agrarian di pedesaan yang menyebabkan berdirinya Marxist-Leninist Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) atau Partai Komunis Filipina pada 7 November 1930. Konstituen penting dari PKP adalah sektor pemuda yang sebagian besar merupakan kelas menengah yang berkonsolidasi ketika mereka mengorganisasikan Kabataang Makabayan (KM – Pemuda untuk Nasionalisme) pada tahun 1964. Karena perbedaan ideologi dengan kepemimpinan PKP, KM pecah dari PKP dan membentuk Partai Komunis Filipina baru (new Communist Party of Philippines – CPP) yang dibentuk pada tahun 1968. Partai yang “didirikan kembali” atau CPP baru ini terinspirasi Marxis-Leninis-Maois. Sedangkan asal muasal kelas menengah dari anggota pendiri CPP yang baru, pemimpin pendiri mereka Jose Ma. Sison datang dari klan pemilik tanah kecil. Dari 13 anggota pendiri partai komunis baru tersebut, 10 orang berasal dari keluarga kelas menengah” (Daroy, 1988, hal. 19 dikutip dalam Tadem, 2019a, hal. 82)

Mengingat krisis ekonomi 1970-an, retorika anti-nasionalis dan anti-imperialis dari CPP baru menarik kader-kader inti awal selama tahun-tahun permulaan mereka yang nyaris seluruhnya adalah mahasiswa dan kelompok intelektual dari keluarga kelas menengah yang terutama datang dari University of the Philippines (UP) (Rivera, 2001, hal. 234-235 dikutip dalam Tadem, 2019a, hal. 82).

Menurut Ricardo Reyes (2016), seorang mantan pemimpin CPP, walaupun pendiri CPP baru sebagian besar datang dari kelas menengah

dan menengah-atas, anggota Kongres Pendirian Pertama CPP yang dilaksanakan pada 26 Desember 1968 sebagian besar adalah pekerja dan buruh tani. Alasannya adalah Sison mampu menarik pekerja dan buruh tani yang kecewa dan meninggalkan PKP (Reyes, 2016, dikutip dalam Tadem, 2019a, hal. 82).

Dengan deklarasi darurat militer oleh Presiden Ferdinand E. Marcos pada 21 September 1972, anggota kelas menengah dan menengah atas KM bergerak di bawah tanah dan memegang kepemimpinan organisasi-organisasi regional CPP. Ketika sidang pleno CPP-CC diselenggarakan tahun 1978, sidang tersebut sebagian besar terdiri dari anggota dari keluarga kelas menengah (Reyes, 2016). Kepemimpinan CPP-NPA-NDF pada dasarnya adalah satu dan sama (Reyes, 2016).

Perkembangan ini bagi Reyes menghasilkan perubahan keanggotaan Komite Sentral CPP (CPP-CC) 1968–1971 saat partai menjadi sebagian besar kelas menengah. Ia mencatat bahwa dari semua anggota CPP-CC selama periode ini, hanya tiga yang datang dari latar belakang buruh tani, seperti Bernabe “Dante” Buscayno, pendiri *New People’s Army* (NPA), serta dua orang dari keluarga buruh tani. Menurut Reyes, sejumlah anggota kelas menengah CPP ini, yang akhirnya menjadi anggota CPP-CC, adalah pemilik tanah kecil. Namun ia mengamati bahwa tanah mereka bukanlah sumber kekayaan mereka karena mereka cenderung adalah pekerja profesional.⁴ Menurut Reyes, ada pula mahasiswa dari latar belakang buruh dan kelas pekerja yang datang dari UP dan bergabung dengan CPP pada masa ini. Ia mengamati bahwa masuknya mereka ke UP difasilitasi oleh kebijakan universitas yang memberikan lima peringkat teratas lulusan dari setiap sekolah menengah atas negeri

⁴ Hal ini bisa jadi serupa dengan fenomena Pekerja Filipina di Luar Negeri (*Overseas Filipino workers* – OFWs) yang datang dari kelas bawah dan menengah dan keluar negeri sebagai asisten rumah tangga, penghibur, pekerja pabrik garmen, insinyur, pekerja hotel, perawat, dll. yang mampu menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta elit. Kebijakan kolonial Amerika mengenai edukasi negeri untuk massa juga memungkinkan anak dari kelas bawah dan menengah bersekolah di sekolah menengah atas negeri sebagaimana elit bersekolah di sekolah swasta elit. Jose Ma. Sison belajar di Ateneo de Manila College. Sekolah elit lainnya adalah LaSalle dan Universitas Sto. Thomas (USR). Pendirian UP oleh Amerika di tahun 1908 sebagai universitas sekuler untuk menghasilkan pekerja profesional untuk sektor bisnis dan pemerintah juga memberikan titik masuk bagi anak-anak dari kelas bawah dan menengah untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. UP mendorong perkembangan intelektual dan pemikiran sebagai kampus sekuler yang tidak dijalankan oleh ordo religious seperti Ateneo yang dijalankan oleh Jesuit, LaSalle bersaudara yang menjalankan LaSalle dan Ordo Dominikan yang menjalankan UST.

untuk masuk UP, yang memungkinkan mereka dari kelas buruh tani dan pekerja mengalami mobilitas sosial untuk menjadi kelas menengah.

“CPP yang baru menggarisbawahi tiga isu imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat sebagai kerangka berpikir komprehensif untuk analisis situasi Filipina. Ada gejolak nasionalis yang kuat yang mampu memengaruhi perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi, ‘Filipinaisasi’” (Daroy, 1988, hal. 11–13 & 20 dikutip dalam Tadem, 2019a, hal. 82)

STRATEGI KELAS MENENGAH DAN CPP-NPA-NDF SELAMA MASA DARURAT MILITER (1972-1986)

Dengan deklarasi darurat militer oleh Presiden Ferdinand E. Marcos pada 21 September 1972, CPP-NDA-NDF menggunakan berbagai strategi kelas menengah dalam membentuk aliansi dengan berbagai sektor masyarakat Filipina yang mempunyai kekhawatiran dan isu yang sama untuk melengkapi perjuangan bersenjata. Aliansi tersebut diluncurkan secara resmi pada April 1973, ketika CPP secara formal mengorganisasikan Komisi Persiapan Front Nasional Demokratik, “yang akan memimpin dalam pembentukan aliansi luas dari semua kekuatan melawan kediktatoran” (Tiglao, 1988, hal. 62). Upaya ini dilangsungkan bersama berbagai usaha yang sudah berjalan untuk mengorganisasikan sektor-sektor masyarakat yang terpinggirkan.

Usaha ini termasuk mengorganisasikan berbagai aliansi front bersatu dengan yang berikut: Pertama, aliansi dengan berbagai sektor masyarakat yang terpinggirkan, seperti buruh tani dan pekerja yang menghasilkan pembentukan berbagai federasi nasional. Satu contoh terjadi pada Juni 1985 dengan pembentukan gerakan nasional berbasis buruh tani, *Kilusang Magbubukid ng Pilipinas* (KMP) atau Persatuan Buruh Tani Nasional. Federasi-federasi nasional ini akan digunakan sebagai pengungkit posisi tawar dalam pembentukan berbagai aliansi front bersatu yang berorganisasi dengan “kekuatan tengah” yang membentuk perjuangan anti-kediktatoran. Kekuatan tengah ini terdiri dari mahasiswa, pekerja profesional, dan anggota komunitas bisnis. Aliansi front bersatu ketiga adalah dengan berbagai politisi oposisi tradisional dan elit pemilik tanah. Aliansi ini difasilitasi dengan sangat baik oleh isu kapitalisme kroni, seperti monopoli korupsi di tangan Marcos, kroni-kroni serta ke-

luarganya. Korupsi dan kegagalan teknokrat Marcos untuk menciptakan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan, serta utang negara yang melambung, cukup memudahkan terbentuknya front bersatu dengan anggota komunitas bisnis Filipina yang tidak puas dengan keadaan serta berbagai sektor kelas menengah lainnya (Tadem, 2006b, hal. 28)

Berbagai Dimensi Aliansi Front Bersatu yang Dipimpin Kelas Menengah

CPP-NPA-NDF juga mendirikan berbagai aliansi front bersatu dalam isu-isu berikut. Pertama, hak asasi manusia, isu yang muncul selama rezim darurat militer dan diangkat oleh CPP. Isu ini merupakan hasil dari meningkatnya militerisasi di wilayah perdesaan dan tingginya pembunuhan aktivis buruh tani dan pekerja oleh regu-regu pembunuh (Tadem, 2006b, hal. 29). Perjuangan menentang pelanggaran hak asasi manusia juga menarik bagi para pemain dari elit dan kelas menengah dalam masyarakat yang juga mengalami represi rezim darurat militer, khususnya anggota oposisi politik elit yang dipenjara Marcos. Kader CPP yang juga aktif dalam Konferensi Uskup Katolik Filipina (*Catholic Bishop's' Conference of the Philippines* – CBCP), Sekretariat Nasional untuk Aksi Sosial (*National Secretariat for Social Action* – NASSA) dan rekanan-rekanan regional mereka seperti Sekretariat Luzon untuk Aksi Sosial (*Luzon Secretariat for Social Action* – LUSSA), yang salah satu advokasi besarnya adalah perjuangan menentang pelanggaran hak asasi manusia. NDF juga bekerja dengan Gugus Tugas untuk Tahanan dari Tokoh-Tokoh Agama Besar Filipina (*Major Religious Superiors of the Philippines* – AMRSP) untuk melaporkan tentang kejadian pelanggaran hak asasi manusia secara umum dan penyiksaan secara khusus (Wurfel, 1988, hal. 126).

Kedua, perjuangan anti-imperialisme. NDF juga membentuk aliansi dengan anggota oposisi tradisional dan berbagai sektor komunitas basis yang menolak dominasi Amerika Serikat atas ekonomi Filipina berkolusi dengan pemerintah dan elit lokal, yakni kroni-kroni Marcos, yang membentuk usaha patungan dengan perusahaan multinasional (MNC). Aliansi NDF dengan elit lokal juga dibentuk karena adanya oposisi bersama terhadap dukungan IMF/Bank Dunia kepada kediktatoran

Marcos. Aliansi ini difasilitasi oleh anggota-anggota dalam komunitas bisnis yang melihat bantuan finansial yang diberikan IMF/Bank Dunia kepada pemerintah sebagai mendukung rezim yang represif.

Lebih lanjut lagi, para pebisnis ini juga melihat IMF/Bank Dunia lebih mengutamakan MNC daripada bisnis lokal, terutama usaha-usaha kecil dan menengah. NDF kemudian mampu untuk menggunakan semangat nasionalisme dari anggota-anggota masyarakat sipil oposisi yang disamakan dengan perjuangan anti-kediktatoran. Perjuangan seperti ini juga menemukan ekspresinya dalam seruan penutupan pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina, terutama Pangkalan Udara Clark di San Fernando, Pampanga dan Pangkalan Angkatan Laut Subic di Olongapo, Zambales. Pandangan mereka adalah kediktatoran menggunakan pangkalan militer sebagai pengungkit posisi tawar dalam negosiasi untuk mendapatkan bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Lebih lanjut lagi, pendukung keras oposisi nasionalis, seperti Jovito Salonga dan Jose Diokno, juga melihat pangkalan Amerika Serikat sebagai serangan terhadap kedaulatan Filipina, sebuah tuduhan yang sejalan dengan pandangan CPP.

Ketiga, Perjuangan Bangsa Moro. CPP-NPA-NDF juga berusaha untuk membentuk front bersatu dengan Front Pembebasan Nasional Moro (*Moro National Liberation Front*) atau MNLF yang didirikan pada 1974. CPP dan MNLF “mengantisipasi bahwa Marcos akan memperpanjang rezimnya dan bahwa kekuatan militer diperlukan untuk melawan itu” (Tiglao, 1988, hal. 67). Karena hal ini, pada pertengahan 1970-an, MNLF dan sayap militer mereka, *Bangsa Moro Army* dibentuk di bawah kepemimpinan mantan pemimpin mahasiswa radikal Nur Misuari. Misuari merupakan lulusan UP dari studi ilmu politik yang merupakan anggota *Kabataan Makabayan*, sayap pemuda CPP. Saat ia masih berkuliah di UP ia memulai pertemanan dengan Sison. Hingga deklarasi darurat militer tahun 1972, MNLF diam-diam membangun kekuatan militer mereka (Tiglao, 1988, hal. 67). MNLF menggambarkan perjuangan mereka sebagai perjuangan politis, sosio-ekonomi dan juga agama dan masa darurat militer memberikan ruang di mana MNLF dan CPP dapat membentuk persatuan.

Keempat, hak masyarakat adat. Sebuah front bersatu juga dibentuk dengan masyarakat adat yang terusir dari tanah ulayat mereka untuk memberikan jalan bagi MNC, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Sebuah kasus perlawanan yang terkenal adalah proyek Bendungan Sungai Chico di Kalinga Apayao, Luzon Utara yang didanai dengan pinjaman Bank Dunia. Proyek tersebut dianggap mampu menyediakan listrik dan irigasi di daerah sekitar untuk menarik investasi asing. Namun proyek tersebut dilaksanakan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat Kalinga. Hasilnya adalah perlawanan yang keras dari masyarakat adat yang berujung pada kematian pemimpin adat mereka Macli-ing Dulag (de Dios, 1988, hal. 125). Insiden-insiden seperti ini yang memungkinkan NPA untuk merekrut anggota-anggota masyarakat adat yang dirugikan ke dalam organisasi mereka.

Kelima, sektor keagamaan. CPP juga mencoba untuk menguatkan peran sektor keagamaan dalam perjuangan mereka melawan kediktatoran. Salah satu upaya utama mereka adalah pembentukan Umat Kristen untuk Pembebasan Nasional (*Christians for National Liberation*) yang saat itu dipimpin Edicio de la Torre, SVD. CNL mengusung perlunya ada kerjasama Marxis-Kristen (Bolasco, 1994, hal. 125).

Keenam, hak perempuan. NDF selama periode darurat militer juga mengupayakan pengorganisasian gerakan perempuan yang dimulai sekitar periode pra-darurat militer. Seperti yang dicatat "... diskursus feminis mulai diartikulasikan lebih tajam seiring munculnya formasi-formasi perempuan...", termasuk organisasi seperti *Malayang Kilusan* (*Bagong Kababaihan* atau MAKIBAKA (Gerakan Bebas Perempuan Baru), *Katipunan* (*Bagong Kababaihan para sa Kalayaan* (Liga Perempuan untuk Pembebasan) dan GABRIELA (awalnya merupakan singkatan dari *General Assembly for the Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership and Action*, Majelis Umum Perempuan Bersatu untuk Reformasi, Integritas, Kesetaraan, Kepemimpinan dan Aksi) (Santos, 2010, hal. 117).

Terakhir, membentuk aliansi melalui pembentukan NGO pembangunan. Pembentukan NGO pembangunan oleh NDF di pedesaan juga memungkinkan Partai untuk tidak hanya membentuk aliansi dengan masyarakat buruh tani dan nelayan, namun juga merekrut mereka ke dalam gerakan, Sektor-sektor terpinggirkan dalam masyarakat tertarik

terhadap NGO pembangunan ini karena tujuan mereka adalah untuk mengatasi kemiskinan di wilayah-wilayah di mana ND berorganisasi. Upaya ini didukung dengan bantuan pembangunan dari negara-negara donor dan lembaga-lembaga dan NGO asing. Bantuan seperti ini juga dimungkinkan melalui jejaring progresif pemain kelas menengah dalam gerakan Kiri, antara lain, di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang.

Ketegangan dan Perdebatan dalam Upaya Mewujudkan Aliansi Front Bersatu

Bagaimanapun juga, ketegangan dan perdebatan muncul dalam proses mewujudkan aliansi front bersatu yang di antaranya sebagai berikut. Pertama, ketegangan antara anggota NDF dan non-NDF dalam aliansi front bersatu karena berbagai perbedaan sudut pandang. Hal ini terlihat dalam formasi aliansi gerakan anti-kediktatoran luas di mana muncul perbedaan sudut pandang mengenai sifat dari pemerintahan transisi yang diusulkan oleh aliansi ini. Contohnya, dalam gerakan *Justice for all, Justice for Aquino* (JAJA) yang dibentuk pada 1984 setelah pembunuhan mantan senator Benigno Aquino, anggota komunitas bisnis tidak setuju dengan posisi ND untuk menolak semua bentuk intervensi asing di dalam negara (Diokno, 1988, hal. 135).

Usaha besar lain dan yang terakhir untuk mengorganisasikan spektrum oposisi luas di mana NDF menjadi bagian yang penting adalah proses pembentukan *Bagong Alyansang Makabayan* atau BAYAN. Salah satu fungsi besar mereka adalah untuk “menyatukan dan mengkonsolidasi kepemimpinan berbagai organisasi kerakyatan... dan mengadopsi strategi luas dan komprehensif dalam perjuangan yang akan menggabungkan semua bentuk aksi tanpa kekerasan” (Diokno, 1988, hal. 158). Upaya tersebut juga gagal “karena berbagai konsep berbeda mengenai front yang benar-benar bersatu di mana semangat demokrasi, dan bukan sekadar praktik mayoritas mekanis, akan menang” (Diokno, 1988, hal. 161). Satu pandangan yang muncul adalah bahwa para ND, juga disebut sebagai *NatDems* (mewakili CPP-NPA-NDF), terlalu kuat dari segi jumlah dibandingkan dengan blok ideologi lain seperti sosial demokrat (*SocDems*), dan liberal demokrat (*LibDems*), dan bahkan para insan independen (Diokno, 1988, hal. 160).

Kedua yaitu ketegangan di dalam NDF mengenai isu non-kelas. Pelibatan NDF dalam upaya front bersatu yang berfokus pada isu non-kelas juga menghasilkan ketegangan serupa dengan posisi CPP dalam kerja pembangunan NGO. Hal ini paling baik terangkum dalam cara bagaimana Marxisme dipandang oleh partai sebagaimana dinarasikan oleh kader CPP yang terlibat dalam pengorganisasian gerakan perempuan.

“Pemahaman saya mengenai Marxisme terdiri dari beberapa hal, di antaranya adalah: Satu, perjuangan kelas, dan terutama perjuangan kelas pekerja, adalah hal yang utama agar transformasi sosial yang radikal dapat terjadi; dua, kelas pekerja akan harus memimpin revolusi menuju sosialisme; tiga, bahwa kelas penguasa, yakni para borjuis, harus digulingkan bersama dengan antek dan kaki tangannya; empat, bahwa kapitalisme akan mencapai titik kehancuran, dan penggulingannya adalah satu-satunya jalan supaya massa terbebaskan dari berbagai kekangan penindasan; lima, bahwa cara menjelaskan hal tersebut adalah dengan menggunakan “materialisme dialektik” berdasarkan kondisi sosial yang konkret; dan enam, bahwa emansipasi perempuan akan mengikuti emansipasi kelas pekerja. Saya juga belajar bahwa kita harus melewati perjuangan demokratis nasional untuk mewujudkan sosialisme dan pada akhirnya komunisme” (Santos, 2010, hal. 113).

Dengan interpretasi Marxisme oleh CPP ini, isu-isu non-kelas seperti etnisitas sebagaimana digambarkan oleh insurgensi Moro dan perjuangan masyarakat adat, agama dan isu perempuan menjadi sekunder terhadap perjuangan kelas. Ini adalah alasan mengapa CPP tidak bisa sepenuhnya mendukung perjuangan Bangsa Moro. Maka dari itu, walaupun CPP dan MNLF menemukan persatuan dalam perjuangan mereka melawan kediktatoran Marcos, mereka berpisah dalam cara melanjutkan perjuangan ini melalui perjuangan bersenjata. Lebih jauh lagi, perpecahan muncul ketika MNLF menyetujui Kesepakatan Tripoli tahun 1976 yang memfasilitasi perjanjian damai antara MNLF dan pemerintah Filipina. Perjanjian ini ditengahi oleh Muammar Khadafi dari Libya (Tadem, 2006a). Sedangkan masyarakat adat yang ditindas oleh kediktatoran Marcos kemudian tertarik pada perjuangan bersenjata un-

tuk pembebasan nasional, alih-alih untuk emansipasi diri mereka sendiri.

Bagi CNL, interpretasi Marxis oleh CPP ini yang mengecilkan pengaruh agama sebagai isu utama dalam perjuangan melawan kediktatoran dipersalahkan pada “kurang berkembangnya” kategori Marxis dalam menganalisis Gereja. Seperti yang dijelaskan:

“Pemikiran Marxis mengenai Gereja sudah berubah dari memandang Gereja sebagai institusi feodal yang secara langsung mencerminkan kepentingan pemilik tanah menjadi menjelaskan kemunculan Gereja dalam politik oposisi berdasarkan fakta bahwa orang-orang gereja berasal dari kelas yang ditindas oleh “imperialisme, feodalisme dan kapitalisme-birokrat” (Bolasco, 1994, hal. 127)

Kepemimpinan CPP secara umum meyakini bahwa isu-isu non-kelas seperti etnisitas, sebagaimana digambarkan oleh insurgensi Moro, dan juga penderitaan masyarakat adat dan isu perempuan dan lingkungan harus diperlakukan sebagai hal yang sekunder terhadap perjuangan kelas, walaupun anggota Partai lainnya tidak menyetujuinya.

Sementara itu, kerja pembangunan NGO juga diperlakukan sebagai hal yang sekunder terhadap perjuangan politik melawan kediktatoran. Dalam iklim ini, kerja sosio-ekonomi, khususnya proyek konkret yang menciptakan penghidupan, sering tidak dipercaya karena menyita waktu dan tenaga dari upaya anti-fasis, yakni, perjuangan melawan kediktatoran AS-Marcos.

Sifat Perdebatan Kelas Menengah dan Partai

Untuk Reyes (2016), sifat dari perdebatan ini juga terbentuk dari akibat perubahan komposisi Komite Pusat CPP yang sebagian besar menjadi kelas menengah, yakni, kelompok terpelajar dan intelektual. Para pemain kelas menengah ini juga datang untuk menyanggah tanggung jawab kepemimpinan CPP karena mereka memimpin organisasi regional CPP yang pada 1980-an sudah stabil dan terkonsolidasi. Reyes melihat bahwa konsolidasi kepemimpinan kelas menengah di dalam Partai titik baliknya adalah Pertemuan Komite Pusat tahun 1980. Pada masa ini, CPP dipimpin Rodolfo Salas setelah Sison ditangkap pada

1974. Sebagai bagian dari kebijakan Partai, saat satu anggota partai ditangkap, ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari CPP untuk alasan keamanan. Saat anggota partai yang ditangkap tersebut bebas dari penahanan, ia diharuskan menjalani *debriefing* Partai sebelum dapat kembali bergabung dengan Partai. Maka, bahkan jika Sison memberikan perintah dari penjara, tidak hanya kepada para pemimpin organisasi regional CPP atau bahkan kepada publik, perintahnya tidak akan dianggap sebagai garis Partai “resmi”. Karenanya, situasi seperti ini memberi ruang kepada kepemimpinan CPP kelas menengah untuk mendiskusikan dan memperdebatkan kebijakan dan hal-hal yang menjadi keprihatinan utama mereka. Yang juga menonjol dari kepemimpinan Partai adalah mereka didominasi oleh orang UP. Walaupun mereka sadar untuk tidak mempertegas “elitisme UP” tersebut karena dapat menimbulkan ketegangan, fakta ini tetap menonjol (Reyes, 2016).

Satu hal yang perlu dipertimbangkan yaitu peran para intelektual Kiri non-CPP. Menurut Reyes (2016), intelektual Kiri non-CPP juga berkontribusi pada perdebatan yang terjadi dalam Partai. Di antara intelektual Kiri non-CPP ini adalah mereka yang ikut dengan, serta menjadi bagian dari, berbagai kegiatan *Third World Studies Program* (TWSP). TWSP merupakan pusat kajian yang didirikan pada 1976 dan berbasis di *College of Arts and Sciences* (CAS), University of Philippines. TWSP, yang kemudian menjadi Pusat pada 1999, didirikan oleh Rektor CAS Francisco Nemenzo yang sebelumnya meninggalkan PKP saat PKP terpecah pada 1972 menjadi dua faksi, yaitu mereka yang menyerah pada kediktatoran Marcos dan mereka yang menolaknya. Nemenzo adalah bagian dari faksi kedua yang juga menyebabkan pemenjaraannya selama setahun di bawah kediktatoran Marcos. Intelektual Kiri TWSP non-CPP lainnya adalah direktur pertama Program, Randolph “Randy” David. David tidak ikut secara ideologi dengan blok politik sayap kiri mana pun. Nemenzo dan David dapat diterima oleh intelektual Kiri CPP dan non-CPP dan juga oleh para aktivis yang mencakup para pembelot dari CPP. TWSP menyediakan ruang di mana perdebatan dapat berlangsung melalui forum ceramah-diskusi dan juga publikasi. Perdebatan seperti itu, misalnya, dicatat dalam dua publikasi TWSP, *Marxism in the Philippines: Marx Centennial Lectures* (1984) dan *Marxism in the Philippines* (1988),

serta dalam jurnal triwulan mereka, *Kasarinlan: Journal of Third World Studies*, yang juga mempublikasikan berbagai artikel yang ditulis oleh anggota CPP menggunakan nama pena mereka, mengenai perdebatan yang berlangsung dalam Partai. Contoh dari publikasi ini adalah artikel Nathan Quimpo yang berargumen tentang perang gerilya urban vs. perang rakyat yang berlarut-larut (*protracted people's war* – PWW) seperti yang terlihat dalam strategi Kiri di El-Salvador selama tahun 1970-80-an. TWSP juga menyediakan “ruang akademik” bagi anggota CPP yang dibebaskan dari tahanan seperti mantan pemimpin Kiri Ralf Baylosis yang menjadi asisten penelitian TWSP pada akhir 1970-an.

Reyes (2016) juga menunjukkan peran intelektual sayap kiri dalam lembaga gereja di Filipina sebagai kontributor dalam memperdalam perdebatan yang terjadi di CPP. Di antaranya adalah Konferensi Uskup Katolik Filipina (*Catholic Bishops' Conference of the Philippines* – CBCP) NASSA dan institusi regional mereka LUSSA. Ada juga sejumlah pendeta dan biarawati dari Eropa dan Amerika Serikat yang menyediakan jejaring dukungan intelektual dan logistik bagi anggota CPP yang tinggal di pedesaan.⁵

Hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu perasaan adanya kualifikasi, kemampuan dan pelatihan profesional yang tersia-siakan. Menambah pada perdebatan mengenai garis Partai adalah dilema yang muncul di antara para revolusioner kelas menengah yang juga mempunyai kualifikasi profesional. Ada revolusioner kelas menengah yang memiliki latar belakang sebagai pekerja profesional, misalnya sebagai dokter medis, namun kerja revolusioner mereka tidak memanfaatkan kemampuan atau pelatihan medis mereka. Bahkan sampai pada titik di mana para pekerja profesional kelas menengah ini mempertanyakan cara terbaik untuk mengabdikan diri pada revolusi, apakah melalui perjuangan “bersenjata” atau “legal”, memberikan prioritas yang sama terhadap keduanya (Lihat Tadem, 2014).

Dilema ini juga dihadapi oleh kader Partai kelas menengah yang terlibat dalam kerja atau advokasi NGO pembangunan. Mereka percaya bahwa perjuangan “legal” yang mereka lakukan, yang mendapat

⁵ Lih. Tadem 2014 tentang bagaimana jejaring gereja di Filipina memfasilitasi pengorganisian akar rumput aktivis Kesehatan selama periode darurat militer

manfaat dari kualifikasi, kemampuan serta pelatihan kelas menengah mereka adalah sama pentingnya dengan perjuangan bersenjata. Maka dari itu, ketegangan yang muncul di dalam CPP mengenai kerja NGO pembangunan adalah bahwa ini diperlakukan sebagai hal yang sekunder dalam perjuangan politik melawan kediktatoran.

Ketegangan seperti itu juga terlihat di antara anggota CPP yang memandang isi-isu non-kelas yang diasosiasikan dengan “kelas menengah” seperti perjuangan perempuan, bangsa Moro, masyarakat adat serta advokasi lingkungan sebagai hal yang subordinat terhadap perjuangan bersenjata.

GERAKAN KELAS MENENGAH DAN KIRI DALAM PERJUANGAN MASYARAKAT SIPIL PADA MASA PASCA-DARURAT MILITER (1986-SEKARANG)

Transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di awal Revolusi *People Power* 1986 yang menggulingkan kediktatoran Marcos memberikan ruang yang lebih besar bagi kegiatan front bersatu di kancah masyarakat sipil bagi CPP untuk terus mengupayakan tujuan mereka. Akan tetapi, transisi politis negara juga memperkuat ketegangan yang berkembang di dalam Partai yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan pada 1992 antara para *Reaffirmist* atau “RA”, mereka yang terus mengikuti ortodoksi Maois, misalnya, perjuangan bersenjata, dan mereka yang “menolak” hal tersebut, yakni para *Rejectionist* atau “RJ”. Bagi para RJ, mereka melihat strategi kelas menengah yang mereka gunakan selama periode darurat militer, misalnya kerja pembangunan, sebagai prioritas.

“Perpecahan di dalam CPP dan pergeseran setelahnya dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan legal melihat kemunculan masyarakat sipil tidak hanya sebagai ruang kontestasi namun juga sebagai kekuatan sosial utama dalam masyarakat untuk menghasilkan perubahan. Ini terjadi dalam konteks dibutuhkannya penguatan pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai “proses membangun ‘kekuatan paralel’ dalam ‘masyarakat sipil’” (Tadem, 2019a, hal. 85).

Maka dari itu, masyarakat sipil menjadi ruang utama perjuangan bagi gerakan Kiri yang dipimpin kelas menengah selama 1990an dan kemunculan organisasi masyarakat sipil (CSO). “Masyarakat sipil” sebagai

istilah kemudian digunakan untuk mencakup semua aktor non-negara yang menggugat negara. Maka pada 1990an istilah “organisasi masyarakat sipil” (CSO) digunakan secara populer oleh gerakan Kiri. Periode pasca-darurat militer menyaksikan munculnya CSO sayap kiri (Serrano, 2016, dikutip dalam Tadem, 2019a, hal. 85).

Membentuk aliansi dengan pemain masyarakat sipil dan masyarakat sipil sebagai arena kontestasi utama dan sekunder bagi para RJ dan RA mencirikan cara bagaimana kelompok Kiri mengupayakan dorongan bagi proses demokratisasi selama periode pasca-darurat militer. Berkenaan dengan ini, advokasi dan strategi NGO/CSO secara umum tetap berbasis kelas menengah. Seperti yang dicatat Reyes (2016), hal ini karena kekuatan NGO/CSO berbasis pengetahuan, yakni, mereka harus mengedukasi masyarakat mengenai advokasi mereka, menyusun dan mengajukan proposal pendanaan, mengupayakan aliansi dengan pihak lain yang secara umum diidentifikasi sebagai kelas menengah (Reyes, 2016).

Popdem yang Dipimpin Kelas Menengah

Di antara demokrat nasional (*national democrats*, ND atau *nat-dems*), yang kemudian menjadi faksi penolak atau “RJ” yang merupakan sempalan dari CPP, adalah para demokrat populer (*popular democrats – popdems*) yang perhatian utamanya adalah untuk bekerja bagi front Kiri yang luas. Yang memimpin para *popdem* adalah mantan pemimpin NDF Horacio “Boy” Morales bersama mantan penyokong CPP Isagani Serrano dan Edicio de la Torre. Ekspresi *popdem* memiliki tiga dimensi penting yang membutuhkan strategi dan kualifikasi kelas menengah, antara lain sebagai berikut (Serrano 2016, dikutip dalam Tadem 2019a).

Kerja NGO pembangunan, sebagaimana terlihat dalam pendirian *Philippine Rural Reconstruction Movement* (PRRM) dan organisasi rekanan mereka *Cooperative Foundation of the Philippines Inc.* (CFPI). Berkenaan dengan yang pertama, PRRM yang direvitalisasi ini adalah salah satu NGO terbesar selama dekade pertama pasca-darurat militer. Ini adalah inisiatif *popdem* yang menyediakan pendidikan dan sumber daya dalam tujuannya untuk menguatkan “masyarakat sipil” (Tornquist, 1993, hal. 42). Kedua, “*think tank*” *popdem* terlihat dalam pembentukan *Institute*

for *Popular Democracy* (IPD). IPD fokus pada isu tata pemerintahan dan reformasi elektoral, serta demokrasi populer dan partisipasi. Dan ketiga, gerakan sosial, yakni *Movement for Popular Democracy*. Gerakan ini menghubungkan kelas bawah, menengah dan atas dalam masyarakat pada tataran pemerintahan tingkat lokal dan nasional.

PRRM fokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan dan ini mereka lakukan melalui pembangunan dan rekonstruksi perdesaan. PRRM membangun sekitar 12 cabang regional di seluruh negeri. Salah satunya adalah Nueva Vizcaya yang membantu menurunkan angka kemiskinan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) lainnya dan unit pemerintahan lokal dari 45% menjadi 4%. Contoh lainnya adalah CFPI yang bergabung dengan CSO lain dan berfokus terutama pada: (1) mengorganisasikan para petani dalam koperasi untuk memberdayakan dan memberikan bantuan kepada mereka, misalnya, bantuan teknis maupun legal, dan (2) mengampanyekan pengesahan peraturan perundang-undangan nasional untuk mendorong pembangunan koperasi di negeri seperti terlihat dalam pengesahan undang-undang berikut pada 10 Maret 1990: (1) Undang-Undang Republik (R.A.) 6398 yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Koperasi Filipina yang menciptakan hukum organik bagi koperasi; dan (2) R.A. 6939 yang mendirikan Otoritas Pengembangan Koperasi (*Cooperative Development Authority – CDA*) sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan UU Koperasi.

“Kenyataan CSO sayap kiri selama periode pasca-darurat militer adalah pecahnya organisasi-organisasi akibat perdebatan yang muncul seiring berkembangnya kompleksitas isu dan perkembangan baru. Secara umum ini terjadi karena adanya perubahan dalam sistem politik” (Tadem 2019a, 89). Hal ini terlihat dalam FDC. Saat jejaring CSO ini mulai mengerjakan isu lain seperti program penyesuaian struktural dan privatisasi, persoalan yang tidak lagi hitam dan putih seperti isu utang, perdebatan mulai muncul dalam FDC pada tahun 1990an mengenai arah ke mana jejaring CSO akan bergerak (Tadem, 2019a, hal. 89).

Lebih jauh lagi, ada isu strategi. Satu faksi ingin FDC memberikan prioritas pada riset mengenai isu ekonomi terkait yang membutuhkan lebih banyak kecakapan kelas menengah. Sedangkan faksi lainnya yang dipimpin oleh basis massa FDC ingin memfokuskan sumber daya FDC

pada aksi politik, seperti mobilisasi massa dan demonstrasi. Yang pertama, yang dipimpin oleh Presiden FDC Leonor Briones, dosen UP di bidang Administrasi Publik, dan Sekretaris Jenderal mereka Filomeno Sta. Ana, pada akhirnya meninggalkan FDC (Tadem, 2019a, hal. 89).

Briones kemudian akan menjadi Bendahara Nasional pada Pemerintahan Estrada (1998-2001) dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada Pemerintahan Duterte (2016 hingga saat ini). Sta. Ana, di sisi lain, mendirikan *Action for Economic Reform* (AER) pada 1996. AER mengambil posisi yang lebih bernuansa terhadap Paket Reformasi Pajak Komprehensif pemerintah dibandingkan rekanan mereka di FDC. AER menjadi kekuatan besar di balik koalisi reformasi yang dengan sukses melobi pelaksanaan UU "Pajak Dosa" (*Sin Tax Law*) yang secara resmi dikenal sebagai UU Republik No. 10351 yang mengenakan pajak lebih tinggi pada produk alkohol dan tembakau (Tadem, 2019a, hal. 89).

TATA PEMERINTAHAN DAN DEMOKRATISASI TINGKAT GLOBAL

Ciri menonjol lain dalam CSO yang dipimpin gerakan Kiri selama periode pasca-darurat militer adalah kemunculan CSO global yang dimungkinkan oleh karakteristik kelas menengah mereka. Pada 1990-an, internasionalisasi aktivitas CSO telah menjadi norma sejak meluasnya globalisasi. FDC, yang dimulai sebagai NGO lokal, kemudian berubah menjadi CSO transnasional. Bersama kelompok masyarakat sipil global lainnya, FDC diberi pengakuan sebagai pemain penting dalam advokasi bagi lembaga keuangan multilateral (MFI) untuk menjalankan *Highly Indebted Poor Countries Initiative* (HIPC) (Tadem, 2019a, hal. 90).

Pergeseran Menuju Politik Elektoral sebagai Kancah Perjuangan

Terlepas kemajuan yang telah dicapai oleh CSO yang dipimpin Kiri ini dengan proses advokasinya, yang dimungkinkan dengan kecakapan dan strategi kelas menengah mereka, kenyataannya adalah bahwa elit negeri tetap mendominasi ruang politik dan ekonomi dalam masyarakat. Maka dari itu, kesadaran bahwa di bawah demokrasi "oligarki", ada batas reformasi yang dapat didorong oleh CSO sayap kiri. Karena itulah ada dorongan untuk meraih kekuatan negara melalui po-

litik elektoral. Melihat karakteristik kelas menengah, mereka mampu untuk memulai partai politik baru.

Satu contoh dari hal ini adalah Partai Aksi Masyarakat Akbayan, atau Akbayan yang, selain para *popdem*, terdiri dari dua blok sayap kiri lainnya, yakni sosialis demokratik atau *demsoc* dan kelompok sosialis BISIG (*Bukluran sa Ikauunlad ng Sosyalistang Isip at Gaw*a atau Pemajuan Pemikiran dan Aksi Sosialis) (Tadem, 2019a, hal. 93). Peluang bagi gerakan kiri untuk memasuki politik elektoral adalah melalui sistem representasi daftar-partai sebagaimana dimandatkan dalam Konstitusi 1978. Tujuan dari sistem daftar-partai adalah untuk mengatasi masalah kurangnya representasi masyarakat lapis bawah dengan memberikan mereka hingga tiga kursi jika mereka memenangkan 6% pemilih dalam sistem daftar-partai. Keterbatasan besar dari sistem ini adalah bahwa politisi tradisional mulai membentuk partai-partai daftar-partai mereka yang menyulitkan partai-partai kiri memenangkan kursi di Kongres (Tadem, 2019a, hal. 93).

Karena itu, CSO sayap kiri yang sudah mendirikan partai politik mereka terpaksa bersekutu dengan politisi tradisional untuk memenangkan kursi dalam sistem representasi daftar-partai. Hal ini menyebabkan kurang kuatnya advokasi CSO dan, lebih buruk lagi, bubarnya CSO itu sendiri akibat perdebatan yang muncul mengenai apakah strategi aliansi dengan elit perlu dilakukan mengingat efek merugikannya (Tadem 2019a, hal. 93). Strategi lain adalah mendukung pencalonan presidensial dari politisi tradisional. Hal ini terjadi pada Akbayan saat pemilihan 2010, di mana mereka berkampanye untuk Benigno S. Aquino Jr. Ketika Aquino menang, sejumlah pemimpin Akbayan diberikan berbagai jabatan dalam pemerintahan (Tadem, 2019a, hal. 94).

Strategi seperti itu juga memunculkan ketegangan dan perpecahan dalam Akbayan karena beberapa pemimpin dan anggotanya tidak setuju dengan beberapa kebijakan Pemerintahan Aquino, terutama agenda pembangunan neoliberal mereka. Ini kemudian mengakibatkan beberapa dari mereka meninggalkan gerakan sayap kiri dan partai politik ini. Yang benar-benar terlihat adalah kegagalan Akbayan untuk mengusung agenda sayap kiri mereka, atau alternatif lainnya, selama berada dalam pemerintahan (Tadem, 2019a, hal. 95).

Nasib Akbayan mengingatkan pada pengalaman tokoh-tokoh Kiri sebelumnya yang direkrut ke dalam pemerintah namun tidak mampu membuat perubahan substantif apa pun. Satu contoh adalah Morales dari PRRM yang ditunjuk oleh Presiden Estrada sebagai Menteri Reformasi Agraria. Sayangnya Morales tidak mampu membuat perubahan yang berarti karena kuatnya pengaruh elit pemilik tanah. Dalam kasus Pemerintahan Duterte saat ini, ia menunjuk tiga tokoh utama sayap kiri yang berafiliasi dengan CPP ke dalam posisi Kabinet. Mereka adalah: Judy Taguiwalo, profesor *University of the Philippines*, sebagai Menteri Pekerjaan Sosial dan Pembangunan; Liza Maza sebagai kepala Komisi Anti-Kemiskinan Nasional dan pemimpin buruh tani, Rafael Mariano sebagai Menteri Reformasi Agraria. Mariano merupakan buruh tani pertama yang diangkat menjadi pejabat kabinet pemerintahan. Sebelumnya ia juga merupakan anggota Kongres Dewan Perwakilan Rakyat Filipina. Namun bersama Taguiwalo, ia gagal mendapatkan konfirmasi Kongres Filipina yang tetap didominasi oleh elit politik-ekonomi dan kepentingan bisnis besar (Lihat Tadem, 2019b).

CATATAN PENUTUP: JALAN KE DEPAN UNTUK KAUM KIRI?

Pengalaman gerakan Kiri Filipina menunjukkan bahwa kelas menengah memainkan peran penting dalam menjalankan strategi kelas menengah dalam gerakan Kiri. Terjadi peningkatan, seperti pengorganisasian dan pemberdayaan populer sektor-sektor yang terpinggirkan dalam masyarakat, translasi advokasi mereka ke dalam legislasi dan kebijakan internasional, serta partisipasi dalam dan penunjukan ke jabatan kabinet pemerintahan. Akan tetapi, ada batasan sejauh mana faksi Kiri ini mampu mendorong perubahan demokratis, terutama melalui politik elektoral dan penunjukan ke jabatan di pemerintahan. Batasan tersebut terutama berhubungan dengan berlanjutnya dominasi kepentingan oligarki dalam negeri dan tidak adanya alternatif Kiri yang layak terhadap *status quo* ini.

Penulis menjelaskan bahwa kelas menengah dapat berayun ke kiri atau ke kanan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, kelas menengah tidak statis. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bahwa kategori “kelas menengah” adalah sesuatu yang dipersoalkan. Karya Giddens (1995), yang mengklasifikasikan kelas menengah bukan dalam hal kapasitas pasar

tetapi dalam hal kualifikasi, misalnya, pendidikan, sangat berguna dalam diskusi ini. Di Filipina, hal ini tergambar dalam kasus mahasiswa yang bergabung dengan Partai Komunis Filipina (*Communist Party of the Philippines* – CPP). Mereka bisa saja adalah anak-anak pemilik toko dan elit pemilik tanah, namun mereka bergabung bukan karena kapasitas pasar mereka, tetapi karena kualifikasi mereka, keterampilan mereka, dan lain-lain. Perlunya mengidentifikasi nilai-nilai yang membedakan kelas menengah dari kelas lainnya (Rivera, 2001; Bautista, 2001) adalah pertanyaan penting sepanjang artikel. Kompleksitas ini juga tergambar jelas dalam studi penulis tentang teknokrasi (Tadem, 2020), di mana ditemukan bahwa para teknokrat bisa berasal dari kelas bawah, seperti Manuel Alba, dan kelas atas, seperti Placido Mapa. Para teknokrat juga ditunjukkan memiliki keterkaitan dengan kelas menengah baru.

Keseluruhan spektrum ideologis kiri sudah dicakup, tapi inilah saatnya untuk membangun gerakan independen dan partai nasional. Di bawah Corazon Aquino dan Fidel Ramos, gerakan Kiri pernah punya kubu sosial demokrat. Di bawah Joseph Ejercito Estrada, ada Boy Morales, yang sebelumnya anggota CPP-NPA-NDF; dan di bawah Gloria Macapagal-Arroyo, Filipina memiliki orang-orang yang berasal dari kiri, tetapi mereka tak menampakkan diri sebagai kiri. Di bawah Benigno Aquino III, pernah ada Akbayan. Dan terakhir, di bawah Rodrigo Duterte, CPP telah dikooptasi ketika para anggotanya bergabung dengan pemerintah, walau pada dasarnya mereka kiri juga.

Kaum revolusioner dari kelas menengah memiliki lebih banyak pilihan daripada mereka yang berasal dari kelas lebih bawah; hal ini memberi keunggulan namun juga keterbatasan. Pertama, kelas menengah lebih mungkin berhubungan dengan kelas bawah dan kelas atas, sehingga membuka dirinya lebih banyak pada aliansi front bersatu, sesuatu yang tak mungkin dilakukan oleh kelas bawah. Keterbukaan kelas menengah ini terlihat di *University of the Philippines* sebagai proses sosialisasi dari pembauran kaum kiri dan kanan.

Fleksibilitas yang tersedia untuk kelas menengah juga tercermin dalam situasi di mana kaum revolusioner harus memikirkan ke mana mereka harus pergi setelah revolusi. Dalam kasus *New People's Army* (NPA) di Negros setelah Revolusi *People Power* tahun 1986, terungkap

bahwa lebih sulit bagi seseorang dari kaum buruh tani dan kelas pekerja untuk meninggalkan gerakan mereka (Rutten, 2000). Kecenderungan mereka adalah mencari pelindung untuk membantu mereka. Contoh kasus klasik adalah Dante Buscayno, yang harus mencari pelindung, dan orang itu adalah Corazon Aquino. Dia mampu mendirikan salah satu koperasi terbesar untuk sementara waktu. Jika dilakukan sendiri, Buscayno kemungkinan tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Boy Morales, yaitu mendapatkan pendanaan dari negara lain.

Sebaliknya, kelas menengah dapat dengan mudah kembali ke rumah mereka, seperti di Dasmariñas, Cavite, dll. Kelas menengah selalu memiliki pilihan untuk bergabung dengan pemerintah, akademi atau organisasi masyarakat sipil. Dengan kata lain, lebih banyak pilihan tersedia untuk mereka. Bahkan sebelum Revolusi *People Power* 1986, sudah ada ketegangan yang bergejolak antara kaum revolusioner kelas menengah dan kelas pekerja di dalam gerakan. Beberapa anggota CPP pernah berkata bahwa mereka berpakaian seperti petani, mereka terlihat seperti petani. Ada juga lelucon yang beredar bahwa kaum revolusioner kelas menengah tahu bagaimana memberontak tetapi tidak tahu cara membersihkan dan memasak (*marunong makibaka pero hindi marunong maglinis at magluto*). Namun ketegangan-ketegangan ini tidak sejelas seperti setelah Revolusi *People Power*. Penting dicatat bahwa mereka yang berasal dari kelas menengah lebih mudah meninggalkan revolusi dan kembali ke masyarakat arus utama. Anggota PKP lainnya di kiri masih memiliki aspek revolusioner. Mereka yang keluar dari PKP mendirikan *Bukluran sa Ikauunlad Sosyalistang Isip at Gawa* (BISIG). Beberapa menjadi pemimpin karismatik agama dan menekuni berbagai pekerjaan lain.

Masalahnya adalah bahwa orang tidak dapat merasakan kebijakan ekonomi yang nyata. Siapa pun presiden Filipina, kebijakan ekonominya tetap sangat hegemonik. Dalam kasus Partai Buruh di Amerika Latin dan Bernie Sanders di Amerika Serikat, sangat jelas bahwa mereka sosialis karena kebijakan ekonomi mereka. Di Filipina, setelah politisi kiri bersekutu dengan politisi tradisional, mereka dapat mengangkat masalah kemiskinan dan korupsi, tetapi tidak masalah ketimpangan. Mengangkat masalah ketimpangan membutuhkan redistribusi, yang berarti menyasar kebijakan ekonomi, dan politisi tradisional tidak me-

nerima itu. Yang pertama kali mengangkat ketimpangan kelas adalah Estrada, dengan retorika *Erap para sa Mahirap* (Erap untuk kaum miskin). Tapi kebijakan ekonominya tetap sama. Benang merahnya di sini adalah penggunaan “*good governance*” sebagai wacana adalah hal yang elitis. *Good governance* ini mencakup korupsi, tetapi tidak menysar ketimpangan (Bello, 2005). Menysar representasi sesungguhnya dari sektor-sektor yang terpinggirkan semestinya akan menjadi pekerjaan sistem daftar-partai, tetapi sistem itu juga dirusak.

Pendanaan dari negara lain pun juga bermasalah. Lembaga pendanaan dapat secara signifikan menentukan aktivitas organisasi masyarakat sipil. Ketika Gerakan Rekonstruksi Perdesaan Filipina (*Philippine Rural Reconstruction Movement – PRRM*) direvitalisasi, sumber pendanaan utama adalah Oxfam Novib, sebuah NGO liberal dari Eropa yang sepaham dengan apa yang diinginkan Boy Morales. Sedangkan Program Studi Dunia Ketiga UP tidak mau menerima uang dari Ford Foundation dan USAID karena dianggap dana kontrarevolusi.

Pembangunan adalah sebuah proses, terutama setelah Revolusi *People Power* 1986. Berdasarkan studi penulis tentang koperasi Dante Buscayno (Tadem, 1998), Buscayno mengatakan bahwa sulit untuk menyuruh orang terlibat dalam revolusi, mengingat sifat koperasi sebagai jenis sistem politik yang berbeda. Ia mengatakan bahwa ia akan mendorong dan mendorong terus orang-orang untuk terlibat dalam koperasi sampai mereka dapat melihat batasannya, dan saat itulah akan lebih mudah untuk mengatakan kepada mereka untuk mengangkat senjata.

Terakhir, tentang sifat partisipasi tokoh-tokoh kiri dalam pemerintahan. Mereka ditarik ke dalam pemerintahan sebagai individu; mereka tidak membawa gerakan dan gagasan bersama mereka. Akbayan-lah yang pertama kali pernah membawa agendanya, namun mereka tak mampu mendorongnya karena diberikan pos-pos pemerintah yang terpinggirkan. Orang-orang kiri biasanya ditempatkan di Komisi Anti-Kemiskinan Nasional (NAPC) atau di Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD). Boy Morales ditugaskan di Departemen Reforma Agraria (DAR), yang sangat penting, tetapi posisi wakil menteri diduga diberikan kepada seseorang yang berafiliasi dengan Hacienda Luisita dari Peping Cojuangco. Secara keseluruhan, tokoh-tokoh

kiri tidak dimasukkan ke dalam lembaga ekonomi utama—yaitu, Departemen Perdagangan dan Perindustrian (DTI), Departemen Keuangan (DOF), dan Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional (NEDA)—yang secara signifikan menghambat kapasitas mereka untuk memajukan reformasi ekonomi yang krusial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bautista, C. (2001). Middle class cultures: glimpses into lifestyles and outlooks. Dalam X. Xinhuang (Peny.), *Exploration of the middle classes in Southeast Asia* (151-208). Program for Southeast Asian Area Studies, Academia Sinica.
- Bello, W. (2005). *The anti-development state: The political economy of permanent crisis in the Philippines*. Zed Books.
- Bolasco, M. (1984). Marxism and Christianity in the Philippines: 1930—1983. Dalam Third World Studies Center (Peny.), *Marxism in the Philippines: Marx Centennial Lectures* (hal. 97-148). Third World Studies Center, University of the Philippines.
- Croteau, D. (1995). *Politics and the Class Divide: Working People and the Middle-Class Left*. Temple University Press.
- De Dios, E. S. (1988). The Erosion of Dictatorship. Dalam A. J. Dios, P. B. Daroy, & L. Kalaw-Tirol (Peny.), *Dictatorship and Revolution: Roots of People's Power* (hal. 70-131). Conspectus.
- Diokno, M. S. I. (1988). Unity and Struggle. Dalam A. J. Dios, P. B. Daroy, & L. Kalaw-Tirol (Peny.), *Dictatorship and Revolution: Roots of People's Power* (hal. 132-75). Conspectus.
- Giddens, A. (1995). The Growth of the New Middle Classes. Dalam A. Vidich (Peny.) *The New Middle Class: Life-Styles, Status Claims and Political Orientations* (hal. 103-129). Macmillan.
- Glassman, R. M. (1995). *The Middle Class and Democracy in Socio-Historical Perspective*. Brill.
- Glassman, R. M. (1997). *The New Middle Class and Democracy in Global Perspective*. MacMillan Press Ltd.
- Raynor, J. (1969). *The Middle Class*. Longmans, Green and Co. Lt.

- Rivera, T. C. 2001. Middle Class Politics and Views on Society and Government. Dalam H-H. M. Hsiao (Peny.), *Exploration of the Middle Classes in Southeast Asia*. Academia Sinica.
- Robison, R., & Goodman, D. S. G. (1996). The New Rich in Asia: Economic Development, Social Status and Political Consciousness. Dalam R. Robison & D. S. G. Goodman (Peny.), *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonalds and Middle-Class Revolution* (hal. 1-16). Routledge.
- Rutten, R. (2000). High-cost activism and the worker household: Interests, commitment, and the costs of revolutionary activism in a Philippine plantation region. *Theory and Society*, 29(2), 215-252.
- Santos, A. F. (2010). Marxism and the Philippine Women's Movement: Reflections on Praxis. Dalam T. S. E. Tadem & L. L. Samson (Peny.), *Marxism in the Philippines: Continuing Engagements* (hal. 113-40). Anvil Publishing.
- Santos, A. F. (2006). The Philippine Left and Problematizing the Moro Question in a Time of Democracy. *East Asian Review: An Annual Journal*, 10 (March), 239-61.
- Tadem, T. S. E. (1998). Confronting Patronage Politics in Cooperative Development: The Buscayno Experiment. *Philippine Political Science Journal*, 19(39-42), 1-23.
- Tadem, T. S. E. (2006). Philippine Social Movements before Martial Law. Dalam T. S. E. Tadem & N. M. Morada (Peny.), *Philippine Politics and Governance: Challenges to Democratization and Development* (hal. 1-22). Department of Political Science, University of the Philippines, Diliman.
- Tadem, T. S. E. (2014). The Role of Non-Governmental Organizations in the Field of Health in Modern Southeast Asia: The Philippine Experience. Dalam T. Harper & S. S. Amrit (Peny.), *Histories of Health in Southeast Asia: Perspectives on the Long Twentieth Century* (hal. 222-235). Indiana University Press.
- Tadem, T. S. E. (2019a). Technocracy and Class Politics in Policy-Making. Dalam M. R. Thompson & E. V. C. Batalla (Peny.),

Routledge Handbook of the Contemporary Philippines (hal. 262-72).
Routledge.

Tadem, T. S. E. (2019b). The Middle-Class-Led Left Movement in Civil Society's Role in the Philippines' Democratization Process. In H-H. M. Hsiao (Peny.), *Middle Class, Civil Society and Democracy in Asia* (hal. 81-101). Routledge.

Tadem, T. S. E. (2020). The Emergence of Filipino Technocrats as Cold War "Pawns". *Journal of Contemporary Asia*, 50(4), 530-550.

Tiglao, R. (1988). The Consolidation of the Dictatorship. Dalam A. J. Dios, P. B. Daroy, & L. Kalaw-Tirol (Peny.), *Dictatorship and Revolution: Roots of People's Power* (hal. 26-69). Conspectus.

Wurfel, D. (1988). *Filipino Politics: Development and Decay*. Ateneo de Manila University Press.

KOMODIFIKASI SUBSISTENSI: PROFIT, PLATFORMISASI, DAN PANDEMI DI INDONESIA MASA NEOLIBERAL

Estu Putri Wilujeng¹

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji cara-cara kapitalisme beradaptasi secara mandiri dalam menghadapi pandemi di Indonesia. Selama persebaran COVID-19 di nusantara, paradigma konfigurasi kapitalis mengalami perubahan agar tetap bisa bertahan dan memperkuat keberadaannya, juga semakin pragmatis dan berkelanjutan. Penulis berargumen, kapitalisme akan melakukan *rebound* yang tidak bergantung hanya pada negara, melainkan bergantung pada kapasitas mereka dalam melakukan apropriasi cara-cara bertahan hidup masyarakat di saat krisis kesehatan. Proses apropriasi dilakukan dengan menggunakan teknologi platform digital yang mengombinasikan mesin pembelajar (*machine learning*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan interaksi manusia-komputer (*human-computer interaction/HCI*), untuk menarik usaha-usaha bertahan hidup warga yang bisa kita definisikan sebagai platformisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif naratif dan tematik untuk mengkaji berita di media, penulis menemukan bahwa platformisasi mampu melakukan katalisasi akumulasi kapital dengan melakukan hibridisasi antara dunia fisik dan komponen arsitektur platform digital, seperti desain interaksi manusia-komputer, kecerdasan buatan, dan mesin pembelajar. Hal tersebut memicu pengguna untuk menjadi lebih dependen pada platform. Dependensi tersebut menyamarkan batasan individu sebagai makhluk otonom atau buruh yang dieksploitasi oleh akselerasi. Pemanfaatan sumber daya manusia menjadi cara untuk mengembangkan modus produksi dalam memasarkan komoditas. Relasi antara platform dengan pengguna tersebut terlegitimasi oleh pemerintah neoliberal yang semakin menarik perlindungan terhadap pekerja.

¹ Penulis adalah dosen pada Departemen Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ia bisa dihubungi lewat estuputri@ui.ac.id.

Kata-kata Kunci: Indonesia, platform kapitalisasi, interaksi manusia-komputer, mesin pembelajar, kecerdasan buatan.

PENDAHULUAN

Krisis yang disebabkan oleh persebaran COVID-19 telah berdampak pada masyarakat di seluruh dunia. Lebih penting lagi, pandemi global memicu perdebatan nasib kapitalisme. Kelompok optimis mengafirmasi bahwa kapitalisme tidak dapat bertahan di tengah krisis multifaset yang semakin menunjukkan keringkahan rantai global kapitalisme neoliberal (Free dan Hecimovic, 2021), dan di tengah kerentanan tersebut juga memunculkan narasi pentingnya ideologi sosialis (lihat Martinez, 2020); keduanya menyingkap harapan munculnya dunia pasca-kapitalis (lihat Nelson, 2020). Sementara itu, kelompok pesimis memprediksi bahwa pandemi global akan melahirkan nekropolitik,² atau praktik normalisasi atas dehumanisasi dan eksploitasi kerentanan manusia demi pencapaian tujuan neoliberal (Hunsinger, 2020). Debat ini mendorong kita untuk mempelajari kembali konfigurasi kapitalis terkini, khususnya transformasi selama pandemi global. Bagi penulis, kedua kelompok tersebut sepakat bahwa pandemi telah meningkatkan kerentanan individu, bahkan mengukuhkan pekerja sebagai target eksploitasi pasar kapitalistik.

Berdasarkan premis ini, penulis memulai dengan asumsi bahwa pandemi tidak menghapus atau bahkan menantang kapitalisme karena kemampuannya untuk *rebound* melalui manajemen tenaga kerja dalam *platform*³ digital. Proses yang dilakukan platform dalam menarik, mengakomodasi, dan menghubungkan produsen dan konsumen atau pengguna disebut sebagai platformisasi. Untuk mencapai platformisasi yang maksimal, perlu ada kombinasi mesin pembelajar (*machine learning*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan interaksi manusia-komputer (*human-computer interaction*). Pandemi menjadi katalisator utama dalam mengakselerasi platformisasi, serta semakin memanfaatkan individu-individu rentan, yakni orang-orang yang mencoba terhindar dari

² Nekropolitik adalah praktik tidak manusiawi yang mengeksploitasi kerawanan manusia di zaman neoliberal. Nekropolitik berpotensi menimbulkan trauma. Kondisi tersebut akan terus berlanjut hingga mendapat perlawanan atau pengakuan bahwa bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak boleh dinormalisasi (Hunsinger, 2020)

³ Selanjutnya, penulis tidak menggunakan cetak miring untuk istilah *platform*.

pengangguran. Platformisasi menuntut kapitalisme untuk menguasai mekanisme platform, dan mereka yang mampu menguasai platform akan berhasil melakukan akumulasi modal secara maksimal selama masa krisis.

Kemampuan kapitalisme dalam melakukan *rebound* bukanlah hal yang baru. Kemampuan tersebut merupakan karakteristik kunci dari relasi kapitalistik. Harvey (2010) menyatakan bahwa saat kapitalisme mengalami penurunan kekuatan pembelian di pasar, kapitalisme akan menciptakan desain baru agar dapat tetap bertahan dan menguasai relasi di dalam pasar. Salah satu taktik yang biasa digunakan adalah memperluas pasar dengan menciptakan produk dan gaya hidup baru, menciptakan instrumen kredit, dan mengatur bujet negara. Berbagai strategi *rebound* yang dirancang untuk melindungi kapital membuat kita perlu mempertanyakan segala macam harapan hancurnya kapitalisme selama pandemi (lihat Free dan Hecimovic, 2021; Martinez, 2020).

Lebih lanjut, Harvey (2010) menjelaskan bahwa kebangkitan kapitalisme bergantung pada kekuatan negara untuk melakukan regulasi terhadap kompetisi serta membuat perencanaan merger dan akuisisi untuk meningkatkan profit. Akan tetapi, negara bukanlah satu-satunya instrumen dalam proses *rebound* ini. Pemilik kapital membuat berbagai model baru untuk mencaplok bisnis dengan kapital lebih rendah. Pencaplokan tersebut dilakukan dengan menyediakan platform atau pasar yang bisa dikendalikan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak jauh berbeda, Srnicek (2017) berargumen bahwa platformisasi merupakan model bisnis berkelanjutan yang memonopoli ekonomi digital. Dia mendefinisikan platform sebagai infrastruktur digital yang menghubungkan berbagai pengguna untuk mengembangkan produk, layanan, dan lokapasar (*marketplace*).

Di Indonesia, perusahaan lokapasar terbesar adalah Shopee dan Tokopedia, begitu juga dengan aplikasi transportasi seperti Go-Jek dan Grab yang tidak kalah besar yang dikenal sebagai platform digital. Putri dan Zakaria (2020) telah menganalisis bagaimana Shopee dan Tokopedia menjadi niaga-el (*e-commerce*) dengan metrik situs web (*website metrics*) dan performa sosial media tertinggi. Sementara itu, Go-Jek dan Grab merupakan platform transportasi yang berubah menjadi layanan

satu atap (*one-stop-service*), termasuk menyediakan layanan finansial dan investasi.

Platform-platform tersebut telah beroperasi sebelum pandemi namun mereka berhasil mendapatkan surplus akumulasi kapital yang tinggi dengan monetisasi berbagai level bisnis lokal. Sebagai contoh, Setyowati (2020) menjelaskan kompetisi antara Go-Jek dan Grab untuk menarik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta warung kelontong dengan menyediakan layanan GoToko oleh Go-Jek dan Grab-Kios oleh Grab. Kemampuan untuk menciptakan daya tarik bagi usaha kecil memperkuat ekonomi platform dalam mengendalikan lokapasar digital.

Keberhasilan monetisasi tersebut dapat dilihat dari jumlah transaksi yang meningkat hampir dua kali lipat selama pandemi, dari 80 juta transaksi di Agustus 2019 menjadi 140 juta transaksi pada Agustus 2020 (CNN Indonesia, 2020). Koesno (2020) mengutip kajian Exabytes yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengguna niaga-el sebesar 38.3 persen; tidak jauh berbeda, dia juga merujuk hasil penelitian iSea Insight's yang menunjukkan peningkatan aktivitas para pelaku bisnis. Demikian juga dengan Burhan (2020b) yang menyatakan adanya peningkatan pengguna aktif bulanan sebesar 10 juta serta peningkatan jumlah pelaku UMKM yang meningkat sebesar 2.7 juta.

Kemampuan platform untuk menarik bisnis serta mengakumulasi kapital terletak pada mekanika platform. Tokopedia, salah satu lokapasar digital terbesar di Indonesia, menggunakan mesin pembelajar dan kecerdasan buatan untuk mengekstraksi data tren konsumen serta memprediksi permintaan dan pesanan konsumen. Kemudian, Tokopedia memberikan data-data tersebut kepada penjual dengan antarmuka (*interface*) yang sederhana dan bersahabat (Librianty, 2020; Rizal, 2019). Teknologi ini merupakan bagian dari desain arsitektur platform serta sistem yang dapat meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna, menambah loyalitas melalui kenyamanan, mampu menarik pengguna, menyediakan fasilitas, serta menghubungkan produsen dengan konsumen yang tepat (Parker dkk, 2016).⁴

⁴ Platform pun menjadi eksploitatif, karena pengguna memiliki sedikit alternatif untuk bertahan hidup selama pandemi. Cosgrove dkk (2020) telah mempelajari

Kemampuan kapitalisme untuk mengakumulasi profit melalui platformisasi selama penyebaran COVID-19 menunjukkan bahwa kapitalisme juga beradaptasi pada situasi pandemi. Hal tersebut menyebabkan perlunya elaborasi lebih jauh tentang platformisasi sebagai transformasi kapitalisme. Untuk itu, penulis berupaya menguak bagaimana kapitalisme melakukan restrukturisasi melalui platform di tengah krisis COVID-19.⁵

KAPITALISME DALAM KRISIS?

Untuk mencapai tujuan artikel, pada bagian ini penulis memetakan kajian literatur menjadi tiga bagian. Pertama, menyajikan diskusi kapitalisme dan krisis secara umum. Kedua, membahas kapitalisme platform sebagai hasil dari strukturisasi pada masa krisis. Ketiga, menjelaskan penggunaan mesin pembelajar, kecerdasan buatan, dan interaksi manusia-komputer dalam proses tersebut. Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bagaimana arsitektur platform mengeksploitasi pengguna dengan tujuan mengakumulasi kapital. Analisis ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengkaji kapitalisme di tengah krisis, khususnya transformasi, daya tahan, serta potensi disrupsi yang disebabkan oleh mekanisme bertahannya sendiri.

eksploitasi kerentanan saat pandemi melalui platform. Platform tersebut bertujuan untuk membantu masalah kesehatan mental pengguna. Platform mengekstraksi data aktivitas pengguna dan menjualnya ke pihak ketiga untuk tujuan komersial. Keterlibatan platform dan aplikasi *pseudo-health* memaksa pengguna untuk memasuki rantai pasokan kapitalis. Pengguna platform dan aplikasi ini didorong untuk terlibat sebagai pengguna dan menjadi bagian dari alat produksi untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik platform.

5 Penulis membongkar ini dengan mengikuti beberapa langkah metodologis. Pertama, dengan menggabungkan metode kualitatif naratif dan tematik untuk memahami evolusi modal selama dan setelah pandemi. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan berbagai narasi sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori tematik. Dua kategori utama dalam penelitian ini adalah kerja keras untuk bertahan hidup dan bagaimana platform mengumpulkan keuntungan selama pandemi. Pada setiap kategori, data yang terkumpul diklasifikasikan menurut tema. Pada kategori pertama, penulis menelusuri fase-fase perkembangan COVID-19 dan respon warga ke dalam berbagai jenis pekerjaan. Pada kategori kedua, penulis membagi temuan menjadi beberapa tema untuk menyajikan strategi platform untuk mempertahankan diri di tengah pandemi. Penulis kemudian menarik hubungan antara kedua kategori tersebut, yaitu bagaimana platform memberikan ruang bagi jerih payah warga sebagai strategi mereka untuk mempertahankan diri mereka di masa pandemi juga. Dari analisis ini, hubungan kausal akan ditarik antara kondisi kita saat ini dan kemungkinan platformisasi lebih lanjut di masa depan. Sumber data diambil dari berbagai media online; dari media berita daring hingga media platform daring, merupakan gambaran bagaimana mereka menciptakan wacana mereka sendiri. Sumber-sumber tersebut dipilih untuk mewakili berbagai macam pekerjaan warga dalam mencari nafkah, dan bagaimana platform memediannya.

Saat relasi eksploitatif merupakan fenomena pra-kapitalis, jauh sebelum penemuan komoditas dan moda produksi (Marx, 1894, hal. 424-427), relasi tersebut dilanggengkan dan dilegitimasi melalui pinjaman kepada pemilik lahan dan pemilik usaha kecil untuk mendapatkan bunga hingga memiliki kontrol atas kepemilikan buruh, lahan, rumah dan properti lain dengan cara melakukan akuisisi. Marx (1894) menjelaskan bahwa relasi antara sumber kapital dan bunga, kepemilikan lahan dan privatisasi aset sesuai dengan moda produksi kapitalis (hal. 569). Penimbunan kapital melalui kendali aset dan sirkulasi ekonomi merupakan prinsip dasar dari hegemoni kapitalis, yang dapat berpotensi hancur saat berhadapan dengan krisis struktural.

Saussen dan Campbell (dalam Mirowski, 2013) mendefinisikan krisis sebagai runtuhnya regulasi finansial yang disebabkan oleh logika kapitalisme sendiri. Moore (2016) meyakini bahwa krisis atau bencana terjadi ketika kapitalisme mulai mengorganisasi alam, atau bisa kita istilahkan sebagai '*capitalocene*'. Mereka semua mendefinisikan krisis sebagai situasi yang berbahaya bagi relasi kapitalis yang disebabkan oleh moda organisasi dan regulasi kapitalisme.⁶ Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan krisis sebagai bencana yang disebabkan oleh ketidakmampuan kapitalisme untuk melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri dalam mengakumulasi kapital.

Hubungan antara kapitalisme dan krisis telah dijelaskan oleh Duménil dan Lévy (2004) yang menyatakan bahwa hukum evolusi kapitalisme selalu melibatkan krisis struktural. Mereka mengkaji berbagai krisis yang terjadi di masa lalu yang mendorong transformasi kapitalisme, seperti yang terjadi pada 1875-1893 di seluruh Eropa, khususnya di Prancis; dan Perang Sipil yang terjadi pada 1865 di Amerika Serikat. Setelah krisis-krisis tersebut, kapitalisme mengalami perubahan drastis seperti pembagian peran antara pemilik kapital dan manajemen, transformasi dari sistem finansial global, dan pertumbuhan minat terhadap korporatisme. Mereka juga menjelaskan bahwa Depresi Besar dan Pe-

⁶ Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam fenomena ledakan kredit (*credit boom*). Bernanke dkk (2019) menyatakan bahwa lembaga keuangan yang terus mengembangkan kredit untuk memperoleh bunga akan menghadapi ledakan kredit yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, organisasi kapitalisme melahirkan krisis yang mengerikan.

rang Dunia II telah mendorong kapitalisme untuk menciptakan dimensi baru, yakni berupa jalan ketiga atau ekonomi campuran (Duménil dan Lévy, 2004). Perubahan-perubahan tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme kapitalisme sebelumnya tidak dapat mengakomodir krisis yang mereka ciptakan. Srnicek (2017) juga menemukan bahwa relasi kapitalisme akan menyebabkan krisis yang akan mendorong mereka untuk melakukan perubahan. Penulis pun menyepakati bahwa krisis merupakan konsekuensi dari akumulasi kapital. Mekanisme yang didesain oleh kapitalisme menghasilkan *blunder* yang tidak dapat dikendalikan, serta menuntut mereka untuk memproduksi mekanisme baru agar dapat keluar dari krisis.

Di sinilah diskusi tentang kemampuan kapitalisme untuk mengalihkan krisis yang ditimbulkannya menjadi penting karena para ahli teori memperdebatkan apakah reformasi menandakan kekuatan atau kelemahan kapitalisme. Nelson (2020) berargumen bahwa reformasi tersebut merupakan bagian dari reproduksi sosial yang lemah dan rentan, sementara bagi pihak lain kapitalisme justru memiliki kekuatan dalam melakukan swa-regulasi kompetitif yang mendorong para pemilik kapital untuk berkompetisi menguasai relasi kapital (Bernanke dkk, 2019). Secara mendasar, kapitalisme hadir dalam situasi lemah serta memiliki regulasi yang berisiko menghasilkan sebuah krisis. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kapitalisme akan selalu melakukan *rebound* untuk tetap terus bisa mengakumulasi kapital kembali.

Kemampuan kapitalisme dalam melakukan *rebound* di saat krisis kerap kali diidentikkan dengan peran negara sebagai aktor utama yang memperkuat kapitalisme. Bernanke dkk. (2019) telah menyampaikan perihal peran signifikan negara dalam menyelesaikan krisis, seperti *financial fires* yang dipadamkan oleh negara pada abad ke-20 dan ke-21.⁷ Namun, solusi tersebut diberikan pada perusahaan-perusahaan dan pemilik kapital besar. Untuk itu, kunci mempertahankan dominasi dalam hubungan kapitalis bergantung pada kemampuan pemilik modal untuk mengambil keuntungan dari negara dalam peran mereka untuk mem-

⁷ Upaya tersebut telah dilakukan ketika Amerika Serikat mengalami guncangan keuangan pada tahun 2008, melalui *bailout* perusahaan besar dan memberi dukungan pada pasar kredit yang vital.

cahkan krisis - yaitu dengan memberi mereka stimulus aset terlebih dahulu untuk mempertahankan kontrol dalam hubungan modal.

Kebertahanan kapitalisme selama krisis juga dapat dilakukan dengan mengeksploitasi krisis. Kapitalisme mampu mencaplok relasi sosial selama masa krisis ke dalam proses akumulasi kapital. Klein (2007) menjelaskan bahwa dalam kapitalisme bencana, krisis dan bencana dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dari ketakutan dan perjuangan individu dalam mempertahankan hidup yang mendorong mereka untuk menerima semua macam bantuan dan perbaikan (hal. 8-20). Dalam bencana kapitalisme, industrialisasi militer selama masa perang dan rekonstruksi bencana alam mengarah pada privatisasi (Klein, 2007, hal. 299). Krisis dikelola sebagai sumber keuntungan bagi kapitalis. Seperti yang terjadi saat pandemi, kesenjangan semakin meningkat akibat transformasi neoliberal yang dieksploitasi untuk memperkaya diri sendiri, baik bagi perusahaan maupun pemerintah (Lee, 2020).

Selama bencana, kekayaan terakumulasi melalui komodifikasi perjuangan masyarakat untuk bertahan hidup atau komodifikasi subsistensi.⁸ Hal ini terbukti ketika buruh berubah menjadi alat-alat produksi itu sendiri untuk menopang kehidupan mereka, menyerahkan kendali atas pekerjaan mereka kepada kelas kapitalis, yang mengeksploitasi kerja mereka, termasuk membuat buruh menggunakan alat produksi mereka sendiri. Negara semakin tidak hadir dalam akuisisi modal atau properti, dan kadang-kadang dianeksasi dalam hubungan kapitalis yang lebih luas. Dengan demikian, kunci akumulasi kapital melalui akuisisi tidak terletak pada kekuatan negara, tetapi pada kekuatan kapitalis

⁸ Pekerja dan buruh di sini memiliki arti tersendiri. Pekerja didefinisikan sebagai individu otonom yang melakukan berbagai aktivitas kerja, sedangkan pekerja adalah individu dalam hubungan kapitalis yang bertindak sebagai alat produksi dan dipaksa untuk tetap subsisten (lihat Bernstein, 2010). Bernstein (2010) menjelaskan bahwa komodifikasi subsistensi mengandalkan proletarisasi melalui perampasan aset yang dimiliki oleh buruh untuk mengubah buruh itu sendiri menjadi aset. Dia mencontohkan petani yang kehilangan tanahnya, mengalami kesulitan untuk memproduksi secara mandiri. Mereka adalah kaum proletar. Penyitaan aset seringkali mempekerjakan agen negara, seperti perwira militer yang dipekerjakan untuk membantu pembebasan tanah. Harvey (2010) menyatakan bahwa keluarga kerajaan, militer, bangsawan sipil, birokrat sipil, dan perusahaan sering melakukan pengadaan tanah baik di perkotaan maupun pedesaan. Akuisisi ini merupakan bagian dari akumulasi modal. Dalam relasi kapitalis, aset negara juga dapat disita untuk mendukung akumulasi kapital seperti ruang publik, yang dapat dikomodifikasi dalam relasi kapital yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh negara.

untuk mempertahankan diri pada posisi yang menarik bagi setiap pihak yang juga dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka.

Akuisisi aset yang ditopang permodalan semakin meningkat di masa pandemi. Krisis terjadi ketika kapitalisme tidak mampu mengatasi gangguan akumulasi modal yang dipicu oleh kekayaan yang tidak terdistribusi dan ketergantungan kapitalisme pada pihak-pihak kecil yang menguntungkan (Duménil dan Lévy, 2004; Moore, 2016; Mirowski, 2013; Saussen, Campbell dalam Mirowski, 2013; Srnicek, 2017). Dalam konteks pandemi, krisis muncul dari terhentinya kegiatan ekonomi makro, sehingga mengganggu kemajuan akumulasi modal. Relasi permodalan yang berkelanjutan harus memiliki kekuatan untuk menjaga proses akumulasi ini dengan menyita model aset dengan teknik yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19.

Kondisi tersebut menentukan cara restrukturisasi akumulasi modal. Srnicek (2017) menyatakan bahwa kapitalisme melakukan reorganisasi dan menyesuaikan dirinya dengan karakteristik krisis. Dalam konteks ini, pandemi melarang aktivitas fisik untuk mencegah penularan virus, dan kebijakan baru diperkuat untuk mengurangi aktivitas fisik. Kondisi tersebut menentukan perancangan mekanisme akumulasi kapital yang tidak bertumpu pada kontak langsung, melainkan bertumpu pada mediasi interaksi untuk mengembangkan relasi kapitalis.

Selama pandemi, upaya restrukturisasi dilakukan untuk menjaga proses akumulasi modal. Banyak model ekonomi dan bisnis baru dikembangkan untuk memanfaatkan krisis itu sendiri. Bentuk-bentuk restrukturisasi di era digital ini dirancang melalui platform (Srnicek, 2017; Parker dkk, 2016). Srnicek (2017) mendefinisikan platform sebagai infrastruktur digital yang berfungsi sebagai wadah dan media interaksi antara individu atau kelompok pengguna untuk membangun produk, layanan, dan pasarnya. Platform melibatkan pembeli, pengiklan, penyedia layanan, produsen, pemasok, dan objek fisik untuk melakukan transaksi ekonomi; atau komersialisasi digital. Untuk melakukan ini, platform mengandalkan efek jaringan, dan melakukan berbagai macam cara untuk menarik jaringan dan menyebarkan ajarannya seperti dengan melakukan ekstraksi data pola penggunaan untuk memahami target pasar mereka. Data yang diekstraksi ini digunakan sebagai dasar

untuk memasarkan komoditas. Setelah platform menghitung karakteristik penggunaannya dari data dan mampu menawarkannya kepada pihak ketiga, perilaku pengguna menjadi komoditas yang dapat menghasilkan nilai lebih.⁹

Dalam kapitalisme, perubahan model bisnis platform yang menghubungkan banyak aktor dengan jenis layanan yang terus berkembang dipandang sebagai sebuah inovasi.¹⁰ Parker dkk (2016) menjuluki platform sebagai inovasi revolusioner karena mengubah model nilai rantai linear menjadi model bisnis yang menghubungkan produsen dan

⁹ Henry (2001) menjelaskan bahwa studi tentang platform telah dimulai sejak tahun 1980an. Ia mencontohkan platform sebagai sebuah konsep dimulai dari wadah jaringan bagi banyak perusahaan regional, juga dikenal sebagai firma atau perusahaan multinasional. Konsep ini dikembangkan menjadi Network Intelligence, dan pada tahun 2003 dikembangkan sebagai model bisnis untuk menghubungkan konsumen dan produsen, atau yang dianggap sebagai pasar (Rochet dan Tirole, 2003 dalam Henry, 2021). Dalam perkembangannya, Harry menyebut kondisi platform saat ini sebagai infrastruktur digital untuk menghubungkan dua atau lebih pengguna yang berinteraksi. Dia telah meramalkan kemungkinan lebih lanjut dari platform: Intelligen kolektif pemangsa atau kapal kolektif. Siapa pun dapat menggunakan platform untuk tujuan apa pun, tergantung pada jenis dan orientasi platform. Srnicek (2017) mengklasifikasikan lima jenis platform: Periklanan (yaitu mengkomodifikasi data pengguna untuk pengiklan), *cloud* (yaitu peminjaman ruang digital untuk penyimpanan atau alat produksi), industri (yaitu menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras bagi bisnis untuk beralih daring dan menurunkan biaya produksi), produk (yaitu meminjamkan pasar digital untuk produsen dan konsumen), dan platform ramping (yaitu pekerja *outsourcing* untuk menjaga organisasi tetap ramping, sehingga menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan).

¹⁰ Misalnya, platform kesehatan dan kebugaran akan diisi oleh berbagai aplikasi untuk membantu latihan, meditasi, serta konsultasi dan pembelian medis; platform transportasi menghubungkan pengguna dengan penyedia sarana transportasi, seperti Go-Jek dan Grab; platform pasar digital memediasi transaksi ekonomi, seperti Tokopedia dan Shopee; sedangkan platform donasi dan amal memediasi proses pengumpulan dana untuk tujuan amal, seperti kitabisa.com. Terkadang, platform ini akan memperluas jenis layanan mereka dan tumbuh menjadi multiplatform. Menurut Tiwana (2014), salah satu ciri platform adalah peningkatan kekhususannya yang khas. Penulis berpendapat bahwa spesialisasi khusus hanyalah awal dari sebuah platform karena pada akhirnya akan mendiversifikasi layanannya. Di Indonesia, kita bisa mengambil contoh platform niaga-el seperti Tokopedia dan Shopee. Mereka mulai sebagai penyedia pasar untuk transaksi ekonomi antara produsen dan konsumen, dan mereka telah berkembang menjadi platform periklanan yang menyediakan ruang untuk mengiklankan produk kepada konsumen. Akhirnya, mereka bahkan berkembang menjadi platform ramping, mempekerjakan mitra untuk mengirimkan pengiriman. Mereka juga telah menjadi platform keuangan yang mengelola pinjaman dan angsuran sendiri atau melalui pihak ketiga. Perkembangan ini juga terjadi di platform ride seperti Go-Jek dan Grab. Keduanya dimulai sebagai penyedia transportasi sebelum menawarkan berbagai layanan: layanan perawatan diri melalui spa dan pijat, layanan pengiriman, pembelanja pribadi untuk makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam perkembangannya, mereka juga menawarkan layanan keuangan pinjaman dan pembayaran kredit. Kecenderungan platform ini untuk memperluas layanan mereka didasarkan pada strategi bisnis klasik, diversifikasi untuk menguasai pasar yang lebih luas dan lebih tersegmentasi. Diversifikasi mencerminkan prinsip utama dari sebuah platform, yang dikenal sebagai "*red queen effect*" atau tuntutan untuk cepat beradaptasi agar dapat bertahan di pasar dan bersaing dengan solusi teknologi lainnya.

konsumen di setiap ujung pipa. Mereka juga menjelaskan empat alasan mengapa platform tersebut mampu bersaing dengan model ekonomi rantai. Pertama, mengurangi *gatekeeper* atau rantai distribusi tradisional antara produsen dan konsumen. Kedua, menciptakan ruang baru untuk penciptaan nilai dan penawaran. Ketiga, menggunakan alat berbasis data untuk menerima umpan balik dari komunitas pengguna, yang nantinya akan diterapkan kembali untuk meningkatkan pengalaman mereka. Terakhir, platform mampu mengubah strategi keuangannya, mengalihkan fokus mereka dari manajemen internal perusahaan ke pemangku kepentingan dan interaksi eksternal. Oleh karena itu, platform tampaknya menjadi model akumulasi modal yang paling efektif, yang dapat dilihat dalam arsitekturnya.

Arsitektur platform menggambarkan setiap komponen dalam platform dan mekanismenya, sampai ke pengguna akhir. Hubungan antara masing-masing komponen menjalankan tugas untuk mendukung akumulasi keuntungan, mulai dari ekstraksi data pasar sasaran, transformasi data, hingga daya tarik pasar melalui teknologi antarmuka dan pengalaman pengguna. Selain itu, Fitzpatrick (2018) menjelaskan bagaimana mode teknologi kontemporer seperti kecerdasan buatan (AI), data besar, dan algoritma sebagai kecerdasan komputasi berperan dalam proses ini. Interaksi antara manusia dan teknologi dikembangkan oleh para ahli dalam satu mata pelajaran yang dikenal sebagai interaksi manusia-komputer (*Human-Computer Interaction/HCI*). Kim (2015) mendefinisikan HCI sebagai studi interdisipliner tentang antarmuka dan interaksi antara manusia dan komputer dalam model abstrak dan teknis. Love (2005) mendefinisikan HCI sebagai di luar batas komputer *desktop*, tetapi juga dalam sistem seluler atau desain aplikasi. Dalam platform, kecerdasan buatan membantu mengekstrak data dan menampilkan layanan secara otomatis. Tampilan dibuat melalui mekanisme HCI untuk menarik pengguna dan memperpanjang waktu layar mereka, meningkatkan pengalaman mereka, di dalam sistem seluler dan di luarnya.

Kombinasi antara HCI dan AI mempercepat akumulasi kapital. Cosgrove dkk. (2020) menjelaskan persoalan penggunaan kecerdasan buatan dan pengawasan (*surveillance*) yang bermasalah dalam kapitalisme bencana, terutama melalui aplikasi seluler yang dipromosikan se-

lama pandemi. Berdasarkan kajian terhadap kesehatan mental terbaru (Huckvale, dkk., 2019 dalam Cosgrove dkk., 2020), mereka menunjukkan bahwa 81 persen dari aplikasi ini mengirim data penggunanya ke Facebook dan Google sebagai bagian dari analitika data. Selain itu, 92 persen dari mereka juga mengirimkan data ke pihak ketiga di luar Facebook dan Google. Studi ini sesuai dengan temuan Azhar (2020) yang menemukan bahwa layanan gratis yang disediakan oleh aplikasi dilakukan untuk memikat pengguna agar mengkonsumsi produk, memungkinkan penyedia aplikasi untuk menjual data pengguna kepada pihak lain. Kesenjangan antara konsumsi bebas dan konsumsi paksa menjadi ruang untuk mengidentifikasi keuntungan.

Srnicek (2017) memandang negara sebagai otoritas tertinggi yang mampu mengendalikan dan memecahkan masalah platform dalam pengelolaannya, setidaknya membuat kebijakan untuk mencegah monopoli, melindungi pengguna dan mitra dari eksploitasi, melindungi privasi mereka, dan mengatur pajak platform. Tetapi, negara neoliberal hanya mampu mengatur platform dengan memberikan solusi teknis dengan mengabaikan masalah struktural dan sehari-hari dalam penciptaan dan pengembangan platform dalam restrukturisasi kapitalis yang lebih besar.

Platform tidak hanya terkait dengan kapitalis besar dan banyak pemangku kepentingan yang ditariknya, tetapi juga dengan ruang publik. Scholz dan Schneider (2016) mengembangkan model platform koperasi untuk dikelola oleh publik sebagai strategi untuk menguasai ekonomi digital.. Schneider (2016) menguraikan dua strategi untuk bertahan dalam ekonomi yang kompetitif seperti itu. Pertama, membangun strategi kerjasama berdasarkan solidaritas. Kedua, memperoleh dukungan pemerintah dalam mewujudkan praktik koperasi tersebut. Kedua strategi ini merupakan fondasi penting dari platform kerja sama.

Sayangnya, model platform koperasi tetap cacat ketika berhadapan dengan platform lain yang lebih siap untuk memonopoli dan memperoleh sumber daya dan jaringan yang lebih besar (Srnicek, 2017), keterlibatan negara dalam mengembangkan platform yang demokratis dan dikontrol publik untuk memecahkan masalah eksploitasi diri di platform ini sangat diperlukan. Tetapi ide ini memiliki kelemahan, ka-

rena kekuasaan negara dapat digunakan untuk melindungi keuntungan dan hak istimewa segelintir orang. Dengan kata lain, platform koperasi tidak akan dilindungi oleh kekuatan negara dalam sistem kapitalistik. Terlebih lagi, dalam kasus Indonesia, negara melegitimasi platformisasi pasar yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan dari krisis kesehatan multidimensi.

LOKAPASAR BAGI SUBSISTENSI

Pada bagian ini, penulis merefleksikan platformisasi sebagai strategi bertahan kapitalisme untuk beradaptasi dengan pandemi global. Dengan menggunakan platform yang signifikan secara sosial dalam kasus Indonesia, penulis berpendapat bahwa ada “pasar subsistensi” — di mana keterampilan bertahan hidup orang-orang biasa dimonetisasi oleh platform. Untuk memperkuat argumen ini, penulis menyajikan contoh peran platform di pasar penghidupan selama pengalaman Indonesia dengan pandemi.

Berbagai laporan global menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia lamban dalam menanggapi COVID-19, dan bahwa pandemi telah mengungkap kesenjangan yang mendalam di negara ini.¹¹ Sementara media nasional melaporkan tes cepat skala massal sejak Maret 2019 (Sutarsa dkk., 2020). Jika dicermati lebih dekat, terungkap bahwa kelompok sosial seperti kelas bawah (Sutarsa dkk., 2020), pekerja migran (Aminuddin dan Pallikadavath, 2020), anak yatim piatu yang tinggal di tempat penampungan (Setiawan, 2021) dan pekerja informal (Sutarsa dkk., 2020) memiliki akses yang buruk terhadap tes karena permasalahan biaya.

Selain itu juga terdapat kepanikan yang berkaitan dengan komoditas esensial. Survei perkembangan UMKM selama *pandemic* menunjukkan 94.69 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan (Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI, 2020). Penurunan penjualan juga terjadi lebih dari 75 persen dialami oleh bisnis penjualan luring/fisik 47.44 persen, bisnis penjualan daring

11 Sutarsa dkk. (2020) membandingkan biaya tes COVID-19 di rumah sakit swasta dengan upah 74 juta pekerja informal. Biaya tes IDR 770,000 (sekitar USD 60) hingga IDR 1,000,000 (sekitar USD 85), sedangkan pekerja informal hanya mendapatkan kisaran IDR 1,300,000 (sekitar USD 100) hingga IDR 1,500,000 (sekitar USD 120) per bulan.

40.17 persen, dan bisnis dengan metode penjualan luring dan daring 39.41 persen (Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI, 2020)

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga meningkat. Pada September 2019 turun menjadi 24.79 persen. Pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 26.42 persen pada Maret 2020 dan 27.55 persen pada September 2020 (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021) Dalam kondisi genting ini, anjungan memperoleh stabilitas sebagai tempat orang mencari nafkah dan pekerjaan sementara. Oleh karena itu, mereka mengedarkan modal untuk mengembangkan arsitekturnya untuk mengumpulkan data dan menarik pengguna dan transaksi baru.

Apropriasi Cara Bertahan Hidup Sehari-hari

Selama pandemi, platform memanfaatkan jaringan digital yang semakin menjadi alat bantu bertahan hidup bagi orang-orang yang mempraktikkan jarak sosial dan mengurangi mobilitas mereka. Mereka mengakomodasi lintas kelas, mulai dari buruh tidak tetap, pemilik usaha kecil, hingga konsumen kelas bawah, menengah, dan atas.

Pada saat yang sama, banyak platform mencoba memikat digitalisasi bisnis. Catriana (2021) melaporkan peningkatan 2.5 juta penjual di Tokopedia. Pada Desember 2020, jumlah penjual mencapai 9.9 juta, didominasi oleh UMKM. Tokopedia juga telah mengakuisisi 2,000 penjual baru dari berbagai wilayah. Begitu juga pada awal Januari 2020, jumlah nasabah mencapai 90 juta.

Grab (2020) pun merilis pernyataan bahwa mereka telah mengakomodasi 350,000 UMKM di platform mereka. Mereka menyelenggarakan bazar online dengan promosi khusus yang diikuti oleh 52,000 merchant GrabFood, GrabMart, GrabExpress, dan GrabKios. Mereka membuat fitur pengelola iklan agar pedagang dapat langsung mengelola iklan mereka. Shopee juga melakukan hal yang sama dengan UMKM, dengan menyelenggarakan 4.4 Mega Shopping Day (Darmawan, 2021); program belanja yang diadakan pada tanggal-tanggal unik dengan nomor hari dan bulan yang sama dengan hari penjualan untuk menarik konsumen. Acara ini diselenggarakan juga dalam rangka memperingati

Hari Hak Konsumen Nasional pada 20 April, dan Hari Hak Konsumen Sedunia pada 15 Maret (Berita Satu, 2021).

Platform ini telah berkembang menjadi multiplatform. Mereka menyertakan banyak jenis platform dalam satu aplikasi. Tokopedia, Shopee, Gojek, dan Grab adalah platform ramping relatif menempatkan pihak ketiga sebagai untuk mengumpulkan keuntungan mereka. Pada saat yang sama, mereka adalah platform produk yang menampung penjual untuk memasarkan produk mereka. Mereka juga telah menjadi platform periklanan dengan menggunakan data aktivitas pengguna sebagai target untuk mengiklankan komoditas penjual dan layanan mitra di platform. Platform telah berubah menjadi pasar satu atap sekaligus layanan keuangan, di mana pelanggan dapat membeli hampir semua barang secara legal, penjual dapat menjual segala jenis komoditas, atau yang kami sebut sebagai platform multilayanan. Mereka juga memfasilitasi pengiriman produk melalui ekspedisi, dan pembayaran melalui dompet digital, kredit, dan pinjaman.

Akuisisi aset adalah bagian dari komodifikasi subsistensi. Kunci komodifikasi kehidupan tidak datang dari penegakan negara untuk merebut alat produksi, seperti yang dikembangkan oleh Bernstein (2010) dan Harvey (2010), tetapi dari banyaknya layanan yang dibuat oleh platform sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan konstan arsitektur platform, khususnya dengan mengekstrak dan memproses data pengguna untuk meningkatkan interaksi dan menarik pengguna baru melalui pembelajaran mesin, antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna (*User Interface/User Experience—UI/UX*) untuk meningkatkan interaksi manusia-komputer, dan kecerdasan buatan (*Artificial intelligence—AI*). Komponen-komponen ini dibangun di platform untuk memperoleh ruang jaringan digital, yang akan disewakan kepada pengguna. Pengguna yang memanfaatkan ruang digital sebagai lokapasar untuk menjual produknya harus membayar sewa, baik secara langsung maupun melalui sistem bagi hasil. Pembayaran tersebut mencakup biaya tambahan untuk membeli fitur khusus guna meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan dari pengguna, seperti status Power Merchant atau Berbintang. Platform ini juga mengembangkan fitur-fitur seperti Go Ekspor untuk mengakomodasi UMKM mengeksport produk-

nya, dan pelatihan digital untuk UMKM dan pengusaha lokal lainnya oleh Tokopedia Bersama Kominfo (Burhan, 2020a).

Negara, yang dianggap Bernstein dan Harvey sebagai kunci pembebasan tanah, sebenarnya hadir dan berperan selama akuisisi. Hal ini terlihat pada pelatihan yang diadakan oleh Tokopedia dan Kementerian Komunikasi, Informatika, dan Teknologi (Burhan, 2020), serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui platform Gojek, Grab, Tokopedia, dan Shopee (Nurfitriyani, 2021). Relasi antara negara dan rakyat dimediasi oleh platform digital, melegitimasi ketergantungan terhadap platform digital kapitalistik, walaupun yang negara hadir hanya pada platform-platform yang sudah berhasil menunjukkan akumulasi modal lebih baik daripada platform lainnya.

Platformisasi telah dikatalisasi ketika pandemi hingga menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang Nelson (2020) sebut sebagai tekanan kritis bagi kapitalis klasik dalam produksi dan distribusi individu dan komoditas, yang dapat mengganggu proses moneter debit dan kredit. Platform, yang mengandalkan teknologi jaringan daring dan mudah beradaptasi dengan tuntutan pasar, memanfaatkan momen krisis ini; termasuk negara yang semakin bergantung pada peran platform ini dalam menyediakan lapangan kerja dan pasar. Mereka mendominasi pasar dengan mengakomodasi berbagai tingkat perusahaan dan pekerja sebagai mitra.

Komodifikasi subsistensi, dari sudut pandang konsumen dan pemilik usaha khususnya UMKM, merupakan bukti komodifikasi penghidupan masyarakat selama masa pandemi. Komodifikasi tidak dicapai melalui akuisisi oleh negara, tetapi melalui kemampuan platform untuk mengapropriasi praktik bertahan hidup oleh berbagai kelas dalam masyarakat neoliberal Indonesia—sampai pada titik di mana platform bahkan berhasil menyesuaikan program publik negara.

Meningkatkan Nilai Surplus Melalui Arsitektur Platform

Parker dkk (2016) mendefinisikan arsitektur platform sebagai kode pemrograman untuk menghubungkan pengguna dan meningkatkan nilai tukar di antara mereka, baik itu pertukaran informasi, barang

dan jasa, atau mata uang.¹² Arsitektur platform mereduksi solusi teknologi yang kompleks menjadi komponen-komponen yang membangun platform secara keseluruhan (Tiwana, 2014). Fungsi utama dari platform dijalankan oleh bahasa pemrograman dan algoritma, terutama pembelajaran mesin. Algoritma bertindak sebagai garis instruksi otomatis yang mengubah data masukan menjadi data luaran (Gillespie, 2014; Pasquale 2015 dalam van Dijck dkk., 2018). Mesin pembelajar sebagai bagian dari kecerdasan buatan akan mengekstraksi data pengguna dan pola penggunaan. Sampson (2018) menjelaskan bahwa pengumpulan data dan mesin pembelajar adalah aspek utama untuk mengenali perilaku konsumen, agar mereka terus melakukan aktivitas digital. Selain itu, algoritma pembelajaran mesin otomatis membantu membuat keputusan yang efisien dan menghindari kesalahan manusia (van Dijck dkk., 2018).

Untuk memperoleh data perilaku pengguna, platform tidak hanya mengandalkan mesin pembelajar dan HCI di ruang digital, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan calon pengguna di ruang fisik. Hal tersebut telah dilakukan oleh Grab yang bekerja sama dengan pemerintah, Tokopedia yang mengakuisisi toko fisik di berbagai daerah, dan *roadshow* yang diselenggarakan oleh Shopee, Tokopedia, Grab, dan Gojek. Strategi-strategi tersebut dapat diterapkan baik untuk menarik peserta dari ruang fisik dan mendorong mereka untuk berinteraksi di platform; atau untuk menarik peserta yang sudah melek digital untuk berinteraksi lebih dalam di platform. Setelah semua peserta bergabung dengan platform, mereka memasuki antarmuka (UI) dan menjelajahi pengalaman pengguna (UX) platform. Baik UI dan UX adalah bagian dari interaksi manusia-komputer, yang terus ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta memperpanjang dan meningkatkan interaksi dalam platform.

12 Parker dkk. (2016) telah menjelaskan prinsip utama dari arsitektur platform, yaitu untuk mengakomodasi transaksi informasi, barang dan jasa, atau mata uang antar pengguna. Transaksi didasarkan pada tiga aspek: Partisipan, unit nilai, dan filter. Aspek-aspek ini adalah dasar dari platform. Semakin kompleks platform yang dibangun, semakin kompleks detail komponen dari aspek-aspek ini. Setelah memetakan tiga aspek dalam interaksi, platform harus memiliki tiga fungsi utama untuk meningkatkan interaksi: (1) untuk menarik pengguna (produsen atau konsumen) untuk bergabung dengan platform, (2) untuk memfasilitasi interaksi mereka melalui alat dan pedoman untuk memudahkan interaksi, proses pertukaran, dan (3) mencocokkannya sesuai dengan informasi aktivitas digital dan profil masing-masing kelompok atau individu.

Kombinasi antara HCI dan mesin pembelajar didukung oleh kemampuan AI untuk membuat keputusan serta mencocokkan pengguna untuk memicu interaksi. Oleh karena itu, HCI berfungsi sebagai pen-jaring, mesin pembelajar berfungsi sebagai pengekstrak dan pemeta data, dan AI sebagai pengambil keputusan. Kesimpulannya kemudian dikirim kembali ke HCI untuk difungsikan sebagai alat untuk memben-tuk pengalaman pengguna. Proses ini harus diulang dan diperbaiki jika platform bertujuan untuk mendominasi pasar. Rizal (2019) menjelaskan bagaimana Tokopedia menggunakan pembelajaran mesin dan AI. Me-lalui teknologi ini, mereka mengekstrak data tren konsumen dan menyajikannya kepada penjual sebagai daftar rekomendasi dalam tampil-an dasbor yang sederhana dan mudah dipahami. Librianty (2020) juga menjelaskan bagaimana AI memecahkan masalah Tokopedia dengan mengekstrak data untuk memprediksi permintaan dan pesanan konsu-men.

Di masa pandemi, serbuan kapitalis dalam interaksi manu-sia-komputer yang semakin intensif mengkondisikan pengguna untuk bergantung pada layanannya. Ikatan kapitalistik di setiap komponen platform terlihat dalam beberapa aspek. Pertama, peningkatan kon-stantan UI dan UX untuk memudahkan pengguna menelusuri aplikasi lokapasar mereka. Platform akan mengatur tampilan mereka dengan membuat kategori khusus untuk komoditas mereka menggunakan fitur diskon seperti Tokopedia Nyam, yang telah ditingkatkan beberapa kali sejak awal pandemi. Tokopedia menampilkan kotak khusus, fitur yang mudah dikenali oleh pengguna. Di dalam kotak ini, berbagai macam komoditas pangan ditata. Layar itu ditampilkan untuk menyoroti bebe-rapa pedagang, yang meningkat empat kali lipat dari waktu ke waktu. Ada juga menu yang khusus menampilkan kebutuhan pandemi, seperti peralatan untuk membersihkan tubuh, benda, dan sekitarnya; masker wajah; vitamin dan suplemen; untuk bekerja dari kebutuhan rumah.

Selain kemudahan akses dalam tampilan dan penggunaannya, umpan lainnya adalah banyaknya promosi yang mengurangi nilai tukar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk diskon jangka pendek, kupon *cashback*, diskon, hingga diskon biaya pengiriman. Mere-ka juga menekankan momen spesial seperti tanggal dengan nomor unik

dan mudah dikenali. Hal ini mendorong konsumen untuk melakukan pembelian, dan juga lebih mudah, karena harga yang ditampilkan lebih rendah. Relasi kapitalis ini telah dijalankan di banyak platform sejak sebelum pandemi dan telah dipercepat dan diintensifkan selama pandemi.

Ketiga, platform menciptakan kembali suasana pasar fisik. Hal ini terlihat dari menu Live dimana para pedagang dapat memproduksi atau menjual komoditas sambil melakukan tawar-menawar dengan pelanggan seperti pasar di dunia fisik. Ada juga menu Story, fitur umum di sebagian besar media sosial yang memungkinkan pengguna mengunggah konten mereka dengan cepat; dalam hal ini komoditi yang akan dijual dan dibeli. Keempat, menciptakan klasifikasi pengguna berdasarkan peringkat dan keuntungannya. Pengguna platform diklasifikasikan dalam banyak tingkatan berdasarkan jumlah transaksi mereka. Semakin tinggi kelas pelanggan, semakin tinggi gengsi dan keuntungan materi yang diperoleh penjual, seperti diskon biaya pengiriman, *cashback*, hingga simbol promosi dan kepercayaan yang diberikan oleh platform. Pelanggan akan memiliki simbol untuk menandakan kelas mereka, apakah mereka termasuk dalam kelas perak, emas, platinum, atau berlian. Merchant juga diklasifikasikan berdasarkan kode bintang, label Power Merchant, hingga Official Store yang mempengaruhi jangkauan mereka kepada pelanggan dan kepercayaan pelanggan. Perbedaan kelas antara pedagang juga tergantung pada jumlah modal yang dibagikan dengan platform; semakin tinggi level mereka, semakin tinggi sewa ruang digital mereka atau bagian dari keuntungan yang mereka bagikan.

Selain menu yang cepat untuk diakses, platform dapat meningkatkan interaksi pengguna melalui fitur tambahan seperti game, hiburan, dan dukungan selebriti. Azhar (2020) menjelaskan bahwa layanan gratis menjadi umpan untuk meningkatkan penjualan komoditas. Seperti yang dilakukan oleh platform yakni dengan mengembangkan game simulasi dengan kupon belanja atau koin sebagai hadiahnya; mempekerjakan selebriti lokal atau bahkan internasional (misalnya, idola Korea Selatan) untuk mempromosikan layanan mereka. Karena promosi bervariasi dan mencapai lebih banyak target pasar, penggunaan platform meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan akumulasi modal.

Semua fitur tersebut diterima secara luas dan berfungsi dengan baik karena berjalan sesuai dengan data yang diekstraksi oleh AI, khususnya mesin pembelajar, dan ditampilkan melalui komponen HCI. Hal tersebut menarik dan mengikat lebih banyak pengguna ke dalam relasi kapital, yang dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan penjual dan pengguna aktif bulanan. Evandio (2021) melaporkan peningkatan jumlah penjual, sehingga total 10 juta akun pada Januari 2021, sementara itu pada Januari 2020 jumlahnya masih 7.2 juta penjual. Dengan kata lain, terdapat peningkatan sejumlah 2.8 juta dalam rentang waktu satu tahun. Pengguna aktif bulanan juga meningkat dari 90 juta pengguna pada Januari 2020 menjadi 100 juta pada Januari 2021. Oleh karena itu, arsitektur platform membantu akumulasi modal.

Adanya akumulasi menandakan kemampuan kapitalisme untuk bangkit kembali dan mengumpulkan keuntungan selama krisis. Platform kapitalistik memperkuat komponen arsitektur mereka untuk mendominasi ekonomi digital dan mengkomodifikasi subsistensi masyarakat. Ketika pengguna semakin bergantung pada platform, semakin sulit bagi mereka untuk menolak eksploitasi, pengurangan biaya yang lebih tinggi, dan banyak risiko yang mereka tanggung yang datang bersamaan dengan akumulasi modal. Oleh karena itu, penulis mendorong pembaca untuk merenungkan masa depan platform dan menolak hubungan modal yang eksploitatif.

CATATAN PENUTUP: MASA DEPAN PLATFORM DI TANGAN RAKYAT?

Artikel ini mengkaji kembali bagaimana kapitalisme telah beradaptasi dengan krisis yang sejalan dengan pandemi global dalam konteks Indonesia, dengan cara mengkodifikasi subsistensi rakyat jelata melalui platformisasi. Kapitalisme merestrukturisasi mekanisme akumulasi kapital melalui platform, dengan berbagai mode produksi dan komersialisasi digital diwarnai oleh arsitektur teknologinya.

Platform mampu mengakomodasi perbedaan kelas di masyarakat Indonesia di masa pandemi. Jelas bahwa platform terlepas dari kendali orang. Negara neoliberal, paling banter, permisif, dan paling buruk, bergantung pada perusahaan untuk memberikan bantuan kepada rakyat

selama pandemi; meskipun memiliki wewenang untuk mengatur hubungan yang setara antara platform dan penggunanya.

Beberapa telah menawarkan kontra-narasi untuk menghindari perangkat platformisasi kapitalistik (misalnya, Bernstein, 2010; Henry, 2021; Scholz, 2016; Srnicek, 2017). Umumnya, mereka mengadvokasi prinsip-prinsip kerjasama dan kolektivitas. Bernstein (2010) menjelaskan pentingnya kerjasama dan kolektivitas di antara petani untuk membangun fasilitas bersama untuk mendukung kondisi kerja mereka, dalam hal kekuatan yang dikeluarkan dan waktu yang dihabiskan. Henry (2021) menyoroti pentingnya kecerdasan kolektif untuk mengatur platform yang bertujuan untuk tujuan bersama, dan untuk bangkit melawan platform predator. Scholz dan Schneider (2016) menjelaskan pentingnya koperasi platform sebagai bagian dari ekonomi bersama di tengah rezim ekonomi kapitalis. Srnicek (2017) menunjukkan pentingnya platform publik di masa depan, dan menyarankan penggunaan otomatisasi untuk meringankan kondisi tenaga kerja di masa depan (Srnicek dan Williams, 2015).

Alternatif-alternatif ini tidak mudah diwujudkan, karena secara paradoksikal hal tersebut membutuhkan modal untuk bekerja sama secara kolektif di tengah kendali beberapa platform ekonomi yang terpusat. Karena negara neoliberal Indonesia mendorong platform yang lebih besar untuk menempati usaha kecil, saran Srnicek untuk membuat platform yang dikendalikan publik menjadi lebih sulit untuk dibayangkan.

Langkah pertama untuk mengatasi situasi ini adalah menghapus mitos *capitalocene*, atau bagaimana masyarakat harus bergantung pada relasi kapitalistik untuk bertahan hidup, termasuk yang berada di platform monopolistik. Selanjutnya, inisiatif untuk membangun platform publik harus dibatasi pada skala kecil untuk mencegah risiko eksploitasi diri. Henry (2021) menyebutkan bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan akar rumput dari kecerdasan kolektif yang juga dapat mengakomodasi pertukaran dan produksi pengetahuan. Komunitas juga memiliki peran untuk menciptakan dan memelihara ikatan sosial melalui praktik komunal, sebuah semangat yang dapat mendorong penciptaan dan pengembangan platform.

Komunitas akar rumput dan pengguna platform dapat berkontribusi dalam mendistribusikan akses dan menuntut adanya regulasi platform serta melindungi hak pengguna, untuk setiap konsumen, penjual, dan mitra. Hal ini tentu saja membutuhkan analisis struktural Marxian tentang mekanisme regulasi yang lebih menguntungkan transformasi kapitalis daripada organisasi rakyat sendiri. Untuk mencapai semua ini, studi lebih lanjut tentang masa depan komunitas dan platform kolektif dalam ekonomi digital yang semakin monopolistis harus dilanjutkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hizkia Yosias Polimpung selaku mentor yang telah memberikan bantuan selama proses penulisan artikel, mulai dari mempertajam argumen, mengenalkan konsep terkait, serta menelaah kajian. Sebagai hasil artikel ini banyak mengalami perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. F., dan Pallikadavath, S. (2020). Riset: keluarga pekerja migran mengalami kesulitan akses kesehatan, keuangan selama pandemi. *The Conversation*. <https://theconversation.com/riset-keluarga-pekerja-migran-mengalami-kesulitan-akses-kesehatan-keuangan-selama-pandemi-150468>
- Azhar, S. (2020). Consumption, Capital, and Class in Digital Space: The Political Economy of Pay-per-Click Business Models. *Rethinking Marxism* 33(2), 196-216.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2021). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. Dlm. *Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th.XXIV, 15 Februari 2021*.
- Berita Satu. (2021). 3 Alasan Harus Ikut Promo 4.4 Mega Shopping Day. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/digital/151524/3-alasan-harus-ikut-promo-44-mega-shopping-day>
- Bernanke, B. S., Geithner, T. F., dan Paulson Jr., H. M. (2019). *Firefighting: The financial crisis and its lesson*.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change: Agrarian Change and Peasant Studies*. Fernwood Publishing, Kumarian Press.

- Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI. (2020). *Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID-19*. <http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>
- Burhan, F. A. (2020a). Cara Shopee dan Tokopedia Gaet UMKM: Pelatihan hingga Dorong Ekspor. *Katadata*. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f8ec302c8885/cara-shopee-dan-tokopedia-gaet-umkm-pelatihan-hingga-dorong-ekspor>
- Burhan, F. A. (2020b). Rapor biru tiga e-commerce besar selama pandemi dan harbolnas 12.12. *Katadata*. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fe976562e246/rapor-biru-tiga-e-commerce-besar-selama-pandemi-dan-harbolnas-1212>
- Catriana, E. (2021). Jumlah UMKM yang Jualan di Tokopedia Melonjak 2,5 Juta Selama 2020. *KOMPAS.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/01/15/121702326/jumlah-umkm-yang-jualan-di-tokopedia-melonjak-lebih-dari-25-juta-selama-2020>
- CNN Indonesia. (2020). Transaksi E-Commerce Naik Nyaris Dua Kali Lipat Saat Pandemi. *CNN Indonesia*. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20201021193353-92-561232/transaksi-e-commerce-naik-nyaris-dua-kali-lipat-saat-pandemi>
- Cosgrove, L., Karter, J. M., Morrill, Z., & McGinley, M. (2020). Psychology and Surveillance Capitalism: The Risk of Pushing Mental Health Apps During the COVID-19 Pandemic. *Journal of Humanistic Psychology*, 60(5), 611–625.
- Darmawan, E. S. (2021). Shopee: UMKM Alami Peningkatan Penjualan hingga Lima Kali Lipat dalam Program 4.4 Mega Shopping Day. *KOMPAS.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/04/06/214150026>
- Duménil, G., & Lévy, D. (2004). *Capital resurgent: Roots of the neoliberal revolution*. Harvard University Press.
- Evandio, A. (2021). Tokopedia: Voucher Belanja Bisa Tingkatkan Jumlah Pengguna Aktif. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210204/12/1352477/tokopedia-voucher-belanja-bisa-tingkatkan-jumlah-pengguna-aktif>

- Fitzpatrick, G. (2018). A Short History of Human Computer Interaction. *Proceedings of the 2018 ACM SIGUCCS Annual Conference*, 3–3.
- Free, C., & Hecimovic, A. (2021). Global supply chains after COVID-19: the end of the road for neoliberal globalisation? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(1), 58–84.
- Gillespie, T. (2014). The Relevance of Algorithms. Dlm. T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Peny.), *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society* (hal. 167–194). The MIT Press.
- Grab. (2020). Sukses Digitalisasi 350.000 UMKM Baru Selama Pandemi, Grab Gelar Online Bazar #TerusUsaha Serentak di 14 Kota. *Grab.com*. <https://www.grab.com/id/en/press/social-impact-safety/grab-gelar-online-bazar-terususaha-serentak-di-14-kota/>
- Harvey, D. (2010). The right to the city: From capital surplus to accumulation by dispossession. Dlm. S. Banerjee-Guha (Peny.), *Accumulation by Dispossession: Transformative Cities in the New Global Order* (hal. 17–32). SAGE Publications India Pvt Ltd.
- Henry, A. (2021). *Platform and Collective Intelligence*: ISTD, Ltd and John Wiley and Sons, Inc.
- Hunsinger, J. (2020). On the Current Situation: Normal Violences, Pandemics, Emergencies, Necropolitics, Zombies, and Creepy Treehouses? *Fast Capitalism*, 17(2), 1–16.
- Kim, G. J. (2015). *Human–Computer Interaction: Fundamentals and Practice*. CRC Press, Taylor Francis Group. <http://www.ittoday.info/Excerpts/HCI.pdf>
- Klein, N. (2007). *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Metropolitan Books, Henry Holt and Company, LLC.
- Koesno, D. A. S. (2020). Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkatkan 38,3% Selama Pandemi. *Tirto*. <https://tirto.id/jumlah-pelanggan-e-commerce-tercatat-meningkat-383selama-pandemi-flep>
- Lee, M. M. (2020). Covid-19: agnotology, inequality, and leadership. *Human Resource Development International*, 23(4), 333–346.

- Librianty, A. (2020). Peran Penting AI untuk Perkembangan Tokopedia. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4167660/peran-penting-ai-untuk-perkembangan-tokopedia>
- Love, S. (2005). *Understanding Mobile Human-Computer Interaction*. Architectural Press.
- Martinez, C. (2020). Karl Marx In Wuhan : How Chinese Socialism Is Defeating COVID-19 Karl. *International Critical Thought*, 10(2), 311–322.
- Marx, K. (1894). *Capital: A Critique of Political Economy Volume III - English Edition Vol 3*. International Publishers.
- Mirowski, P. (2013). *Never Let A Serious Crisis Go To Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown*. Verso.
- Moore, J. W. (2016). Introduction. Dalam J. W. Moore (Peny.), *Anthropocene or capitalocene?: Nature, history, and the crisis of capitalism*. PM Press.
- Nelson, A. (2020). COVID-19: Capitalist and postcapitalist perspectives. *Human Geography*, 13(3), 305–309.
- Nurfitriyani, A. (2021). Pemerintah Bakal Salurkan KUR ke UMKM Lewat Gojek, Grab, Tokopedia Hingga Shopee. *Warta Ekonomi*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read305553/pemerintah-bakal-salurkan-kur-ke-umkm-lewat-gojek-grab-tokopedia-hingga-shopee>
- Parker, G. G., Alstyne, M. W. Van, dan Choudary, S. P. (2016). *Platform Revolution: How Networked Markets are Transforming the Economy -and How to Make Them Work For You*. W.W. Norton & Company, Inc.
- Putri, A. S., dan Zakaria, R. (2020). Analisis Pemetaan E-commerce Terbesar di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital. *Seminar dan Konferensi Nasional IDEC, 2020, November*.
- Rizal, A. (2019). Tokopedia Gunakan Teknologi AI dan ML untuk Bantu Penjualnya. *Info Komputer*. <https://infokomputer.grid.id/read/121882237/tokopedia-gunakan-teknologi-ai-dan-ml-untuk-bantu-penjualnya>

- Sampson, T. D. (2018). Transitions in human – computer interaction : from data embodiment to experience capitalism. *AI & SOCIETY*, 34(4), 945-946.
- Schneider, N. (2016). The meaning of words. Dlm. T. Scholz & N. Schneider (Peny.), *Ours to Hack and to Own: The Rise of Platform Cooperativism, A New Vision for the Future of Work and a Fairer Internet*. OR Books.
- Scholz, T. (2016). Platform cooperativism. *Challenging the corporate sharing economy*. Rosa Luxemburg Foundation.
- Scholz, T., & Schneider, N. (2016). What this is and isn't about. Dlm. T. Scholz & N. Schneider (Peny..), *Ours to Hack and to Own: The Rise of Platform Cooperativism, A New Vision for the Future of Work and a Fairer Internet*. OR Books.
- Setiawan, R. (2021). *Cerita 79 Anak & Penghuni Panti Tunagrahita Tri Asih Positif Corona*. tirtoid. <https://tirtoid.com/cerita-79-anak-penghuni-panti-tunagrahita-tri-asih-positif-corona-f9j1>
- Setyowati, D. (2020). *Gojek dan Grab Bersaing Ketat Sasar UMKM dan Warung saat Pandemi*. Katadata. <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f5b246396801/gojek-dan-grab-bersaing-ketat-sasar-umkm-dan-warung-saat-pandemi>
- Srnicek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Polity Press.
- Srnicek, N., & Williams, A. (2015). *Inventing the Future: Postcapitalism and a world without work*. Verso.
- Sutarsa, I. N., Prabandari, A., dan Itriyati, F. (2020). Bagaimana Sistem Tes COVID-19 di Indonesia Berpihak pada yang Kaya dan bukan yang Miskin. *The Conversation*. <https://theconversation.com/bagaimana-sistem-tes-covid-19-di-indonesia-berpihak-pada-yang-kaya-dan-bukan-yang-miskin-136846>
- Tiwana, A. (2014). *Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategies*. Elsevier.
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society: Public Values in A Connective World*. Oxford University Press.

NORMALISASI PREKARISASI DALAM NEOLIBERALISME DI INDONESIA: MEMAHAMI PROGRAM MAGANG PADA MASA PANDEMI

Eko Razaki Wirman¹

ABSTRAK

Di Indonesia dan seluruh dunia, restrukturisasi neoliberalisme telah mempengaruhi cara pengelolaan bekerja. Begitu pula pengaruhnya terhadap institusi pendidikan yang semakin diarahkan pada kepentingan pasar untuk memastikan serapan tenaga kerja di kalangan pelajar dalam iklim pasar pekerja yang semakin gamang. Artikel ini melakukan studi terhadap Indonesia, negara dengan penduduk terpadat di asia tenggara, di mana separuh dari penduduk berusia di bawah 20 tahun; yang secara spesifik berfokus pada hubungan antara pendidikan tinggi dan pasar pekerja. Artikel ini mendeskripsikan bagaimana mahasiswa universitas di Indonesia memaknai program magang yang dirancang untuk menghadapi pasar tenaga kerja yang tidak stabil. Namun, mahasiswa yang berpartisipasi dalam program magang rentan mengalami eksploitasi, banyak yang bekerja melebihi kapasitas dan mengalami ketidakpastian terhadap serapan tenaga kerja di masa depan. Terlebih, krisis pandemi COVID-19 telah mengamplifikasi dan menormalisasi praktik tersebut diikuti dengan berkurangnya kekuatan ekonomi negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Artikel ini berargumen bahwa normalisasi terhadap eksploitasi yang dialami tenaga magang—khususnya di agensi periklanan kawasan Jakarta—dikondisikan oleh pembentukan subjektivitas individu tenaga magang dalam iklim kapitalisme neoliberal. Konsep *Neoliberal Governmentality* dari Foucault akan digunakan sebagai kerangka konsep untuk menjelaskan pengaruh neoliberal terhadap pembentukan subjektivitas individu. Selama menjalani program magang, pelajar menjustifikasi eksploitasi yang mereka terima untuk meningkatkan kualifikasi mereka sebagai investasi masa depan. Pembentukan subjektivitas neoliberal merupakan mekanisme bagi pelajar untuk dapat meningkatkan

¹ Penulis adalah asisten dosen pada Program Sarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ia dapat dihubungi di eko.razaki@ui.ac.id.

peluang dalam mengamankan posisi di pasar pekerja tanpa ada jaminan baik dari mekanisme pasar maupun pemerintah.

Kata-kata Kunci: Indonesia, Neoliberalisme, Prekarisasi, Subjektivitas Neoliberal, Program Magang, Pandemi

PENDAHULUAN

Pandemi global COVID-19 membawa perubahan signifikan terhadap kondisi pasar kerja di Indonesia. Perubahan ini ditandai salah satunya oleh peningkatan drastis angka pengangguran di Indonesia yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah PHK karyawan serta menurunnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Data dari Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menunjukkan pada akhir tahun 2020 angka pengangguran mengalami peningkatan tertinggi dalam satu dekade terakhir, mencapai 9.2% (BAPPENAS, 2020). Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di penghujung tahun 2020 juga berkontribusi dalam meningkatkan kerentanan pekerja (Nastiti, 2020). Undang-undang ini akan menghilangkan batas jenis pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga alih daya (*outsourcing*), menghilangkan periode batas waktu kontrak bagi karyawan untuk diangkat menjadi karyawan tetap, hingga meningkatkan keleluasaan perusahaan untuk dapat melakukan PHK terhadap karyawan.

Salah satu kelompok yang paling terkena dampak perubahan kondisi pasar kerja selama pandemi adalah kelompok usia muda-mereka yang berusia 15-34 tahun (LPEM FEB UI, 2021). Fokus dari artikel ini adalah mahasiswa, yang terdampak kompetisi yang semakin ketat untuk dapat memasuki pasar pekerja se usai masa studinya. Selain harus bersaing dengan sesama calon lulusan baru, mahasiswa juga harus bersaing dengan jumlah pengangguran yang membesar sejak pandemi berlangsung. Kondisi ini mendorong mahasiswa untuk mengembangkan berbagai strategi, misalnya mulai berupaya untuk membangun kualifikasi yang memenuhi standar pasar pekerja, meskipun masih berstatus sebagai pelajar. Salah satu strategi yang umum dijalankan mahasiswa untuk dapat memperbesar peluang mereka mendapat pekerjaan yang layak adalah melalui kegiatan magang (Corrigan, 2015; Siebert dan Wilson, 2013). Seringkali, keinginan untuk mengamankan diri di tengah

kondisi pasar kerja yang serba tidak pasti mendorong penerimaan peserta terhadap eksploitasi yang mereka alami di tempat magang.

Berbagai penelitian berupaya menggali motivasi yang mendorong keikutsertaan mahasiswa dalam program magang, juga mengungkap kondisi eksploitatif yang dialami peserta magang (Corrigan 2015, IP 2015). Corrigan (2015), misalnya, menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam program magang didasari oleh kebutuhan peningkatan kualifikasi diri melalui peningkatan keterampilan, perluasan koneksi profesional, dan membangun citra diri. Tenaga magang mendapatkan kepuasan dalam pengalamannya apabila pekerjaannya dirasa “bermakna” – yaitu ketika memiliki kesempatan untuk mendapatkan supervisi dan kepercayaan dari supervisor untuk mengeksekusi langsung pekerjaan arus utama dari perusahaan yang diikutinya (Corrigan, 2015). Peserta magang seringkali dibebani dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ditetapkan oleh divisi di mana mereka ditempatkan, juga dengan keterampilan yang ingin mereka kuasai melalui program magang. Kondisi ini menghilangkan makna kegiatan magang bagi peserta magang. Namun demikian, peserta magang menerima peningkatan beban pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, menerima eksploitasi dirinya (Corrigan, 2015).

Ip (2015) menemukan bahwa peserta magang menjustifikasi beban kerja berlebih dalam kegiatan magang karena melihatnya sebagai bagian dari proses belajar, dan melihat dirinya sebagai pelajar yang memisahkan diri mereka dengan kolega pekerja penuh waktu. Pada prinsipnya, peserta melihat kegiatan magang sebagai upaya untuk belajar dari pengalaman hidup ‘sesungguhnya’ – sebagai keberlanjutan dari pengalaman sehari-hari sebagai pelajar di universitas, ketimbang sepenuhnya sebagai strategi meningkatkan kompetensi untuk mencapai karir yang diinginkan.

Namun, studi Corrigan (2015) dan IP (2015) belum menjelaskan proses yang mengkondisikan normalisasi kondisi eksploitatif yang dialami peserta magang. Proses normalisasi ini mengkondisikan penerimaan peserta magang terhadap eksploitasi perusahaan terhadap diri mereka. Proses normalisasi ini disinggung oleh Cockayne (2020), lewat studi kasus terhadap tenaga magang di perusahaan digital (google, facebook,

dan microsoft), yang menerapkan metode pembelajaran co-op (*Cooperative Learning*) di *University of Waterloo*, Kanada. Co-op merupakan bentuk manifestasi dari pendidikan neoliberal yang mendorong mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang matang, dengan mendorong mahasiswa untuk menuai sebanyak-banyaknya kualifikasi sebagai calon tenaga kerja, antara lain lewat praktik magang. Temuan utama dari penelitian ini menjelaskan bahwa norma dan budaya organisasi perusahaan membentuk normalisasi budaya '*overwork*' di antara peserta magang.

Artikel ini mengembangkan argumen terkait bagaimana eksploitasi telah dinormalisasi melalui magang. Sejalan dengan argumen Cockayne (2020), yang sama-sama melihat perusahaan dan pendidikan sebagai kombinasi institusi yang secara langsung berkontribusi melakukan normalisasi. Namun demikian, artikel ini menambahkan analisis terhadap peran negara dalam melanggengkan normalisasi eksploitasi tenaga magang. Konsep *governmentality* dari Foucault dan subjektivitas neoliberal—sebagaimana dijelaskan di bawah ini—akan digunakan sebagai kerangka yang dapat menjelaskan peran negara dalam proses normalisasi ini. Penelitian ini berargumen bahwa normalisasi terhadap eksploitasi yang dialami tenaga magang—diilustrasikan melalui kasus pada agensi periklanan di Indonesia—dikondisikan oleh pembentukan subjektivitas individu tenaga magang dalam iklim kapitalisme neoliberal. Negara turut berkontribusi dalam membentuk iklim tersebut, melalui berbagai intervensi terhadap pasar kerja dan institusi pendidikan. Dalam iklim tersebut, individu dikondisikan untuk mengambil tanggung jawab dalam membangun kompetensi diri, sehingga bisa memperoleh kerja yang baik dan sebagai konsekuensinya, mereka cenderung membenarkan eksploitasi yang mereka alami selama ini.

PREKARISASI DALAM INDONESIA YANG NEOLIBERAL

Konsep Foucault tentang *neoliberal governmentality* merujuk pada berbagai mekanisme yang dijalankan oleh berbagai pihak, termasuk negara dan perusahaan, untuk mempengaruhi cara individu berpikir dan bertindak. Tujuannya adalah untuk sebagai subjek yang otonom, terindividualisasi, dan memiliki karakter kewirausahaan (Türkena, Nafstada, Blakara, dan Roena, 2016). *Episteme* ini menginstruksikan setiap individu bertanggung jawab penuh dalam menavigasi dirinya di ranah

sosial melalui pembuatan keputusan yang rasional – dicontohkan melalui kalkulasi untung-rugi atas tindakan dan perilakunya (Hamann, 2009).

Neoliberal governmentality memosisikan manusia sebagai modal atau aset dari kapital–dengan kata lain, *human capital*–dan kondisi untuk secara mandiri mengembangkan potensi pribadinya untuk memberikan keuntungan lebih besar untuk sistem kapitalisme. Oleh sebab itu, individu memperoleh keyakinan untuk terus bekerja, meskipun pekerjaan yang dilakukan bersifat tidak pasti, tidak aman, dan tidak stabil (Türkena, Nafstada, Blakara, dan Roena, 2016). Sebagai dampaknya, *neoliberal governmentality* memanipulasi subjektivitas menjadi sebuah mekanisme kontrol sosial non-koersif yang mereproduksi status quo karena setiap individu akan merasa bertanggung jawab penuh atas kegagalan yang menimpanya jika tidak berproses melalui pengembangan diri secara terus menerus

Pemikiran ini mulai terinisiasi pada masa transisi era Fordisme dan Post-Fordisme. Sebelumnya, pekerja diasumsikan tidak memiliki otonomi terhadap dirinya sendiri dalam pekerjaannya, menyisakan sehingga seluruh kontrol keorganisasian dalam pekerjaan dipegang sepenuhnya oleh atasan atau manajer (Ezzy, 1997, hal. 429). Namun, “makna” dari pekerjaan telah mengalami transisi dengan kontrol yang lebih normatif dengan menghadirkan pembentukan konsep tentang “subjektivitas pekerja”, membentangkan metode kontrol yang bersifat lebih normatif. Beberapa literatur mengaitkan subjektivitas pada pekerja dengan proses pembelajaran dan pengalaman bekerja. Subjektivitas menjadi hal terpusat dalam menjelaskan hubungan antara individu, pekerjaan, dan pembelajaran (Billett, 2010). Somerville dan Fenwick (2006) menjelaskan subjektivitas membentuk identitas pekerja yang otonom, ditentukan oleh orientasinya sebagai individu yang berorientasi tak hanya pada pekerjaan, namun juga belajar dengan bekerja, *untuk menjadi pekerja yang lebih baik*. Saat masa Fordisme, sistem kontrol dan relasi industri dan pekerja diatur sepenuhnya oleh manajer dengan mengabaikan aspek-aspek “sekunder” seperti kreativitas atau konsep diri pekerja. Berbeda dengan masa Post-Fordisme yang lebih terpusat pada pengelo-

laan subjektivitas pekerja— dengan kata lain, bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri melalui pekerjaannya.

Beberapa pergeseran kondisi lingkungan kerja dalam era Post-Fordisme— ditandai dengan peningkatan fleksibilitas bekerja diikuti dengan perkembangan transmisi informasi yang berlangsung cepat secara global— telah mengubah orientasi subjektivitas pekerja dengan menuntut mereka untuk menjadi manajer bagi diri sendiri, independen dari supervisi superior seperti pada masa Fordisme. Wacana manajemen diri mengimplikasikan bahwa pekerja harus memenuhi kebutuhan pembelajarannya secara independen untuk dapat bertahan dan berkompetisi dalam ranah organisasinya (Somerville dan Fenwick, 2006).² Di Indonesia, ekspansi ideologi dan kebijakan neoliberal diaplikasikan ke berbagai sektor negara dengan cara yang spesifik. Untuk itu, artikel ini terlebih dulu akan mengelaborasi konteks historis perkembangan neoliberalisme di Indonesia sebagai latar belakang dari situasi saat ini— melihat pengaruh ekspansi ideologi dan kebijakan neoliberal di negara terhadap kegamanan atau prekarisasi dari kondisi bekerja saat ini, yang dicontohkan melalui status struktural atau posisi tenaga magang dalam pasar pekerja. Kedua, artikel ini akan melihat pengaruh ekspansi ideologi dan kebijakan neoliberal terhadap sektor pendidikan tinggi sebagai institusi yang “menyiapkan” mahasiswa untuk menghadapi keadaan rentan tersebut— seperti melalui praktik magang wajib.

Harvey (2007) mengelaborasi neoliberalisme sebagai doktrin ekonomi politik yang melihat kebebasan individu dan keterampilan wirausaha sebagai jalan tunggal untuk mencapai kesejahteraan manusia. Kerangka berpikir ini ditandai dengan hak kepemilikan pribadi yang kuat atau privatisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Peran negara dalam praktik tersebut adalah sebatas menyediakan institusi yang me-

² Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana normalisasi praktik-praktik eksploitatif dalam magang terjadi melalui pembentukan subjektivitas neoliberal di antara pemegang. Proses subjektifikasi ini terungkap melalui eksploitasi pengalaman dan persepsi individu yang telah bekerja sebagai pemegang di agensi periklanan Indonesia. Wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang mengambil bentuk wawancara semi-terstruktur terhadap sembilan mahasiswa universitas yang menjalankan program magang di antara 2017 hingga 2020. Semua informan memiliki latar belakang pendidikan serupa pada bidang ilmu sosial, dan telah mengalami eksploitasi saat proses magang mereka, dan juga melakukan program magang mereka pada agensi multinasional ketimbang nasional.

mastikan pasar bebas berjalan dengan baik dalam menjamin eksistensi dan keberlangsungan sektor privat – dengan kata lain, menghilangkan peran negara dalam menyediakan jaminan sosial seperti pendidikan atau kesehatan (Harvey, 2007). Salah satu dampak dari ekspansi neo-liberalisme adalah normalisasi bentuk pekerjaan yang tidak stabil dan tidak pasti, yang ditujukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan memaksimalkan fleksibilitas untuk pemberi kerja (Yasih 2017, hal. 35).

Indonesia pada awalnya menolak menerima pasal kerja yang fleksibel, khususnya di bawah rezim Orde Baru, yang lebih mengutamakan aturan-aturan yang sentralistis dan patrimonial (Yasih 2017, hal. 35). Namun demikian, setelah krisis ekonomi Asia di tahun 1997 disertai jatuhnya rezim otoriter (1966-1998), mendorong Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengkondisikan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Krisis ini telah memaksa Presiden Soeharto untuk menandatangani perjanjian dengan International Monetary Fund (IMF) dan berbagai organisasi internasional lainnya sebagai upaya untuk menggunakan bantuan finansial dari pihak internasional, IMF memberikan beberapa persyaratan untuk mendorong globalisasi ekonomi di Indonesia melalui pengajuan berbagai perubahan kebijakan (Hadiz, 2013). Salah satu persyaratan tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan fleksibilitas pekerja. Kebijakan fleksibilitas pekerja diberlakukan agar dapat meningkatkan jumlah investasi karena terdapatnya kelonggaran dalam aturan merekrut atau memberhentikan pekerja (Tjandraingsih, 2012). Dua dekade sejak perkembangan kebijakan ini, penguatan rezim fleksibilitas terjadi kembali pada momentum pengesahan Undang-undang Cipta kerja yang bertepatan pada masa resesi ekonomi di saat resesi ekonomi pandemi COVID-19—memicu proses informalisasi terhadap sektor formal, yaitu pengikisan perlindungan terhadap pekerja yang menghadirkan status pekerja kontrak dan alih daya dalam perusahaan.

Kondisi “fleksibilitas” pekerja semakin memperluas fenomena perentanan dalam pasar pekerja atau sebagai proses prekarisasi pekerja. Standing (2011) memperkenalkan istilah ‘Prekariat’ untuk mengidentifikasi kelompok pekerja yang mengalami prekarisasi pekerja. Status sebagai pekerja prekariat membuat pekerja rentan dengan pemutusan

hubungan kerja dan mengalami kondisi bekerja yang tidak stabil. Meskipun prekariat merupakan fenomena kemunculan kelas baru, namun berdasarkan definisinya, kondisi ini bukan merupakan gejala baru di Indonesia (Polimpung, 2018), seperti yang ditandai salah satunya oleh besarnya pekerja di berbagai sektor informal mulai dari tahun 1970 di Indonesia (Tjandraningsih, 2012). Pada 1971, populasi pekerja informal berada pada 25% dan mengalami peningkatan secara berkala hingga di Agustus 2020 jumlah populasi pekerja informal sudah mencapai 60,47% (BPS, 2020). Pemicu dari peningkatan ini adalah proses urbanisasi: penambahan penduduk usia produktif yang bergerak menuju daerah perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan yang pada saat itu dilihat memiliki upah lebih baik dibandingkan pekerjaan agrikultur di pedesaan. Tanpa memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai, penduduk tersebut harus bernegosiasi dengan mengadopsi pekerjaan di luar sektor formal di perkotaan (Swadesi dan Purwanto, 2017). Minimnya keamanan kerja dalam sektor pekerjaan informal memiliki karakteristik yang sangat erat dengan pekerjaan prekariat (Tjandraningsih, 2012).

Kini prekarisasi kerja ini dialami, bukan hanya oleh pekerja pada sektor informal – yang proporsinya selalu tinggi dalam angkatan kerja—namun juga dialami oleh pekerja sektor formal melalui proses yang disebut sebagai ‘informalisasi’. Pekerja formal pun juga dapat menjadi bagian dari kelas prekariat apabila dilihat dari status ikatan pekerjaan dan kondisi bekerjanya yang menyerupai pekerja outsourcing ataupun pekerja kontrak (Tjandraningsih, 2012; Swadesi dan Purwanto, 2017). Berdasarkan prekarisasi yang terjadi kepadanya, tenaga magang termasuk sebagai bagian dari kelas prekariat.

Selain pengaruhnya pada sektor pasar pekerja yang mengalami fleksibilitas, neoliberalisme juga terinternalisasi ke dalam institusi pendidikan (Silalahi dan Aminda, 2018). Sementara perjanjian IMF pada 1997 tidak secara langsung memberikan persyaratan pada sektor pendidikan, terdapat peningkatan keleluasaan teknokrat pemerintahan dan donor internasional yang dapat menentukan arah dan kebijakan pemerintah—dalam kasus ini—terkait pendidikan (Rosser, 2015). Peluang ini memicu perkembangan kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengikuti prinsip neoliberal yang berlangsung secara bertahap selama beberapa tahun,

yang diilustrasikan melalui berbagai kebijakan seperti otonomi yang diberikan kepada institusi pendidikan tinggi (universitas, politeknik, dan sejenisnya) dalam mengelola dan upaya memperoleh tambahan sumber daya; meningkatkan kompetisi antar institusi pendidikan tinggi melalui keterlibatan sektor privat dalam pengelolaannya; dan meningkatkan akuntabilitas pendidikan tinggi dalam rangka memudahkan penggalangan dana publik. Pada praktiknya, pendidikan neoliberal akan mengarah kepada keberpihakan terhadap kebutuhan pasar—secara spesifik, pendidikan telah beralih menjadi institusi yang berorientasi untuk mencetak pekerja (Silalahi dan Aminda, 2018), yang mana kegiatan magang di universitas yang umumnya diwajibkan kepada mahasiswa semester akhir untuk memenuhi kredit akademis.

PEMERINTAHAN FLEKSIBILITAS DALAM KEGIATAN MAGANG

Sektor industri yang menjadi bahasan dalam penelitian ini budaya yang menghasilkan produk-produk kultural nonmanufaktur, dengan fokus terhadap industri periklanan. Pekerja yang terlibat dalam jenis industri tersebut tergolong sebagai pekerja nonmaterial (*immaterial labor*), bersama dengan pekerja di sektor lain jasa, produk budaya, pengetahuan, atau komunikasi (Hardt dan Negri dalam Lee, 2013, hal. 6). Agensi periklanan, dalam definisi sederhana, bergerak dalam upaya menghasilkan produk-produk simbolik yang bertujuan mempersuasi masyarakat namun pekerjaannya, termasuk tenaga magang, juga mengalami prekarisasi pekerjaan seperti pekerja nonmaterial lainnya. Industri ini memiliki tendensi untuk menuntut jam kerja yang fleksibel (Alvesson, 1998; Ladner, 2008; Kerr dan Proud, 2005), dan industri periklanan saat ini bergerak dengan fase yang sangat cepat dalam iklim bekerja fleksibel yang sejalan dengan kerangka neoliberal karena metode operasional yang sangat spesifik dan terdiferensiasi menimbulkan risiko tidak sesuai dengan pasar yang dapat mereka masuki secara global (Grein dan Du-coffee, 1988, hal. 308).

Pekerja di agensi periklanan seringkali diminta untuk mengerjakan urusan perusahaan di luar jam kerja formal, di mana mereka akan bekerja lembur melalui sarana komunikasi online setelah sampai di rumah. Dengan begitu, jam bekerja yang dirasakan menjadi jauh lebih banyak dari apa yang ditetapkan (Ladner, 2008; Ladner, 2009). Pekerja

agensi yang bekerja di luar ketetapan jam bekerja sering tidak mendapatkan upah lembur, dan jika iya harus melalui proses negosiasi (Ladner, 2009). Dalam mekanisme ini, pekerja dialokasikan sebagai “sumber daya” yang “dialokasikan” terhadap “proyek” (Ladner, 2009).

Kondisi bekerja yang tidak stabil, tidak aman, dan tidak pasti ini juga dialami oleh pekerja di agensi periklanan di Indonesia, yang secara konstan memiliki risiko kesehatan fisik dan jiwa. Pada 2013, Mita Diran, seorang *copywriter*³ di agensi multinasional Y&R meninggal setelah bekerja 30 jam penuh tanpa waktu tidur dan pola makan yang tidak teratur (Dhani, 2017). Jam kerja yang panjang serta beban kerja yang besar setiap harinya disebabkan oleh beberapa kondisi dari rancangan bisnis agensi periklanan itu sendiri, di mana sumber pemasukan utama dari agensi bergantung dari jumlah klien yang berhasil diperoleh. Mendapatkan kepercayaan dari klien memerlukan kompetisi yang ketat dengan berbagai agensi lain yang memperebutkan peluang bisnis tersebut melalui proses *pitching* dengan hasil yang tidak pasti karena seluruhnya bergantung dari keputusan subjektif klien, sedangkan pada dasarnya “kreativitas” yang dimiliki pekerja sulit untuk diukur (Alvesson, 1998). Selain itu, kendali terbesar yang mengatur beban pekerjaan berada di tangan klien yang cenderung tidak memiliki perjanjian atau kontrak yang melindungi pekerja agensi dalam menyediakan jasanya. Hal ini menyebabkan klien bebas untuk menghubungi dan memberikan pekerjaan kepada pekerja agensi—bahkan di luar dari jam bekerja yang telah ditentukan oleh agensi itu sendiri.

Informan dalam artikel ini memiliki pemaknaannya tersendiri terhadap pengalaman kegiatan magangnya. Namun, sudut pandang dari subjektivitas neoliberal dapat memberikan pemahaman terhadap pengalaman kolektif ini dan pemaknaan terhadap pekerjaan dibentuk oleh faktor struktural. Peserta magang yang berstatuskan mahasiswa mengidentifikasi dirinya sebagai calon pekerja. Dua hal utama yang menjadi perhatian peserta saat memutuskan untuk mengikuti kegiatan magang adalah *barrier to entry* pasar kerja yang sangat kompetitif dan kemampuan bertahan ketika telah memasuki masa bekerja dengan kondisi rentan,

³ Bertugas membuat naskah/teks (*copy*) dengan tujuan untuk mempromosikan sebuah produk/jasa.

salah satunya diungkapkan melalui kekhawatiran salah satu narasumber, DP:

“...*Insecure* karena semua orang sadar akan kondisi itu, kondisi pasar yang makin—*employment* yang makin kompetitif, makin kreatif, makin...pokoknya makin *advance* banget. Terus *gue ngerasa* orang sadar dan orang memperkaya dirinya untuk memenuhi dirinya, untuk bisa *fit* di kondisi *employment* yang kayak gitu. Dan *gue ngeliat* orang dari sekarang pun ikut lomba, magang di usia muda kayak gitu gitu...” (DP, wawancara personal, 11 April 2019).

Berdasarkan situasi tersebut, nilai kegiatan magang akan dirasa semakin bermanfaat jika kondisi yang ditawarkan semakin sulit karena dilihat dapat melatih kemampuan adaptasi terhadap prekarisasi pekerja di masa mendatang. Dengan kata lain, peserta magang merasa aman ketika dalam kondisi tidak aman. Hal ini tergambarkan dalam pemikiran Foucault bahwa meskipun subjektivitas dalam neoliberalisme mengglorifikasikan individu yang memiliki otonomi (dalam hal kebebasan), sesungguhnya individu tersebut tidak terlepas dari opresi struktural⁴ (Foucault dalam Ezzy, 1997; Türkena, Nafstada, Blakara, dan Roena, 2016).

Seiring kekuatan struktural dalam neoliberalisme memberikan berbagai kegamangan sosial dan ekonomi, termasuk pada ketersediaan kesempatan kerja di masa depan (Standing, 2011), krisis COVID-19 memperparah kondisi ini tak hanya dengan membawa kepada pengangguran dan mengurangi pembukaan lowongan kerja, namun juga membatasi ketersediaan program magang. Meskipun kegiatan magang sangat populer dan didukung oleh perguruan tinggi, mahasiswa belum tentu memiliki jaminan memperoleh kesempatan mengikuti program magang terutama selama masa pandemi. Untuk itu, peneliti juga melihat pemaknaan magang dari sudut pandang mahasiswa yang sulit mendapatkan kesempatan mengikuti program magang, yaitu melalui MP, salah satu dari informan penelitian ini. MP mengungkapkan kekhawatirannya sebagai mahasiswa tingkat akhir yang masih belum memperoleh kesempatan magang, meskipun tidak ada kewajiban dari universi-

⁴ Berbagai faktor eksternal yang dipengaruhi oleh neoliberalisme selaku ideologi, sistem ekonomi, hingga sistem pemerintahan.

tas. Selama proses pencarian kesempatan magang, berdasarkan uraian dari pengalaman teman-temannya yang sudah lebih dulu magang MP sudah mempelajari risiko yang akan dihadapinya jika berhasil menjadi peserta, seperti upah yang rendah, jam bekerja yang panjang, dan beban pekerjaan yang berat. Namun MP tetap menganggap kegiatan magang sangat penting dalam menentukan nasibnya dalam pasar pekerja ke depan, terutama ketika dihadapi dengan keadaan krisis saat pandemi.

“Menurut teman saya, risiko magang itu mencakup *mentally exhausted*, kalo kata temen-temen *gue* ya. Mereka sering *bangget* bilang ‘ga sanggup’. Bahkan temen *gue* ada yang masuk Psikolog, *pressure*-nya *gede* gitu, dan juga WFO, sampai pagi masih di kantor disuruh bikin *copy*...*gue* menganggap hal-hal ini emang risiko dari magang, tapi pasti terbayarkan dengan ilmu yang *didapet*, keterampilan, *skill*” (MP, wawancara personal, 22 Mei 2021).

Meski demikian, MP justru tetap merasa lebih aman menjadi tenaga magang yang tereksplotasi dibandingkan dengan statusnya saat ini yang masih sepenuhnya menjadi mahasiswa tanpa pengalaman, karena hal ini akan berdampak kepada hilangnya kesempatan pembelajaran yang hanya dapat diperoleh ketika ia magang. Serupa dengan pengalaman MP, informan lain juga menjadikan pengalaman dan pembelajaran sebagai, yang dianggap dapat meningkatkan kualifikasi informan untuk mendapatkan karier idealnya di masa depan. Banyak yang menggunakan waktu libur perkuliahan untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi. RH melihat pengalaman merupakan bagian dari modal untuk stabilitas karier di masa depan:

“*gue* ngerasa kalo magang itu perlu karena itu bakal jadi apa, ya bakal jadi pengalaman dari magang itu bisa jadi senjata *gue* ketika *gue* udah lulus nanti. Itu sih. Jadi *sebenarnya* setiap *gue* libur ada *gap* semester *gue* pasti *nargetin* antara *gue* magang atau *at least* sambil *freelance* itu sih” (RH, wawancara personal, 15 April 2019).

Meski demikian, pilihan untuk magang di industri periklanan tidak secara langsung memberikan refleksi terhadap pilihan karir masa depan. Reputasi kondisi bekerja industri periklanan yang berat diasum-

sikan oleh informan sebagai sarana yang baik untuk ajang pengembangan diri untuk persiapan pasar kerja.— meskipun mereka tidak memiliki rencana untuk mengadopsi karir jangka panjang di agensi periklanan. Dengan pemahaman informan terhadap kerentanan pekerjaan di industri periklanan terhadap eksploitasi— baik dari sisi insentif yang rendah, beban kerja yang besar, hingga jam bekerja yang berlebihan— Informan melihat agensi *in-house* dari perusahaan *e-commerce* ataupun bekerja di *startup* dapat lebih mensejahterakan mereka. Sebagian melihat bahwa wirausaha adalah solusi dari seluruh eksploitasi yang harus dihadapi pekerja, di saat bersamaan informan berpandangan sama bahwa permintaan terhadap agensi periklanan mulai terkalahkan. Di sisi lain, informan melihat beberapa celah yang dianggap dapat memberikan keuntungan baginya dengan mengikuti program magang di agensi periklanan, terutama agensi periklanan multinasional, yang dapat menjadi modal awal untuk perjalanan karier masa depan yang diinginkan oleh para informan melalui reputasi perusahaan.

Beberapa informan mengaitkan kebutuhan untuk belajar melalui magang dengan unsur ketidakpuasan terhadap pendidikan yang dijalannya di perguruan tinggi yang dianggap tidak mampu mengakomodasi kebutuhan informan untuk meningkatkan daya saing individu dalam kompetisi pasar kerja. Dalam hal ini, beberapa informan mengasumsikan pendidikan di perguruan tinggi milik privat dapat lebih baik mengakomodasi kebutuhan pelajar terhadap peningkatan kualifikasi dalam ranah industri.

*“Gue ngebandingin sama temen-temen gue yang sekolahnya di BINUS [Universitas Bina Nusantara, universitas privat], mereka kuliah bener-bener bikin *campaign* gitu, terus mereka diwajibkan untuk magang, sehingga *benefit*-nya magang itu walaupun memang mereka nggak dibayar, ya *at least* itu bikin gue lulus, terus gue dapet nilai gitu kan. Di sini kan *nggak*”* (NH, wawancara personal, 8 April 2019).

Para informan juga berargumen bahwa universitas tidak menyediakan fasilitas yang representatif untuk mengasah kualifikasinya sebagai calon pekerja. Sebagai contoh, KL, salah satu informan yang memiliki ekspektasi untuk dapat mengobservasi langsung kegiatan di studio

production house yang melakukan produksi terhadap konten visual periklanan.

“Kalau di agensi kan bisa lihat proses produksinya, misal masuk studio di PH (...) ini pengalaman yang *ga* bisa didapetin selama kuliah karena kan ini sifatnya lebih wajib, lebih profesional. Kalau ada kerjaan yang *ga* dikerjain konsekuensinya lebih besar dari yang di kampus” (KL, wawancara personal, 23 Oktober 2020).

Dengan kata lain, praktik lapangan dimaknai oleh informan sebagai momentum pembelajaran yang paling esensial dibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat teoritis dan konseptual. Hal ini juga diungkapkan oleh SR, seorang tenaga magang di agensi multinasional

“Pendidikan S1 *gue* ini emang fokusnya lebih ke arah *theoretical*. Hmm.. praktiknya ada, cuma, menurut *gue* itu bener-bener masih bisa *dimaksimalin* lagi, sih, kalau misalnya praktik karena sayang kali, ya. Ya, *gue* enggak tau, sih, emang kita bukan vokasi, sih. Cuma, ya, misalnya *lo* mau praktik ya udah *lo* magang aja, gitu, ya teorinya di sini...” (SR, wawancara personal, 27 April 2019).

Subjektivitas tersebut merupakan manifestasi dari neoliberalisme-diri atas respons terhadap pasar kerja yang kompetitif dibarengi dengan hilangnya jaminan kesejahteraan dari pemerintah, sehingga individu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kemampuan bertahannya dengan mengaplikasikan mentalitas kewirausahaan diri (Türkena, Nafstada, Blakara, dan Roena, 2016). Sementara fungsi institusi pendidikan telah direduksi menjadi “mencetak pekerja”, minimnya kursus praktis dengan mudahnya dihilangkan sebagai kelemahan nyata dari sistem pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan refleksi dari pendidikan neoliberal di Indonesia sebagai perwujudan dari wewenang pihak yang membentuk arah kebijakan pendidikan pro neoliberal – teknokrat pemerintah, donor internasional, yayasan swasta (Rosser, 2015).

Dalam beberapa keadaan tertentu, tenaga magang bahkan dapat melakukan eksploitasi diri dengan secara sengaja menciptakan keadaan tidak aman untuk dirinya ketika magang berlangsung. Salah satu apli-

kasi dari upaya tersebut adalah dengan meningkatkan inisiatif. Informan mengasumsikan bahwa pekerjaan merupakan sarana pembelajaran paling konkret karena berkontribusi paling besar dalam menciptakan pengalaman, seperti preferensi untuk mengemban pekerjaan dengan tanggung jawab yang signifikan yang memberikan mereka kepuasan dengan rasa pencapaian. Banyak juga yang tidak menyukai waktu kosong. Perilaku eksploitasi diri menjadi bukti ketika tenaga magang bekerja ekstra tanpa ada jaminan insentif, baik finansial maupun nonfinansial, dengan kesadaran bahwa pekerjaan ekstra mereka dapat mendatangkan keuntungan lebih besar kepada perusahaan; dijustifikasi dengan pemahaman bahwa aksi mereka merupakan upaya untuk menjaga nama baik mereka.

Eksploitasi diri dipicu oleh ambiguitas pekerjaan yang besar yang datang bersama dengan pekerjaan mereka, seiring para informan telah melakukan komplain perihal banyaknya pekerjaan “remeh temeh” yang tidak relevan dengan divisi tenaga magang ditempatkan. Ambiguitas ini juga dipicu oleh kesulitan informan untuk menakar seberapa besar pengalaman magangnya berkontribusi untuk proses “pembelajarannya”. Di satu sisi, mereka merasionalisasi apa yang diperoleh selama kegiatan magang merupakan substitusi dari kompensasi keuangan—setara dengan kontribusi mereka kepada agen iklan tempat mereka magang. Namun, tidak terdapat acuan khusus yang memastikan setiap peserta magang akan memperoleh pembelajaran dalam skala tertentu baik seperti adanya standar kompetensi atau peningkatan *skill*. Sadar ataupun tidak, ambiguitas ini memaksa para informan berpersepsi bahwa mengambil inisiatif adalah kunci utama untuk mendapatkan pembelajaran sebanyak-banyaknya selama kegiatan magang. Skenario penuh ketidakpastian ini juga dapat mengamplifikasi rasa lelah bekerja yang dialami terkait terus bertambahnya beban pekerjaan mereka untuk memperoleh manfaat “pembelajaran” yang mereka harapkan.

Eksploitasi diri begitu pula esensinya merupakan upaya untuk dapat memaksimalkan potensi pembelajaran yang diperoleh selama magang. Namun, kondisi bekerja yang mengalami prekarisasi tidak memberi jaminan apapun bagi tenaga magang untuk memperoleh ekspektasi yang diharapkannya—baik dari segi pembelajaran atau kesempatan

untuk mengamankan posisi di pasar pekerja kelak. Sebagai contoh, KL memiliki ekspektasi mengalami praktik langsung pada proses produksi konten visual di studio *production house*. Namun selama masa pandemi hanya pegawai dengan jabatan tertentu yang dapat memasuki studio, dan tidak ada yang dapat dilakukan KL untuk mengendalikan situasi tersebut. Terlebih, selama pandemi sebagian besar waktu pekerja dirumahkan (*work from home*), ekspektasi untuk terlibat dalam kegiatan praktik pun semakin tidak dapat terwujud.

Peserta magang yang tidak memiliki kendali terhadap kondisi bekerjanya hanya dapat beraktivitas berdasarkan perintah dari atasan—yang cenderung tidak terduga, samar, dan mendadak. Kerap kali permintaan dari atasan tersebut diperoleh setelah jam bekerja usai pada malam hari. Meskipun terdapat ketentuan jam bekerja dalam kontrak, peserta magang merasa harus siap siaga dengan tugas-tugas tak terduga selama sepanjang hari. Secara paradoks, pengalaman eksploitasi ini justru malah mengundang eksploitasi lebih jauh karena terdapat keinginan tenaga magang untuk berinisiatif meminta pekerjaan-pekerjaan yang berat. Berdasarkan wawancara, perusahaan sama sekali tidak menyediakan program pelatihan yang dapat memberikan gambaran jelas apa yang akan mereka hadapi, sehingga tenaga magang dapat mengatur ekspektasinya. Contohnya pada kasus KL yang mengajukan dirinya untuk terlibat *pitching* meski berisiko untuk mengalami lembur dan tekanan tinggi karena dalam keadaan gamang tersebutlah yang membuat KL dapat memaknai esensi kegiatan magang yang diikutinya.

Meski demikian, tetap tidak ada jaminan bagi tenaga magang dapat mengamankan posisinya dalam pasar kerja. Hal yang berubah setelah program adalah subjektivitas pribadi—bahwa pengalaman eksploitasinya telah menjadikannya individu yang lebih terqualifikasi dan kompeten. Normalisasi akan kerja prekarisasi pada kondisi bekerja melalui program magang membentuk subjektivitas bahwa tenaga magang bertanggung sepenuhnya terhadap nasibnya. Informan mengatakan bahwa satu hal yang berusaha mereka coba pertahankan selama program magang adalah citra publik mereka—secara konsisten mengupayakan pembentukan ‘kesan baik’ kepada kolega dan atasan di agensi, yang mereka persepsikan memiliki semacam kontrol terhadap stabilitas karier di

masa depan. Persepsi akan kontrol tersebut juga menentukan ekspektasi kerja magang mereka: kewenangan kolega yang lebih berpengalaman untuk membukakan akses melalui koneksi atau kesempatan yang lebih baik, sedangkan performa yang buruk dapat merusak reputasi mereka dalam sirkulasi jaringan superior mereka. Singkatnya, tenaga magang berperan sebagai pemerintah yang menciptakan batasan-batasan bagi dirinya sendiri—bahkan tanpa diperlukan kebijakan yang mengatur perilaku informan secara spesifik yang berpengaruh terhadap reputasi mereka. Meski iklim neoliberalisme memberikan kesan kebebasan bagi tenaga magang untuk memilih tindakannya, sesungguhnya mereka tetap dalam keadaan yang teropresi oleh keadaan struktural (Foucault dalam Türkena, Nafstada, Blakara, dan Roena, 2016).

KESIMPULAN: EKSPLOITASI SEBAGAI TATA KELOLA DIRI

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pembentukan subjektivitas neoliberal pada tenaga magang menyebabkan normalisasi terhadap eksploitasi selama program magang berlangsung, terutama selama masa krisis pandemi COVID-19. Penulis menetapkan argumen pertama lewat mengelaborasi konteks sosio-historis di Indonesia—seperti bagaimana mengakarnya neoliberalisme menyebabkan kemerosotan secara kontinu pada beberapa dekade terakhir terhadap pasar pekerja dan sistem pendidikan di Indonesia yang berpihak kepada kebutuhan pasar. Kemerosotan tersebut memberikan keadaan rentan pada pekerja karena telah kehilangan jaminan pemerintah terhadap perlindungan pekerja, maupun hak-hak afirmasi lainnya.

Konsep *neoliberal governmentality* oleh Foucault menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan pasar menyebabkan masyarakat terindividualisasi dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraannya—dengan kata lain menjadi pemerintah bagi dirinya sendiri. Pembentukan subjektivitas dalam iklim neoliberal terrealisasi dalam glorifikasi kewirausahaan diri (*self-entrepreneurism*), di mana masyarakat berlomba-lomba untuk meningkatkan kualifikasi dirinya (*self-development*) agar dapat bertahan di bawah iklim neoliberalisme. Pemikiran ini teraplikasikan dalam fenomena kegiatan magang yang diikuti mahasiswa untuk mengamankan dirinya dalam pasar kerja kelak. Pada gilirannya, kegiatan magang yang terprekarisasi mengalami

normalisasi dalam neoliberalisme pasar pekerja melalui pembentukan subjektivitas neoliberal sebagai keadaan habitual dalam pasar pekerja di neoliberalisme. Artikel ini mengelaborasi bagaimana pembentukan subjektivitas neoliberal tersebut—dan peran yang mereka mainkan—melalui pemaknaan dan pengalaman informan selama magang.

Pertama, pemaknaan informan berupa “perasaan yang aman yang dirasakan dalam pembentukan kondisi yang tidak aman.” Memasuki kondisi pasar pekerja yang mengalami prekarisasi merupakan pengalaman intimidatif yang menanti mereka di masa mendatang—dan program magang merupakan kesempatan untuk mengasah diri mereka menjadi “terkualifikasi.” Pada gilirannya, logika ini mendorong peserta magang untuk hanya lebih memaknai esensi dari kegiatan magang yang dijalannya apabila semakin berat kondisi bekerja yang dihadapinya. Sebagian informan juga menyatakan bahwa salah satu motivasinya untuk mengikuti kegiatan magang di agensi periklanan adalah justru karena reputasi industri tersebut yang memiliki beban pekerjaan berat. Bahkan ketika informan sudah mengetahui kerentanan pekerjaan di industri periklanan yang akan dihadapi—seperti insentif yang rendah, beban kerja yang besar, hingga jam bekerja yang berlebihan—yang sesungguhnya sama dengan eksploitasi. Kondisi tidak aman tersebut justru dijustifikasi sebagai kesempatan yang representatif untuk belajar dalam meningkatkan kompetensi diri—meskipun sebagian besar informan merasakan agensi periklanan hanya sebagai batu loncatan.

Pemaknaan ini juga menyinggung pemaknaan tenaga magang mengenai kebutuhannya terhadap institusi pendidikan—dalam konteks ini universitas—yang ideal, yaitu pendidikan yang mampu mengakomodasi persiapan untuk bersaing di industri. Informan mempersepsikan perkuliahan dan pekerjaan mereka sebagai dunia yang berbeda yang tidak memiliki keberlanjutan satu sama lain, di mana kegiatan magang cenderung dilihat sebagai persiapan untuk “dunia nyata” kerja. Melalui kegiatan magang, tenaga magang berekspektasi untuk mendapatkan pengalaman, pembelajaran, dan jaringan—yang berjalan selaras dengan perkembangan arah pendidikan yang terpengaruhi oleh nilai-nilai neoliberalisme, yaitu institusi yang berfungsi untuk mencetak pekerja.

Kedua, pengalaman eksploitasi diri yang berakar dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi tenaga magang dalam meningkatkan kompetensi mereka, menyebabkan tenaga magang menjamin sendiri keberlangsungan “pengalaman pembelajaran” mereka demi investasi terhadap stabilitas karier di masa depan. Sebagai upaya untuk mengatasi ambiguitas ini, tenaga magang akan mengambil inisiatif dengan meminta dilibatkan terhadap pekerjaan dengan beban yang besar kepada atasannya karena menempatkan diri sendiri dalam situasi penuh tekanan dilihat sebagai bagian dari pembelajaran.

Tenaga magang menerima seluruh prekarisasi yang dihadapinya secara sukarela. Penerimaan ini juga dipengaruhi keterbatasan otonomi tenaga magang terhadap nasibnya. Atasan dan kolega kerja dirasa memegang sebagian kendali terhadap kesempatan tenaga magang untuk mengamankan posisi mereka di pasar kerja, seperti praktik pemberian rekomendasi atau *review* antarkolega. Tenaga magang menjadi tidak memiliki daya resistensi yang besar terhadap atasannya tersebut, seperti menuntut pembelajaran yang memenuhi ekspektasinya ataupun hak-hak pekerja mendasar lainnya seperti upah atau jam bekerja. Penerimaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai refleksi dari kekhawatiran informan terhadap jaminan pasar pekerja—sehingga tenaga magang terus menerus mempraktikkan mentalitas kewirausahaan melalui *self-development* yang berujung kepada praktik-praktik eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvesson, M. (1994). Talking in Organizations: Managing Identity and Impressions in an Advertising Agency. *Organizational Studies*, 15(4), 535-563.
- Billett, S. (2010). Lifelong learning and self: work, subjectivity and learning. *Studies in Continuing Education*, 32(1), 1-16.
- Cockayne, Daniel. (2020). Learning to Labor in High Technology: Experiences of Overwork in University Internship at Digital Media Firms in North America. *Social & Cultural Geography*, 1-20.
- Corrigan, T. F. (2015). Media and Cultural Industries Internships: A Thematic Review and Digital Labour Parallels. *tripleC*, 13(2), 336-350.

- Dhani, A. (2017, February 26). Ancaman Kematian Pekerja Kreatif. *Tirto*.
id. <https://tirto.id/ancaman-kematian-pekerja-kreatif-cjJp>
- Ducoffe, A. G. (1988). Strategic responses to market globalisation among advertising agencies. *International Journal of Advertising*, 17(3), 301-319.
- Ezzy, D. (1997). Subjectivity and the labour Process: Conceptualising 'Good Work'. *Sociology*, 31(3), 427-444.
- Fenwick, T., & Somerville, M. (2006). *Work, Subjectivity, and Learning*. Springer.
- Hadiz, Vedi R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35 - 57.
- Hamann, T. H. (2009). Neoliberalism, Governmentality, and Ethics. *Foucault Studies*, 6, 37-59.
- Ip, I.-c. (2015). Negotiating Educated Subjectivity: Intern Labour and Higher Education in Hong Kong. *TripleC*, 13(2), 501-508.
- Kerr, G. F., & Proud, B. (2005). Hiring Graduates: Perspectives From Advertising And Public Relations Employers. *ANZMAC 2005 Conference: Marketing Education*, 95-100.
- Nastiti, A. (2020). Mengapa UU Cipta Kerja tidak Menciptakan Lapangan Kerja tapi Memperkuat Oligarki. *The Conversation*.
<https://theconversation.com/mengapa-uu-cipta-kerja-tidak-menciptakan-lapangan-kerja-tapi-memperkuat-oligarki-147448>
- Ladner, S. (2008). Laptops in the Living Room: Mobile Technologies and the Divide between Work and Private Time among Interactive Agency Workers. *Canadian Journal of Communication*, 33(3),465-489.
- Ladner, S. (2009). 'Agency Time' A Case Study of the Postindustrial Timescape and Its Impact on the Domestic Sphere. *Time & Society*, 18(2-3), 284-305.
- Lee, D. (2013). Creative Labour in the Cultural Industries. *sociopedia.isa*, 1-13.

- Polimpung, Hizkia Yosias. (2018). Ngomong-ngomong, Apa itu Pekerja 'Prekariat'? *The Conversation*. <https://theconversation.com/ngomong-ngomong-apa-itu-pekerja-prekariat-83048>
- Rosser, Andrew. (2015). Neo-liberalism and the Politics of Higher Education Policy in Indonesia. *Comparative Education*, 52(2), 109-135.
- Shade, L. R., & Jacobson, J. (2015). Hungry for the job: gender, unpaid internships, and the creative industries. *The Sociological Review*, 63(S1), 188-205.
- Siebert, S., & Wilson, F. (2013). All work and no pay: consequences of unpaid work in the creative industries. *Work, Employment, and Society*, 27(4), 711-721.
- Silalahi, R.M.P., Yuwono, U., and Aminda, Y.J. (2018). Values of Neoliberalism in Education: A Comparative Study Of Indonesian Presidential Speeches in the New Order and Reform Era. Dlm. M. Budianta, M. Budiman, A. Kusno & M. Moriyama (Peny.), *Cultural Dynamics in a Globalized World* (hal. 899-906). Routledge.
- Spake, D. F., D'Souza, G., Crutchfield, T. N., & Morgan, R. M. (1999). Advertising Agency Compensation: An Agency Theory Explanation. *Journal of Advertising*, 28(3) 53-72.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.
- Swadesi, A. N., & Purwanto, S. A. (2017). Para Pekerja Prekariat: Studi Kasus Para Pekerja Sepatu di D'arcadia Treasure, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. *Sosio Informa*, 3(3), 247-256.
- Thorsen, D. E., & Lie, A. (2006). *What is Neoliberalism?* Oslo: University of Oslo, Department of Political Science, Manuscript.
- Tjandraningsih, I. (2012). State Sponsored Precarious Work in Indonesia. *American Behavioral Scientist*, 57(4), 403-419.
- Türkena, S., Nafstada, H. E., Blakara, R. M., & Roena, K. (2016). Making Sense of Neoliberal Subjectivity: A Discourse Analysis of Media Language on Self-development. *Globalizations*, 13(1), 37-41.

Yasih, D. W. P. (2016). Jakarta's Precarious Workers: Are They a "New Dangerous Class"? *Journal of Contemporary Asia*, 47(1), 1-18.

TRANSFORMASI KAPITALISME DI INDONESIA: KONVERGENSI KEPENTINGAN NEOLIBERAL DAN OLIGARKI SEMASA PANDEMI

Deda R. Rainditya¹

ABSTRAK

Sepanjang berbagai krisis di abad ke-21, kapitalisme telah berhasil untuk mempertahankan diri dengan menciptakan cara-cara baru untuk mengakumulasi kekayaan. Tidak ada krisis dalam sejarah modern yang mengancam keberlangsungan kapitalisme seperti halnya COVID-19. Krisis ini telah memicu transformasi pakem bekerja neoliberalisme di berbagai bagian dunia. Mengambil kasus Indonesia untuk membicarakan kemungkinan ragam transformasi kapitalisme, penulis memfokuskan bahasan ini pada tesis oligarki, yakni sistem kekuasaan yang memfasilitasi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, serta cara kelompok tersebut mempertahankan berbagai relasi yang memungkinkan proses ini. Penulis mengkaji dan mempertanyakan sejumlah pandangan pesimistik mengenai pengaturan negara neoliberal. Tesis oligarki menyatakan bahwa kepentingan kapitalis domestik telah meminggirkan agenda kapitalisme neoliberal. Meski demikian, respons negara terhadap krisis global yang disebabkan COVID-19 justru menunjukkan bahwa kepentingan kedua kekuatan ini berkelindan satu sama lain, hanya saja dalam bentuknya yang kontradiktif. Penulis menunjukkan ini lewat berbagai keputusan politik kontradiktif yang diambil pemerintah pusat maupun daerah dalam merespon pandemi. Secara signifikan, dengan memanfaatkan perangkat neoliberal dari kapitalisme global, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan finansial untuk memulihkan krisis ekonomi yang dipicu pandemi melalui berbagai skema pinjaman dari bank multinasional. Di saat yang sama, kebijakan pemerintah juga telah memfasilitasi kepentingan kelompok oligarki untuk mempertahankan kontrol mereka atas sumber daya negara. Sejumlah fenomena ini menunjukkan bahwa kepentingan neoliberal dan oligarki telah berkonvergensi di bawah tekanan dahsyat pandemi.

¹ Penulis adalah asisten peneliti di Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga. Ia dapat dihubungi melalui surel deda.rainditya@gmail.com

Kata-kata Kunci: *Indonesia, Kapitalisme, Tesis Oligarki, Neoliberalisme, Pandemi*

PENGANTAR

Sejak kasus kematian pasien COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Cina pada 11 Januari 2020, disusul dengan penetapan status pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 12 Maret 2020 (WHO, 2020), pemerintah nasional di seluruh dunia mengambil langkah strategis untuk menghalau penyebaran COVID-19. Berbagai negara memberlakukan larangan guna membatasi aktivitas publik maupun temu-langsung dengan tingkat keberhasilan beragam, namun semua langkah ini berujung pada kondisi kontraksi ekonomi yang sama. Pada April 2020, ekonomi global mengalami kontraksi ekonomi sejauh -4,9 persen. Di kalangan negara yang tergolong memiliki ekonomi maju (Amerika Serikat, Kawasan Eropa, Jepang, Britania Raya dan Kanada), pertumbuhan ekonomi menurun hingga -3,5 persen, dengan Jepang mengalami penurunan terburuk sejauh -11,4 persen pada kuartal kedua 2020 (IMF, 2020). Sementara itu, negara-negara dalam kelompok *Emerging and Developing Asia*, yakni Cina, India, serta lima negara ASEAN-5² mengalami rata-rata pertumbuhan ekonomi sebanyak 2,4 persen; hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi Cina yang mencapai 2,4 persen³, India 4,4 persen, sedangkan ASEAN-5 sejauh 0,2 persen (World Bank 2020, hal: 7).

Pandemi juga turut membawa dampak terhadap kondisi ekonomi-politik Indonesia, yang juga merupakan negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 mengalami kontraksi sejauh 3,49 persen—sebuah penurunan signifikan dari kuartal III tahun 2019 yang tumbuh hingga 5,01 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III/2020 pun berkontraksi sebesar 4,05 persen dibandingkan pertumbuhan sebanyak 5,01 persen pada kuartal III/2019 (BPS,

² Berdasarkan Dana Moneter Internasional (IMF), Asosiasi Negara Asia Tenggara-5 (ASEAN-5) terdiri dari lima negara ASEAN dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, yakni Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

³ Melalui sejumlah bank konstruksi yang mereka miliki, Cina telah mendanai negara-negara ASEAN sejak 2018 dalam rangka program infrastruktur global seperti *Belt and Road Initiative* (BRI). Indonesia merupakan penerima investasi terbesar di antara negara Asia Tenggara dengan US\$ 171,11 juta, disusul Vietnam dengan US\$ 151,68 Juta, dan Kamboja sebesar US\$ 103,93 juta (ICBC, 2018).

2021). Penyusutan ini, tak terelakkan, berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan. Pada September 2020, jumlah warga miskin Indonesia berkisar di 27,55 juta orang, dengan pertambahan 1,13 juta orang dari Maret 2020, serta 2,76 juta orang dari September 2019 (BPS 2021).

Di saat yang sama, kondisi pandemi turut mengungkap sejumlah konfigurasi baru terhadap sistem kapitalisme yang selama ini menopang oligarki politik dan kepentingan ekonomi. Penulis akan menjabarkan lebih lanjut melalui dua kasus. Pertama, penulis berpendapat bahwa kepentingan kelompok kapitalis domestik dapat dijelaskan melalui keputusan yang diambil elite politik dalam menangani pandemi. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia begitu lambat dalam merespons laju penyebaran virus, menghasilkan kebijakan yang tidak koheren, bahkan kontradiktif. Pada Februari 2020, ketika negara tetangga lainnya mulai mencatat lonjakan kasus, pemerintah justru bersikeras bahwa Indonesia masih terbebas dari COVID-19, bahkan menawarkan diskon untuk sejumlah destinasi wisata domestik. Pada Maret 2020, ahli kesehatan masyarakat dan epidemiolog mulai menyerukan karantina wilayah berdasarkan ketentuan Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan bantuan sosial bagi kelompok yang paling terdampak. Sebaliknya, pemerintah justru menetapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih longgar, sehingga gagal untuk menahan laju penyebaran virus dengan efektif. Berbagai respons yang terfragmentasi ini juga menyingkap tegangan antar-elite politik di berbagai tingkatan pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, serta nihilnya kapasitas negara untuk menyasiasi krisis dalam skala sebesar ini.

Kedua, artikel ini membahas Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada masa pandemi secara tergesa-gesa melalui proses legislasi yang penuh sengkabut dengan dalih untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kebijakan ini berupaya mewujudkan sejumlah prakondisi untuk menggerakkan arus modal dan memperluas pasar, antara lain dengan meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Bank Dunia (*World Bank*), yang pada mulanya mengemukakan kekhawatiran mereka atas nihilnya mekanisme pengamanan sosial dan lingkungan hidup pada UU Cipta Kerja, akhirnya mengakui bahwa UU Cipta Kerja merupakan

produk kebijakan yang reformatif dan krusial untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif serta mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang (World Bank, 2020).

Dengan demikian, tulisan ini berupaya menjelaskan bagaimana kapitalisme neoliberal menyesuaikan diri terhadap guncangan sosial yang disebabkan oleh pandemi di Indonesia. Penulis menunjukkan perubahan ini dengan menunjukkan keterkaitan antara respon elite politik di level nasional maupun lokal terhadap COVID-19 menggunakan tesis oligarki, kemudian menghubungkannya dengan instrumen neoliberal yang digunakan elite untuk mengamankan posisi mereka di tengah perebutan kekuasaan.⁴ Tulisan ini diakhiri dengan menawarkan pandangan alternatif yang dapat membuka khazanah baru mengenai proses-proses demokratisasi dan desentralisasi di masa ketika kepentingan oligarki telah berkelindan dengan pengaturan-ulang struktur sosial ekonomi Indonesia di bawah pengaruh neoliberalisme.

RELASI OLIGARKI SEBAGAI ANALISIS SOSIAL

Tesis oligarki membicarakan tentang kelas minoritas elite dengan akses atas alat produksi yang mendominasi struktur kehidupan politik (Robison dan Hadiz, 2004), dan kemudian membentuk relasi-relasi dalam proses akumulasi kekayaan mereka guna mempertahankan dominasi politik—disebut sebagai relasi oligarki. Tesis ini merupakan perangkat ampuh untuk menganalisis posisi mereka dalam konfigurasi relasi sosial Indonesia yang terus berkembang, terutama peran sentral mereka dalam transformasi kapitalisme Indonesia.

Sejumlah premis kunci dari tesis oligarki menjadi landasan artikel ini. Pertama, Robison dan Hadiz berpendapat bahwa institusi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, serta penyokong agenda pembangunan (*development*) lainnya memberi penga-

⁴ Artikel ini berlandaskan studi literatur dengan fokus pada pemeriksaan dokumen, catatan statistik, serta data ekonomi yang dirilis oleh institusi-institusi resmi menggunakan pendekatan “penyelidikan kritis”. Penyelidikan kritis merupakan sebuah investigasi meta-proses (*meta-process of investigation*), atau “proses atas proses”, yang mempertanyakan nilai-nilai dalam asumsi arus utama serta menantang pemahaman konvensional atas struktur sosial. Menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesadaran palsu (*false consciousness*) yang hadir dan bekerja di balik fenomena sosial. Secara mendalam, tulisan ini memproblematisir agenda pasar neoliberal dalam berbagai wacana arus utama yang menentukan kebijakan negara dan relasi sosial. Tulisan ini menerapkan tiga premis

ruh besar atas proses transformasi neoliberal pemerintahan Indonesia. Era Neoliberalisme ini ditandai dengan mewujudnya karakteristik pasar pada struktur demokratik negara, dimana kehidupan ekonomi-politik dan institusi negara terintegrasi dengan dinamika serta kebutuhan pasar global. Secara khusus, tesis oligarki Robison dan Hadiz menekankan bahwa neoliberalisme telah “dibajak” oleh berbagai relasi oligarki yang berkembang di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mendayagunakan berbagai institusi demokrasi pasca-otoritarianisme sebagai modus akumulasi kapital baru, seperti melalui proses pemilihan umum. Kedua, Robison dan Hadiz (2004; 2013) mendefinisikan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan sebagai mekanisme pertahanan kolektif bagi kalangan oligarki. Relasi oligarki merupakan hasil akumulasi kekayaan yang mampu memengaruhi—dan bahkan mengontrol—institusi publik dan otoritas negara (Robison & Hadiz 2013, hal. 37-38).

Sejak pertengahan dekade 1960, Presiden Soeharto dan rezim otoriterinya (1966-1998) berhasil menempatkan negara sebagai aktor utama kehidupan sosial melalui sejumlah format ekonomi-politik baru yang berorientasi pada kepentingan bisnis. Hal ini dicapai dengan membangun relasi internal-institusi negara—dan membentuk ke luar relasi politik-bisnis dengan kekuatan ekonomi swasta hingga koalisi konglomerat. Baik Soeharto maupun pendukungnya sepakat bahwa pihak manapun yang menentang relasi-relasi tersebut layak didapuk sebagai “musuh pembangunan”. Ekspansi kekuasaan Soeharto ini tidak lepas dari prinsip “otoritas organik-bertemu-perusahaan negara” yang didirikan atau dinasionalisasikan pada masa pemerintahan Soekarno (1945-1965) dan kemudian menjadi corak utama rezim otoriter Orde baru (Hadiz, 2005, hal. 121). Para pejabat negara tidak hanya memaksakan otoritas mereka secara koersif—selain menggunakan sejumlah aparatus birokrasi negara—namun juga melalui organisasi massa utama dan partai besutan pemerintah, Golongan Karya (GolKar), serta berbagai organisasi sayapnya (Robison, 2009).

Menanggapi tesis oligarki Robison dan Hadiz, Suwandi mengajukan penjelasan alternatif mengenai monopoli skala-global dalam sejarah kontemporer (Suwandi, 2020). Metode ini berubah menjadi monopoli

yang mana kekuatan ekonomi terkonsentrasi di tangan perusahaan-perusahaan multinasional (Suwandi, 2020, hal. 141-142), mempertanyakan posisi oligarki domestik dalam hubungan antara kapital global serta lokal. Tanggapan lainnya berkaitan dengan kemampuan konglomerat untuk mengatur-ulang kekuasaan melalui instrumen politik (Widoyoko, 2020). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat lagi berfungsi sebagai instrumen bagi oligarki dan/atau konglomerat, seiring kepentingan dalam BUMN secara intensif telah terfragmentasi setelah desentralisasi.⁵ Argumen Widoyoko menekankan bahwa negara melalui BUMN menjadi ruang pertautan kapital antara kapitalisme negara, agenda pasar melalui arus modal yang masuk serta relasi-relasi oligarki yang masih terjaga.

Namun, sejak akhir dekade 1970, model ekonomi rezim otoriter Orde Baru mulai mengalami rekonstruksi melalui sejumlah arus investasi dan pinjaman luar negeri. Pada akhirnya menjadi corak utama dalam konsolidasi pemerintahan Soeharto serta kapitalisme negara pada periode tersebut. Terlebih, klaim negara atas “pembangunan ekonomi” oleh koalisi teknokrat dan ahli semakin melegitimasi agenda kapitalisme negara. Sementara perkembangan konglomerasi di kalangan pengusaha Cina-Indonesia juga kian mengokohkan koalisi politik-bisnis tersebut, setidaknya pada masa awal kepemimpinan Presiden Soeharto di akhir 1970-an.

Restrukturisasi neoliberal besar-besaran kemudian terjadi sepanjang dekade 1980, dan semakin terintegrasinya sistem kapitalisme Indonesia dalam pasar global berimbas langsung pada naiknya kerentanan sistem tersebut terhadap guncangan ekonomi eksternal. Pada 1977, krisis moneter Asia turut berkontribusi terhadap tumbangnya rezim Soeharto, yang disusul dengan rangkaian aksi protes massal. Robison

⁵ Penerimaan kelompok oligarki terhadap agenda pasar neoliberal dapat ditelusuri secara historis dalam evolusi kapitalisme Indonesia, terutama setelah peran negara menjadi sentral pada dekade 1960. Meningkatnya kontrol negara dalam kehidupan ekonomi dimulai dengan Deklarasi Ekonomi (DEKON) 1962 yang menekankan koordinasi negara dalam pembangunan ekonomi dengan menguasai moda produksi massal (Aidit, 1963) atas nama kepentingan rakyat. Hal ini membuka jalan bagi negara untuk memegang kendali atas kehidupan ekonomi, dan negara dianggap memiliki peran ekonomi yang sah dalam menjamin kepentingan nasional serta mencapai tujuan sosial lainnya yang lebih besar (Hadiz, 2005, hal. 116). Koalisi pragmatis Presiden Soekarno saat itu terdiri dari kalangan militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta lingkaran borjuasi Islam kecil. Aliansi ini sebenarnya tidak menguntungkan bagi agenda

dan Hadiz mengembangkan tesis oligarki mereka dengan menjabarkan cara kelompok ini kembali mengorganisir diri setelah negara tidak lagi mengemban peran sentral atas ekonomi di era pasar bebas (2004). Mereka menyatakan bahwa koalisi oligarki dan elite politik harus mengkonsolidasikan diri kembali dan beradaptasi dengan sejumlah proses demokratisasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk menyiasati distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke elite lokal yang terwujud melalui agenda desentralisasi. Praktis, kekuasaan di level lokal, termasuk dalam perusahaan negara seperti BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pun terkonsolidasi melalui akumulasi kapital di tingkat lokal (Robison & Hadiz, 2004).⁶

Faris Al-Fadhat (2020) menegaskan bahwa transformasi kelas kapitalis baru di Indonesia dan Asia Tenggara telah mengalami pergeseran substansial dari konsolidasi borjuasi yang berorientasi nasional (seperti halnya yang terjadi pada dekade 1970 dan 1980) menjadi faksi borjuasi yang berorientasi internasional. Hal ini tampak dari perkembangan perusahaan multinasional yang terjadi di era neoliberal Indonesia (Al-Fadhat 2020, hal. 192). Al-Fadhat juga menekankan krisis moneter Asia telah memungkinkan negara untuk melakukan ekspansi transnasional. Sejumlah fenomena ini menunjukkan kapasitas dan kelenturan tatanan neoliberal untuk menyesuaikan diri dengan kondisi struktural ekonomi-politik dimana kapitalisme bekerja (Springer 2017, hal. 29-30).

KAPITALISME DAN KONSUMSI

Ekspansi kapital, melalui organisasi moneter internasional maupun bank pembangunan, merupakan salah satu karakteristik utama dari operasi neoliberal. Penulis merujuk kepada gagasan ahli geografi neo-Marxis David Harvey (2005) untuk menjelaskan ragam ekspansi tersebut melalui mekanisme penetrasi kapital. Harvey memandang proses “akumulasi-melalui-perampasan” (*accumulation by dispossession*) sebagai

6 Argumen populer mengenai pertumbuhan ekonomi-politik Indonesia di tahun 1980-an dikemukakan oleh Kunio Yoshihara (1988), yang juga memberi penjelasan mengenai perkembangan kapitalisme di negara Asia Tenggara lainnya. Yoshihara menyatakan bahwa sistem kapitalisme yang digerakkan oleh minyak bumi merupakan perpaduan antara modal oligarki lokal (yang memiliki hubungan erat dengan rezim) serta modal asing. Terlebih, Yoshihara juga menjelaskan bahwa modal Jepang melalui industri manufaktur—yang merupakan sektor andalan Indonesia pada tahun 1980-an—hanya berfungsi sebagai distributor dan tidak dilengkapi dengan pemajuan kapitalisme yang berbasis teknologi.

prinsip kapitalisme kontemporer. Menurut Harvey, terdapat dua model yang berkaitan dengan bagaimana kapitalisme bekerja (Harvey 2003; 2020).

Pertama, sirkulasi dan akumulasi kapital menunjukkan kontradiksi internal pada tiap “momen berbeda” dalam rantai nilai ekonomi dari produksi, realisasi (konsumsi), distribusi hingga reinvestasi. Harvey memandang kontradiksi ini sebagai pusaran ekspansi dan pertumbuhan tanpa akhir (*capitalist economy as a spiral of endless expansion and growth*). Harvey membuka ruang diskusi dalam kajiannya akan apa yang ia sebut sebagai *Spatial Temporary Fix*—atau momen awal dari akumulasi-melalui-perampasan, yakni negara dan antisipasi kapitalistik dalam menciptakan monopoli—yang memanfaatkan ruang sebagai jalan keluar untuk menyiasati krisis kejatuhan nilai konsumsi, terlebih dalam masa pandemi. Harvey menekankan pula bahwa ideologi pasar, yang mewujud dalam konsumerisme, berada dalam titik terendahnya pada krisis COVID-19 (Harvey 2020, hal. 54).

Model kapitalis yang kedua bekerja dengan menggabungkan sejumlah kebutuhan manusia yang berbeda, kemudian mewujudkannya dengan melebur institusi, lembaga, maupun ideologi ke dalam satu sistem yang harus diterima secara utuh untuk mengakomodasi semua kebutuhan tersebut (Harvey 2020: 74-75). Menurut Harvey, pandemi mengacaukan arus modal yang berujung pada devaluasi dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi terjadi apabila tidak ada permintaan yang cukup untuk merealisasikan nilai. Meski demikian, kondisi devaluasi tersebut tidak terjadi di Indonesia, mengingat negara mengemban peran sentral dalam penanganan krisis seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru, Indonesia juga tercatat telah beberapa kali menggalakkan agenda penyelamatan ekonomi semasa krisis melalui rangsangan konsumsi.

Pemerintah Indonesia telah menerima bantuan modal sejak periode ledakan harga minyak (*oil boom*) pada dekade 1970, seiring dengan pinjaman dari konsorsium multinasional bernama *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI).⁷ Relasi pemerintah Indonesia dengan IGGI

⁷ IGGI merupakan lembaga konsorsium lembaga-lembaga bantuan internasional (World Bank dan ADB) serta negara-negara donor seperti Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan yang terkoordinasi yang memadai bagi Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi di periode pasca

bermula sejak mereka memperoleh dana talangan untuk krisis internal yang menimpa Pertamina pada 1976, ketika perusahaan minyak dan gas negara tersebut gagal membayar kredit pinjaman jangka pendek sebesar US\$ 40 juta kepada *The Republic National Bank of Dallas*, yang diperkirakan membengkak hingga US\$ 3,1 miliar pada 1985. Pemerintah kemudian mengambil alih kegagalan pembayaran tersebut guna menyelamatkan Pertamina dengan mengajukan pinjaman bersyarat lunak sebesar US\$ 1,4 miliar (Wie, Thee Kian 2004, hal. 62). Pasca *oil boom*, pemerintah Indonesia akhirnya mengembangkan sektor manufaktur non migas dan menderegulasi kebijakan ekonomi mereka setelah memperoleh rekomendasi dari Bank Dunia, yang mendapuk proses industrialisasi domestik Indonesia sebagai “sistem proteksionis dengan bias anti-eksport yang tinggi”, sehingga berkonsekuensi pada pembangunan industri yang nir-efisien dengan daya saing rendah.

Selama pandemi, dinamika yang sama terulang melalui injeksi modal sebanyak US\$ 1 miliar dari *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) untuk merangsang konsumsi sebagai upaya penyelamatan ekonomi. Kerjasama dengan organisasi internasional ini bertujuan untuk menyokong agenda pasar neoliberal dengan mendorong orang untuk meningkatkan konsumsi pada masa krisis. Hal ini dapat disimak pula dari kebijakan negara yang berfokus untuk memulihkan ekonomi. Kementerian Keuangan Indonesia tercatat telah memperoleh fasilitas pinjaman antara lain dari Bank Dunia, *Asia Development Bank* (ADB), *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW), *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF), selain AIIB (Kemkeu, 2020).

Berbagai pinjaman ini ditujukan untuk memitigasi dampak dari pembatasan sosial dan aturan kesehatan publik lainnya semasa pandemi, yang secara signifikan berimbas pada lesunya aktivitas ekonomi. Presiden Joko “Jokowi” Widodo, melalui aturan bertajuk panjang “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekono-

1965-1970.

mian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”, Presiden Joko Widodo memungkinkannya pemerintah untuk mengambil tindakan luar biasa untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi. Termasuk dengan melonggarkan aturan defisit fiskal untuk melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto hingga 2022.

Begitu juga dengan AIIB yang menyetujui meminjamkan dana talangan ke pemerintah Indonesia pada Mei dan Juni 2020 sebesar US\$ 1 miliar, yang mana terdiri dari dua skema. Pada skema pertama, US\$ 750 juta yang dicairkan bersama ADB diperuntukkan sebagai stimulus untuk ekonomi nasional. Skema kedua, yang juga turut didanai oleh Bank Dunia, berkisar US\$ 250 juta dan ditujukan untuk program-program pencegahan, penanganan COVID-19, serta fasilitas kesehatan (AIIB, 2020; World Bank, 2020). Pemerintah Indonesia juga mengajukan sokongan finansial tambahan di atas bantuan dana yang diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sosial lainnya (World Bank, 2020). Program senilai US\$ 400 juta ini diterima melalui skema hutang, dan akan memperluas jumlah penerima bantuan dari 6 menjadi 10 juta keluarga. Langkah ini menyimpan kontradiksinya sendiri, bahwa dalam upayanya memperluas akses terhadap bantuan sosial dan kebutuhan dasar bagi orang-orang yang terjerat pandemi, kebijakan moneter yang mereka terapkan justru memfasilitasi perluasan agenda pasar neoliberal.

Dalam taraf global, sebanyak 70-80 persen ekonomi pasar saat ini didorong oleh konsumerisme (Harvey, 2020). Semasa pandemi, kebijakan fiskal pemerintah untuk mempertahankan tingkat konsumsi pun memiliki dampak terhadap taraf pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir tahun 2020. Rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa PDB Indonesia, yang sebelumnya mengalami penyusutan dari -5,32 persen ke angka -3,49 persen pada akhir 2020. Demikian pula pemerintah mampu mendorong pertumbuhan positif karena bantuan sosial. Di antara kelas menengah, terdapat peningkatan dalam pembelian ketika kelas menengah dapat menabung lebih. Mengingat banyak dari kelas menengah yang bekerja dari rumah (LPS, 2020), perlu disimak bahwa konsumsi kelompok ini pada kuartal yang sama didominasi oleh barang-barang tersier maupun rekreasional yang menjadi popu-

ler di kalangan kelas-menengah kota semasa pandemi, seperti tanaman hias hingga perlengkapan hobi bersepeda (Basri, 2020). Sementara itu di antara kelas bawah, Program Keluarga Harapan yang menghibahkan bantuan finansial terhadap 15,2 juta rumah tangga (Kemenkeu, 2020) belakangan juga mencakup uang tambahan untuk belanja rumah tangga serta subsidi tagihan listrik. Penulis melihat bantuan ini sebagai bagian dan paket dari agenda pasar neoliberal, karena kelas bawah didukung untuk terus melakukan konsumsi selama pandemi.

Tinjauan kritis terhadap perilaku konsumsi perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil negara dalam memberi stimulus bagi kelas bawah. Brown (2015), mengajukan proposisi bahwa warga negara, yang ia sebut sebagai *Human Capital*, memiliki fungsi untuk mendatangkan dan menarik investor dengan menciptakan nilai lebih (*additional value*) bagi neoliberalisme dan negara (Brown 2015, hal. 24). Penulis memandang bahwa konsumsi kelas menengah merupakan bagian dari upaya pemulihan krisis negara. Rangsangan ekonomi yang diupayakan pemerintah sejak Maret 2020 menunjukkan bagaimana warga negara merupakan perangkat yang ditempatkan untuk mendorong konsumsi—dan melalui berbagai program bantuan sosial, menjadi kelompok ekonomi independen yang menopang kapitalisme pasar. Mudhoffir & Hadiz (2021) melihat pandemi telah menunjukkan ketimpangan kelas yang dapat dilihat dari keamanan sosial masyarakat kelas bawah. Selain bantuan sosial jangka pendek berbasis konsumsi, narasi “gotong royong” mendominasi mekanisme kelangsungan masyarakat kelas menengah bawah dengan mengandalkan komunitas-komunitas sosial yang terbentuk secara spontan seperti #wargabantuwarga. Mekanisme tersebut telah mendepolitisasi peran pemerintah dalam penanganan krisis pandemi, sehingga normalisasi baru terbentuk atas ketidakmampuan pemerintah dengan mengandalkan mekanisme bantuan komunitas (Mudhoffir & Hadiz 2021, hal. 46).

Mendorong konsumsi kelas menengah dan memberi talangan finansial bagi kelas bawah untuk mengatasi krisis ekonomi yang dihasilkan COVID-19 tidak lepas dari kontradiksi internal yang mengemuka. Bangkitnya kesenjangan sosial dan antagonisme kelas. Indeks Kedalam-

an Kemiskinan⁸ dari BPS menunjukkan kenaikan dari 0,38 ke 0,47 antara Maret hingga September 2020. Kondisi ini semakin diperburuk dengan permasalahan distribusi bantuan sosial, dimana pemantauan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa problem pemotongan ilegal atau pungutan liar (19,25 persen), kekeliruan terkait keikutsertaan dalam program (*inclusion error*; 17,99 persen) hingga bantuan yang tidak diterima warga (9,62 persen) menunjukkan berbagai celah yang dieksploitasi oligarki untuk semakin mengkonsolidasikan kekuasaan (ICW 2020).

RESPONS NEGARA TERHADAP COVID-19

Kendati Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pemerintah nasional menerapkan model yang sentralistik untuk menangani COVID-19, seringkali melakukan intervensi terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah lokal. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan secara bertahap dan dimulai di DKI Jakarta, disusul dengan kawasan lainnya di sekitar Jakarta Raya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) serta Provinsi Jawa Barat, kemudian empat provinsi dan 27 kabupaten/kota lainnya se-Indonesia. Pada 1 Juni 2020, larangan kegiatan publik mulai dilonggarkan seiring dengan penyesuaian protokol kesehatan berdasarkan instruksi pemerintah pusat. Hal ini dilaksanakan meskipun tingkat infeksi yang terus naik hingga akhir tahun 2020.

Pada periode yang sama, Undang-undang Cipta Kerja, yang dikenal pula sebagai *Omnibus Law* pun diratifikasi. Sejumlah ahli berpendapat bahwa pengesahan kebijakan ini di masa pandemi menunjukkan prioritas negara dalam mengelola sumber daya di sektor ekstraktif ketimbang kesehatan publik di masa pandemi (Kontan, 2020). Sebagai contoh, UU Cipta Kerja memungkinkan investor untuk memberikan nol persen dari royalti mereka ke negara apabila mereka dapat meningkatkan nilai tambah batubara di bagian hilir serta membawa dampak positif bagi produsen batubara, sebuah langkah yang mengakomodasi kepentingan BUMN Perusahaan Listrik Negara (PLN). *Omnibus Law*

⁸ Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS 2021)

melanggengkan pola oligarki untuk mengakumulasi kapital melalui industri ekstraktif. Sebanyak 262 atau 45.5 persen dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki afiliasi dengan setidaknya satu perusahaan maupun berlatar belakang pengusaha (Koran Tempo, 2019).

Omnibus Law juga mendorong legalisasi kasualisasi tenaga kerja, yang sebagian besar menguntungkan perusahaan. Sejak Agustus 2020, setidaknya 29,12 juta orang di usia produktif telah dipengaruhi oleh pandemi; 2,56 juta menjadi pengangguran, 0,76 juta di luar rentang usia produktif, 1,77 juta tidak bekerja untuk sementara waktu, sedangkan 24,03 juta lainnya bekerja dengan waktu yang lebih singkat. UU Cipta Kerja memiliki konsekuensi yang sama dengan UU No. 13 tahun 2003 terkait ketenagakerjaan, yang mana merongrong hak-hak pekerja. Hal ini termasuk penghapusan ketentuan upah minimum, lalu menggantikannya dengan sistem upahan per jam, serta memotong uang pesangon dari sembilan menjadi enam bulan.

Kuota untuk tenaga kerja asing tak berketerampilan ditingkatkan dengan masa kerja maksimal lima tahun dengan dalih *transfer* pengetahuan. Sebaliknya, UU Ketenagakerjaan sebelumnya mengatur bahwa tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan untuk mengisi posisi yang tidak dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. UU Cipta Kerja juga mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja melalui *outsourcing*. Sanksi bagi majikan yang gagal membayar upah karyawannya dihapus. Upah didasarkan pada kesepakatan antara majikan dan karyawan.

Meski Presiden Joko Widodo bersikukuh bahwa UU Cipta Kerja mampu meningkatkan jumlah lapangan kerja, terutama bagi mereka yang terkena imbas dari pandemi, hukum ini dengan jelas ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha dalam mengakumulasi keuntungan. UU Cipta Kerja juga diklaim oleh pendukungnya akan memangkas hambatan birokrasi dalam proses memperoleh izin usaha, sehingga meningkatkan efisiensi dan mempermudah investasi (Jakarta Post, 2020).

Sejak awal 2020, mahasiswa dan sejumlah fraksi kelas pekerja mulai berkampanye menggelar aksi protes untuk menentang UU Cipta

Kerja. Pada 4 April 2020, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Telegram No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang menginstruksikan aparat kepolisian untuk memantau jagad daring serta mengambil tindakan untuk “melawan berita bohong” dan terhadap mereka yang dianggap menghina Presiden maupun pejabat publik lainnya (Amnesty International, 2021, hal. 22). Laporan lain menunjukkan bahwa tindak kekerasan serta pembatasan atas hak kebebasan berekspresi sepanjang pandemi (dari Desember 2019 hingga November 2020) didominasi oleh isu *Omnibus Law*, dimana 232 orang terluka dalam aksi protes (KontraS, 2021). 455 orang juga ditangkap dalam 87 kasus berbeda yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, sementara 938 orang lainnya ditangkap karena melakukan pelanggaran terhadap / mengkritik Pembatasan Sosial Berskala Besar, maupun terhadap isu penanganan pandemi pada umumnya (KontraS, 2021). Pengekangan terhadap hak politik warga negara, dalam hal ini hak atas kebebasan berekspresi, menunjukkan bagaimana sebuah negara yang menganut asas demokrasi mengubah haluan mereka dengan menegakkan tatanan sosial untuk melayani kebutuhan ekonomi pasar.

Di tingkat daerah, restrukturisasi neoliberal, berkelindan dengan berbagai elemen lokal, juga cenderung membawa keuntungan bagi pasar ketimbang rakyat. Robison (2009) membahas perkembangan kapitalisme di Indonesia menyinggung bagaimana proses pembentukan kelas kapitalis kecil berjalan beriringan dengan pertumbuhan kekuatan modal yang mengiringi perkembangan ekonomi-politik Indonesia secara luas (Robison, 2009, hal. vii). Analisis Hadiz (2010) pun serupa, memaparkan hubungan antara kekuasaan negara dengan konstelasi kekuatan sosial lokal yang lebih luas. Ia juga menjelaskan bagaimana kekuasaan negara dapat dikontrol secara struktural dan instrumental melalui kekuatan sosial yang dominan di level daerah (Hadiz, 2005, hal. 172-173).

Dua kasus di Surabaya dan Bali, yang dipilih oleh penulis, merupakan ilustrasi dari dinamika politik lokal pada masa pandemi. Di Surabaya, Jawa Timur pengusaha lokal mendesak untuk melonggarkan PSBB untuk mengurangi dampak ekonomi kepada bisnis mereka. Walikota Surabaya pertama-tama, mencabut pembatasan sosial per tanggal 8 Juni 2020 meskipun angka kasus positif masih tergolong tinggi

(Jakarta Post, 2020). Selanjutnya, Walikota Surabaya mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2020 tentang tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kota Surabaya, yang menggandeng Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur dan Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) Jawa Timur untuk membentuk *mall*, restoran dan kafe “tangguh” guna menopang perputaran ekonomi dan menyelamatkan pelaku usaha kota (Pemerintah Kota Surabaya, 2020). Aliansi antara pemerintah daerah dan pengusaha lokal ini bukanlah hal baru, begitu pula hubungan baik pengusaha dengan partai politik. Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah diberitakan menggelar pertemuan dengan Eri Cahyadi, calon Walikota yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta pebisnis Surabaya lainnya untuk mengkonsolidasikan kepentingan mereka pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 (Tempo, 2020).

Di Bali, elite lokal berkonsolidasi dengan kekuatan milisi dan menjustifikasi pengaruh mereka melalui narasi untuk “melindungi Bali” dari “pengaruh eksternal yang destruktif”. Selain membangun relasi dengan kedua kelompok tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster juga memanfaatkan tradisi lokal seperti Desa Adat dan kaum aristokrat (Saraswati, 2019) untuk memenangkan Pemilihan Gubernur 2019 dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Konsolidasi ini tampak ketika Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali mengeluarkan Surat No. R/846/IV/2017/Bidkum untuk membubarkan sejumlah organisasi masyarakat seperti Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu atas sejumlah perbuatan pidana dan tuduhan mengusik ketertiban umum sepanjang 2015-2017 (Balipost, 2019). Seusai terpilih, Koster kemudian mengintervensi keputusan ini dengan hanya mengirimkan surat peringatan tanpa arahan untuk membubarkan diri.

Di Bali Semasa pandemi, gubernur mempunyai otonomi tinggi untuk menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan pandemi, seperti penolakannya untuk menerapkan karantina wilayah (*lockdown*) dengan dalih untuk menyelamatkan ekonomi lokal Bali (Kompas, 2020). Koster sendiri memiliki banyak hal untuk dipertaruhkan. Memburuknya kondisi ekonomi global akibat *pandemic* menghambat masuknya wi-

satawan mancanegara. Sementara aliansi bisnis-politik lokal yang ber-konsolidasi dengan Koster menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada sektor pariwisata (seperti pengamanan lokasi hingga parkir) yang terdampak oleh pandemi di Bali.

Koster juga memberi otoritas penuh terhadap Desa Adat untuk menangani pandemi di lingkungan masing-masing. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan, Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Desa Adat dapat melakukan perubahan terhadap alokasi Dana Desa Adat yang bersumber dari APBD Provinsi. Jenis anggaran pertama mencakup pengadaan alat dan bahan untuk keperluan pencegahan pandemi seperti disinfektan, masker, sarung tangan, serta anggaran operasional petugas satuan tugas Gotong Royong yang dibentuk untuk mengurus wabah di tiap desa. Anggaran kedua berupa penyediaan sembilan bahan pokok sebagai jaring pengaman sosial untuk warga Desa Adat. Langkah ini membuat Koster sukses memenangkan dukungan kelompok aristokrat lokal yang berperan sebagai pemuka di Desa Adat mereka masing-masing, dan semakin memperkuat konsolidasi politik-bisnisnya.

Sejalan argumen Rakhmani & Permana (2020) yang memandang bahwa fenomena politik lokal pada masa krisis pandemi telah menunjukkan peluang bagi elite lokal dan nasional untuk memanfaatkan situasi mobilitas politik ke atas. Seperti dalam pemilihan lokal 2020 yang menunjukkan peningkatan tren jumlah suara calon tunggal pada tiga pemilihan lokal terakhir serta berkurangnya jumlah kandidat yang bersaing dalam pemilihan lokal (Rakhmani & Permana 2020). Elit lokal di masa pandemi telah menunjukkan bagaimana pengaruh mereka memperkuat cengkeraman kekuasaan di wilayahnya seperti yang terjadi di Kota Surabaya dan Bali.

Penulis berpendapat bahwa pandemi telah membuka sejumlah cara baru untuk mempercepat pengaturan ulang kehidupan sosial di bawah tatanan neoliberal yang menguntungkan kelas elite, namun merugikan kelompok miskin dan kelas menengah-bawah. Prioritas negara untuk menyelamatkan ekonomi juga berdampak buruk terhadap pemenuhan hak-hak politik publik. Fraksi-fraksi oligarki yang berbeda meraup keuntungan dari semakin dominannya peran negara melalui

berbagai konfigurasi relasi bisnis-politik. Despotisme baru di Indonesia ini menyingkap cara kerja rezim yang beroperasi dengan lebih efektif dan berkesinambungan melalui manipulasi konsensus sosial (Kusman dan Istiqomah, 2021). Konfigurasi ini terjadi melalui konsolidasi elite di level lokal maupun pusat pemerintahan, serta difasilitasi oleh bantuan finansial luar negeri yang sarat dengan agenda pasar neoliberal.

PENUTUP

Artikel ini menganalisis hubungan antara oligarki dan pasar neoliberal untuk menggambarkan konfigurasi kekuatan Indonesia dalam perkembangan kapitalisme. Robison dan Hadiz (2004) berpendapat bahwa kepentingan kelompok oligarki telah “membajak” agenda neoliberal, sementara proses konsolidasi mereka mampu menyesuaikan diri dengan agenda pasar. Konvergensi antara kepentingan kapitalis domestik serta agenda neoliberal ini, bisa dibilang, menjadi lebih intensif selama masa pandemi.

Harvey (2003) memandang bahwa kontradiksi internal yang hadir sejak masa awal kapitalisme justru membuka jalan keluar temporer (*temporary fix*) dalam setiap krisis. penulis menemukan bahwa, kondisi ekonomi Indonesia telah dipengaruhi secara signifikan oleh pandemi, cara logika kapital mengejawantah sebagai tanggapan terhadap krisis juga dipengaruhi karakteristik rezim yang mendominasi wacana pembangunan negara. Dalam sejarah perkembangan kapitalisme di Indonesia, negara tercatat mampu merangsang konsumsi melalui belanja negara dan pinjaman bank multinasional untuk mendukung stimulus ekonomi nasional.

Penulis menilik kembali argumen Brown (2015) bahwa warga negara sebagai *human capital* dalam sistem neoliberal telah berulang kali “berjasa” menyelamatkan kapitalisme dalam periode krisis, khususnya pada masa pandemi. Alasannya kapital manusia (*human capital*), melalui peralihan ke bekerja di rumah, bertransformasi menjadi kapital finansial digital dan karenanya mampu berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terjadi melalui perubahan pola konsumsi kelas menengah yang dan suntikan bantuan sosial kepada masyarakat kelas bawah untuk menjaga daya beli mereka. Negara secara aktif memberikan sti-

mulus ekonomi bagi kelas menengah ke bawah untuk mendorong kegiatan konsumsi dan memicu penyerapan produk nasional.

Pola serupa juga dapat ditemui pada tingkat lokal, di mana elite bisnis-politik telah menyesuaikan diri dengan kepentingan pasar dan politik predatorial dalam upaya untuk mempertahankan kontrol mereka atas kekuasaan dan modal. Transformasi kapitalisme semasa pandemi di Indonesia menempatkan negara sebagai aktor utama, sebagaimana tampak dalam pengesahan Undang-undang Cipta Kerja dan kebijakan moneter yang diambil negara untuk pemulihan ekonomi. Relasi kuasa, dari tingkat nasional sampai lokal, menunjukkan kelindan antara kepentingan oligarki dan agenda neoliberal, di mana kapital bermutasi melalui pasar hingga institusi-institusi demokratik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidit, D. N. (1963). *Dekon dalam Udjian*. Jajasan Pembaruan.
- Amnesty International. (2021). *Laporan Amnesty International 2020/21*.
- Arbi, I. A.. (2020, April 9). Jokowi Dismisses Criticism of Omnibus Jobs Law as Hoax News. *Jakarta Post*
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/09/jokowi-dismisses-criticism-of-omnibus-jobs-law-as-hoax-news.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat. (2020). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020*.
- Basri, M. C. (2020, Desember 16). 2021: Antara Pandemi dan Pemulihan Ekonomi. *Kompas*.
- Brown, W. (2015). *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. Zone Book.
- Devita, R. (15 Januari 2019). *Koster Teteskan Air Mata Saat Berikan Tiga Ormas Surat Peringatan*. Bali Post.
<https://www.balipost.com/news/2019/01/15/66133/Koster-Teteskan-Air-Mata-Saat...html> (diakses pada 19 Maret 2021)
- Dzakwan, M. H. A. (2020). *Menuju Situasi Normal Baru: Kesiapan Bali dalam Menangani Covid-19*. CSIS Indonesia.

- Ford, M., & Pepinsky, T. B. (Peny.). (2014). *Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesian Politics*. Cornell University Press.
- Gray, D. E. (2004). *Doing Research in The Real World*. Sage Publications.
- Hadiz, V. R. (2005). *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. LP3ES.
- Hadiz, V. R.. (2006). *Empire and Neoliberalism in Asia*. Routledge.
- Hadiz, V. R.. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford University Press.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University.
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.
- Harvey, D. (2020). *The Anti-Capitalist Chronicles*. Pluto Press.
- ICBC. (23 December 2018). *BRI Thought Leadership*. <https://www.icbcstandardbank.com/CorporateSite/BRIThoughtLeadership>
- International Monetary Fund (IMF). (2020). *World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (Oktober 2020). *Kemenkeu Tanggap Covid-19: Informasi Terkini*. <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Siaran Pers: Kebijakan Extraordinary APBN untuk Membantu Masyarakat serta Dunia Usaha Pulih dan Bangkit*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Ini 5 Strategi Pembiayaan APBN 2020 di Masa Pandemi COVID-19*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-5-strategi-pembiayaan-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Omnibus Law Menjadi Angin Segar Bagi Emiten Tambang Batubara (9 Oktober 2020). *Kontan*. <https://investasi.kontan.co.id/news/omnibus-law-menjadi-angin-segar-bagi-emiten-tambang-batubara>
- KontraS. (2020). *HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme*.

(3 Oktober 2019). Mayoritas Pimpinan DPR Miliki Perusahaan. *Koran Tempo*.

Kusman, A. P. (2019). *The Vortex of Power: Intellectuals and Politics in Indonesia*. Palgrave Macmillan.

Kusman, A. P., & Istiqomah, M. (2021). Indonesia's New Despotism. *Asia Melbourne Review*. <https://melbourneasiareview.edu.au/indonesias-new-despotism/>

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (2020). *Deposits Distribution of Commercial Bank: November 2020*.

Mudhoffir, A. M., & Hadiz, V. R. (2021). Social Resilience Against COVID-19 Mask Indonesian Class Divide. *Georgetown Journal of International Affairs*, 22(1), 45-52.

Greater Surabaya ends PSBB, enters two-week transition phase. (9 June 2020). *Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/09/greater-surabaya-ends-psbb-enters-two-week-transition-phase.html> (diakses pada 10 Januari 2021, pukul 15.00 WIB)

Walikota Risma Dorong Pembentukan Mal, Restoran dan Kafe Tangguh di Surabaya. (2020, June 11). *Humas Pemerintah Kota Surabaya*. <https://humas.surabaya.go.id/2020/06/11/wali-kota-risma-dorong-pembentukan-mal-restoran-dan-kafe-tangguh-di-surabaya/> (diakses pada 10 Januari 2021)

Peraturan Gubernur Bali No. 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali.

Rakhmani, I. & Permana, P. A.. (2020). The Influence of Elite Interests are Crucial to Understanding Indonesia's Response to Covid-19. *Asia Melbourne Review*. <https://melbourneasiareview.edu.au/the-influence-of-elite-interests-are-crucial-to-understanding-indonesias-response-to-covid-19/>

Robison, R. & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia*. Routledge.

Robison, R. (2009). *Indonesia: The Rise of Capital*. Equinox Publishing.

- Saraswati, S. (2019). *Lokal Gangster dalam Dinamika Politik Lokal: Kebangkitan Bangsawan Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Otoritarian*. Universitas Airlangga.
- Springer, S. (2017). Neoliberalism in Southeast Asia. Dalam A. McGregor, L. Law, & F. Miller (Peny.). *Routledge Handbook of Southeast Asian Development*. Routledge.
- Suwandi, I. (2020). Memahami Ekonomi Global yang Imperialis. Dalam A. M. Mudhoffir & C. H. Pontoh (Peny.). *Oligarki Teori dan Kritik*. Marjin Kiri.
- Wibowo, K. S. (20 Oktober 2020). Rencana Risma dan Hasto Kumpulkan Pengusaha Menjelang Pilkada Surabaya Disorot. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1400300/rencana-risma-dan-hasto-kumpulkan-pengusaha-menjelang-pilkada-surabaya-disorot/full&view=ok>
- Widoyoko, J. D. Perubahan dan Kesenambungan Kapital di Indonesia: Oligarki dan Kapital Negara. Dalam A. M. Mudhoffir, & C. H. Pontoh (Peny.). (2020). *Oligarki: Teori dan Kritik*. Marjin Kiri.
- Wie, T. K. (2004). *Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat Orde Baru*. Penerbit Kompas.
- World Bank. (June, 2020). *Global Economic Prospects Report*. World Bank Publications.
- World Bank. (May 2020). *International Bank for Reconstruction and Development Supplemental Financing Document for A Proposed Loan in The Amount Of Jpy 31,975.6 Million (US\$ 300 Million Equivalent) To The Republic Of Indonesia*. World Bank Publications.
- World Bank. (2020). *Indonesia Emergency Response to Covid-19 Program*. <https://www.worldbank.org/en/news/loans-credits/2020/05/22/indonesia-emergency-response-to-covid19-program>
- World Bank. (2020). Press Release No. 2020/213/EAP: *The World Bank Approves Financing for Indonesia's COVID-19 Emergency Response*. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/29/the-world-bank-approves-financing-for-indonesias-covid-19-coronavirus-emergency-response>

World Health Organization (WHO). (2020). *COVID-19: Interactive Timeline*. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#event-58>

ULASAN BUKU:

Slavoj Žižek, *Pandemic! Covid-19 Shakes the World.*

New York dan London: OR Books, 2020.

Iqra Anugrah¹

Pandemi Covid-19 telah mengguncang tatanan ekonomi-politik dunia. Tidak seperti disrupsi sebelumnya terhadap kapitalisme global dalam dua dekade terakhir (serangan 11 September dan *War on Terror*, Krisis Keuangan Global, Gerakan *Occupy Wall Street*, Musim Semi Arab, dan berbagai momen populis), disrupsi saat ini didorong oleh entitas non-manusia: virus. Kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemi ini – secara fisik, sosial, ekonomi, dan politik – membuat banyak orang bertanya-tanya tentang masa depan dunia. Akankah semuanya tetap sama? Apakah krisis ini adalah akhir dari kapitalisme dalam bentuknya saat ini? Adakah masa depan bagi politik emansipatoris yang baru?

Filsuf-*provocateur* Slavoj Žižek berupaya mengupas sengkarut yang tengah berlangsung ini dalam komentar politik terbarunya, *Pandemic! Covid-19 Shakes the World*. Terjebak dalam keadaan serba sulit yang sedang kita alami, satu-satunya solusi untuk krisis ini, menurutnya, adalah revitalisasi proyek Komunis.

Proklamasi Žižek mungkin terkesan berbahaya – atau basi, tergantung sudut pandang dan kesetiaan politik seseorang. Tapi saya mohon kepada para pembaca untuk menyelesaikan buku ini. Prognosisnya tentang krisis Covid sangat kena.

¹ Penulis adalah editor-kontributor di IndoProgress, dan Postdoctoral Fellow di Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan. Dia dapat dihubungi di officialiqaanugrah@gmail.com.

Perenungannya dibagi menjadi sepuluh bab pendek. Dia mulai dengan memperdebatkan bagaimana pandemi, suatu kemungkinan alami, menyatukan spesies manusia dalam pengalaman ketidakberdayaannya. Efek katastrofisnya menampakkan keterbatasan mekanisme pasar dan perlunya tindakan yang terlihat “komunis”: koordinasi karantina massal serta kegiatan produksi dan distribusi (hal. 10-12).

Dia kemudian membahas nasib kelas pekerja selama pandemi di bab kedua yang berjudul jitu “Mengapa kita terus-terusan lelah?” Berjangkar kokoh dalam tradisi ekonomi-politik Marxis, ia menggambarkan kondisi kerja yang tidakimbang dan tingkat keterasingan yang dialami oleh berbagai lapisan rakyat pekerja. Tenaga medis dan pekerja esensial bertumbangan di garis depan, sementara yang lain “terkurung secara paksa atau sukarela di rumah masing-masing.” (hal. 19). Bagi banyak orang di negara-negara Dunia Ketiga, situasinya bahkan lebih mengerikan. Tatanan produksi Fordis yang lama tidak hilang, hanya diserahkan kepada pekerja keras di Selatan Global. Untuk setiap pekerja kognitif yang mengeksploitasi diri di Los Angeles (atau Jakarta, dalam hal ini), ada lebih banyak lagi pekerja dengan karakteristik proletar klasik dalam kawasan dan negara yang disebut “ekonomi-ekonomi berkembang.” Pandemi memperburuk kesenjangan kelas tersebut.

Selanjutnya, Žižek mengalihkan perhatiannya ke elit global. Dia menohok para pemegang kekuasaan yang ada, terutama formasi kapitalis-otoriter baru yang dia sebut virus Putogan – “tarian iblis antara Erdogan dan Putin” yang telah menyebabkan intensifikasi perang saudara Suriah dan krisis pengungsi Eropa (hal. 33). Hal ini kemudian memberi dalih bagi para populis rasis untuk menghubungkan ancaman virus corona dengan krisis imigran dan pengungsi di Eropa. Tetapi virus tidak mengenal batas dan menginfeksi semua orang, warga negara dan bukan warga negara. Jalan keluar dari kebuntuan ini bukanlah humanisme liberal yang abstrak. Toleransi dan solidaritas bagi mereka yang paling terkena dampak krisis geopolitik dan Covid memang diperlukan, tetapi tidak cukup. Tanggapan materialis kiri yang lebih baik terhadap krisis ganda adalah ini: baik negara miskin *maupun* kaya sama-sama berkepentingan untuk mengatasi krisis berkepanjangan ini.

Ini membawa kita ke proposal sang filsuf yang dia uraikan di sisa buku ini. Kontra kebebalaan bahwa pandemi akan segera berakhir lalu keadaan akan kembali normal di bawah kapitalisme pasar, Žižek menyerukan restrukturisasi cara hidup kita saat ini dan apa yang sebelumnya dia gambarkan sebagai langkah-langkah “komunis”: koordinasi dan organisasi global untuk mengendalikan ekonomi dengan kekuasaan eksekutif yang kuat. Kontra denialisme dan histeria, dia mendesak kita untuk menerima transformasi mendasar dari cara hidup kita dan merangkul masa depan yang tidak pasti. Dia juga merayakan keberanian para pembangkang sehari-hari seperti kelompok-kelompok anti-apartheid di Israel dan warga Wuhan, yang melabrak keheningan dan kesewenang-wenangan para penguasa. Pada saat yang sama, dia juga menganjurkan perlunya negara yang kuat dikombinasikan dengan inisiatif kolektif yang terdesentralisasi untuk mengatasi bentuk-bentuk baru krisis. Ini, baginya, adalah “satu-satunya hal egotis rasional yang perlu dilakukan” (hal. 68).

Di penghujung bukunya, Žižek menantang kebebalaan konservatif untuk melanjutkan bisnis seperti biasa (“jangan mengorbankan ekonomi karena pandemi, ayo kembali bekerja!”) dan alarmisme sederhana Giorgio Agamben (2020a; 2020b) (“kondisi pengecualian ada di depan mata!”). Sebaliknya, ia mengatakan: jangan korbankan konstituen material dari ekonomi itu sendiri – rakyat pekerja – dengan memerangi pandemi ini secara militan. Lebih lanjut, pembacaan Agamben tentang meningkatnya campur tangan negara, dalam pandangan Žižek, harus didasarkan pada ekonomi politik aktual. Kebijakan serampangan yang diambil oleh elit negara harus dilihat tidak hanya sebagai pertanda intrusi negara yang semakin mengkhawatirkan, tetapi juga sebagai indikasi inkompetensi para elit tersebut dalam menangani krisis kapital yang ditimbulkan pandemi. Pada saat yang sama, pembatasan kebebasan oleh virus dan negara yang sedang kita alami juga memicu gelombang solidaritas lokal dan global dalam mengatasi dampak pandemi. Realitas dasar, mengutip istilah Agamben, “kehidupan telanjang” (*bare life*) dan kematiannya, menurut Žižek, mempersatukan alih-alih memisahkan kita.

Terakhir, Žižek menutup dengan catatan politik – sekaligus pribadi: upaya kita, praktik komunisme, adalah satu-satunya jalan ke depan untuk menyelamatkan umat manusia dan, dengan melakukan itu, menciptakan kemanusiaan baru (hal. 105). Dia mengharapkan bahwa “kehidupan yang layak dan tidak terasing” ini entah bagaimana akan “bertahan ketika pandemi berlalu” (hal. 114).

Seperti banyak komentar/analisis? politik Žižek lainnya, buku *Pandemic!* memberikan pandangan kontrarian nan segar tentang isu-isu saat ini dan selingan yang menyenangkan dari eksplorasi teoretisnya yang lebih berat. Serangan tajamnya terhadap pemahaman konvensional dan narasi arus utama tentang pandemi ini digenapi juga oleh pesan solidaritasnya yang empatik di masa Covid-19. Pembaca juga akan menikmati cara dia menjalin perenungannya dengan referensi budaya kontemporer – gaya dan kekuatannya yang khas. Secara khusus, pembaca Indonesia akan mengapresiasi kepekaannya terhadap kondisi kelas pekerja di Selatan Global selama pandemi.

Namun demikian, saya ingin menantang elaborasi Žižek dalam beberapa aspek. Pertama, dia tidak melangkah cukup jauh dalam tawarannya terkait bentuk baru Komunisme. Upaya kolektif kita untuk menyelamatkan umat manusia dari dirinya sendiri, menurut Žižek, sudah bersifat komunis. Dia menyamakan “Komunisme yang dipaksakan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup” ini dengan “Komunisme Perang” para Bolshevik (hal. 92).² Namun, ada satu konsekuensi logis utama – dan pelajaran sejarah – yang jelas hilang di sini: perencanaan pasca-Komunisme Perang mengharuskan pembangunan masyarakat sosialis. Maka pertanyaan bagi Žižek dan semua kaum kiri yang berkomitmen adalah ini: apa yang akan terjadi setelah Komunisme Perang di masa pandemi? Mengadopsi gestur Žižekian – dan Gramscian – di sini, saya tetap pesimis. Masa depan pascapandemi tetap suram: tingginya ongkos kesehatan masyarakat yang harus dibayar, tragedi kemanusiaan, rekonstitusi kekuatan kapital dan para pengendalinya, dan kekua-

² “Komunisme Perang” Soviet diterapkan untuk mempertahankan negara buruh tersebut dari pengepungan imperialis selama Perang Saudara Rusia 1918-1921.

saan negara yang sewenang-wenang akan terus menghantui kita. Apa tanggapan Komunis yang tepat terhadap kerumitan pascapandemi ini?

Hal ini membawa kita ke keluhan kedua saya. Izinkan saya bertanya secara provokatif: sejauh mana “Komunisme Perang” Žižek tidak lain adalah demokrasi sosial Keynesian yang dibangkitkan kembali, tapi dengan steroid? Saya setuju dengan Žižek tentang perlunya negara yang kuat diiringi inisiatif solidaritas dari bawah untuk menangani berbagai krisis kita saat ini *sembari* menjamin kebebasan dasar kita. Tetapi mengapa tidak katakan apa adanya saja – atau lebih tepatnya memprovokasi – tentang perlunya *perencanaan* demokratis melawan kapitalisme pasar dan bencana ekologis? Jika kaum Kiri, seperti yang didesak Žižek (2020), harus “berani menyebut namanya,” bukankah mereka seharusnya juga bangga dengan pencapaian dan eksperimen masa lalunya sambil mengakui keterbatasan dan kegagalan mereka?

Terlepas dari kritisisme ini, *Pandemic!* adalah analisis yang terang, analitis, penuh harapan, dan menggugah pemikiran tentang krisis Covid-19 ini. Žižek menunjukkan komitmen politiko-etisnya sebagai seorang kiri radikal klasik, seperti yang ditunjukkan dalam penjabarannya tentang kondisi kerja massa rakyat di bawah pandemi dan naiknya langkah-langkah koordinasi dan solidaritas “komunis” baru sebagai sebuah fase penting dalam sejarah dunia. Manifesto politik ini tidak hanya serius, tetapi juga menyenangkan untuk dibaca. Sekali lagi, Žižek sang juru tulis pamflet politik sukses dalam menunaikan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, G. (2020, Februari 26). The state of exception provoked by an unmotivated emergency. *Positions*. <https://positionspolitics.org/giorgio-agamben-the-state-of-exception-provoked-by-an-unmotivated-emergency/>
- Agamben, G. (2020, March 17). Clarifications. *An und für sich*. <https://itself.blog/2020/03/17/giorgio-agamben-clarifications/>
- Žižek, S. (2020). *A Left that Dares to Speak Its Name: 34 Untimely Interventions*. Polity Press.

